

SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN

Tim Penulis:

**Djohan Makmur
Pius Suryo Haryono
Sukri Musa
Hadi S.**

Penyunting :
Djohan Makmur

Koreksi Naskah :
Soejanto

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONA
JAKARTA
1993**

SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN

Tim Penulis : Djohan Makmur
Pius Suryo Haryono
Sukri Musa
Hadi S.

Penyunting : Djohan Makmur

Koreksi Naskah: Soejanto

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

Jakarta 1993

Edisi 1993

Dicetak oleh: CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta - Indonesia

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

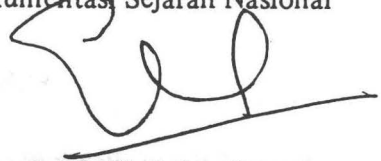
Buku *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992/1993.

Buku ini memuat uraian tentang perkembangan pendidikan di Indonesia sejak kedatangan bangsa-bangsa Barat sampai menjelang kemerdekaan (1600–1945). Buku ini antara lain memuat tentang masa pengaruh Portugis, masa pengaruh Belanda dan mencoba memberikan gambaran mengenai wujud lembaga, tujuan, isi, proses serta pihak yang terlibat dalam pendidikan pada masa tersebut.

Penerbitan buku *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* dimaksudkan untuk melengkapi penerbitan seri Sejarah Pendidikan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Proyek IDSN. Di samping itu pengetahuan mengenai pendidikan di masa lampau akan sangat berguna bagi penentuan cara pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bersifat nasional. Namun demikian perlu diingat bahwa cara pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa lampau sangat beragam, karena itu perlu dipikirkan agar keragaman itu tetap memperoleh tempat dengan satu landasan yakni UUD 1945.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Juli 1993
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Bab I Pendidikan dan Pengajaran dalam Abad Ke-16--18	5
1.1 Masa Pengaruh Portugis	5
1.2 Masa Pengaruh Belanda	9
Bab II Pendidikan dan Pengajaran dalam Abad Ke-19	56
2.1 Pendidikan dan Pengajaran Masa Daendels (1808--1811)	57
2.2 Pendidikan dan Pengajaran Masa Raffles (1811--1816)	58
2.3 Pendidikan Untuk Penduduk Golongan Eropa	59
2.4 Pendidikan Untuk Golongan Bumiputra ...	62
2.5 Pendidikan Kejuruan	68
2.6 Sekolah Dokter	70
Bab III Pendidikan dan Pengajaran Abad Ke-20	73
3.1 Pendidikan dan Pengajaran Zaman Pemerintahan Hindia Belanda	73

3.2	Sistem Pendidikan, Tingkat dan Jenis Sekolah	84
3.3	Pendidikan dan Pengajaran pada Zaman Pendudukan Jepang	100
Penutup	106
Daftar Pustaka	112

PENDAHULUAN

Berbagai buku mengenai sejarah pendidikan di Indonesia telah diterbitkan, sehingga penerbitan buku baru mengenai hal itu boleh jadi memerlukan dasar pembenarannya. Buku-buku sejarah yang baru biasanya muncul karena penemuan sumber-sumber baru yang menuntut penulis kembali buku-buku yang lama, atau karena tujuan-tujuan baru menuntut penulisan kembali bahan-bahan yang sudah dikenal untuk memenuhi persyaratan-persyaratan baru. Tulisan ini akan mengambil bagian dalam kedua maksud di atas, terutama mencoba mengemukakan suatu penyusunan baru di bidang sejarah tentang pendidikan di Indonesia.

Bimbingan teknis aspek-aspek kesejarahan yang diadakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 14 – 16 Mei di Cibogo – Bogor, telah mengemukakan beberapa permasalahan dan tujuan tentang penulisan "Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan".

Ciri utama cara mendidik pada masa sebelum kedatangan orang Eropa adalah berkumpulnya guru dan murid di suatu tempat untuk jangka waktu cukup lama, dan pemberian pelajaran yang tidak terikat kepada saat atau waktu tertentu. Melalui cara demikian itulah kaum cendekiawan masa lampau itu dihasilkan. Para cendekiawan yang menimba ilmu dengan

selalu duduk tidak jauh dari gurunya dikenal sebagai "sarjana", yang sebenarnya berasal dari kata "sad" yang berarti duduk dekat, dan "jana" yang berarti orang; maksudnya ialah orang yang duduk dekat gurunya. Istilah "sarjana" tetap digunakan sampai sekarang. Kedatangan orang Eropa, terutama orang Belanda, menyebabkan sistem pendidikan yang dianut masyarakat Indonesia berubah. Belanda membawa sistem baru, yaitu pelajaran yang hanya diberikan pada suatu kurun waktu tertentu, yang dikenal sebagai **sekolah**. Selepas waktu itu kurang kemungkinannya untuk menimba ilmu dari guru, karena mereka kembali ke rumah masing-masing. Perubahan sistem pengajaran tersebut tentulah merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji dan ditulis. Masalah yang dimaksud telah dirumuskan dalam berbagai pertanyaan, di antaranya ialah "bagaimana wujud lembaga itu, apa yang diajarkan, bagaimana hal itu diajarkan, dan siapa saja yang boleh mengajar atau belajar?" Dapat pula diajukan berbagai pertanyaan yang lain sehubungan dengan hal itu. Dalam kaitan dengan masalah di atas telah pula dikemukakan suatu kesimpulan, yaitu mengenai "rentang pradugaan bahwa (terutama) isi dan tujuan pendidikan pada masa itu berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, walaupun sistemnya sama". Penulisan tentang sejarah pendidikan di Indonesia antara tahun ± 1600-1945 akan mengusahakan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai wujud lembaga, tujuan, isi, proses serta pihak yang terlibat dalam pendidikan pada masa tersebut.

Agaknya orang-orang terutama tertarik pada sejarah pendidikan dan tentu saja pada sejarah yang lain-lain, karena dapat memberikan kepada mereka suatu gambaran tentang bagaimana terjadinya keadaan yang sekarang ini. Memang ada orang-orang yang mempunyai suatu minat antikuariatik (yang berhubungan dengan zaman kuno) tentang masa lalu sekedar hanya sebagai sesuatu yang telah berlalu, tetapi tidak demikian halnya dengan para profesional di bidang pendidikan, apakah itu para pendidik atau peserta didik, yang lebih berminat pada sejarah tentang profesi mereka, karena dapat menggambarkan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi dan kurang mempunyai waktu

untuk suatu kajian tentang pokok-pokok persoalan masa lampau belaka.

Sudah pasti bahwa sebagian besar sejarah pendidikan konvensional ditulis dengan maksud agar para pembacanya dapat mengenal masalah-masalah praktis yang sedang berkembang dewasa ini dalam dunia pendidikan. Sayangnya, walaupun telah diusahakan sesuai dengan maksud di atas, tetapi hasil akhirnya masih saja membuat pembacanya justru merasakan bahwa sejarah tersebut disusun menurut kepentingan masa lampau belaka, karena penyusunan materinya terutama disesuaikan dengan periode-periode temporal, dimulai dengan zaman kuno dan dilanjutkan sampai masa kini, sedangkan setiap periode berusaha memberikan suatu laporan yang lengkap mengenai keadaan-keadaan utama tentang pendidikan. Uraian-nya meliputi tujuan pendidikan, metode, dan kurikulum yang dilaksanakan pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dipandang dari sudut kondisi politik dan ekonomi serta dari sudut teori psikologi dan filosofi. Untuk mengungkapkan suatu laporan yang terpadu serta utuh tentang aspek-aspek tersebut dalam setiap periode, diperlukan uraian yang cukup panjang dan waktu yang cukup banyak, sehingga para pembaca menjadi terhalang untuk dapat menggapai masa kini. Tanpa disadari mereka tergelincir ke dalam kebiasaan berpikir, bahwa pengetahuan sejarah lebih banyak merupakan pengetahuan tentang masa lampau, pada hal seharusnya merupakan genesis (asal) dari pengetahuan tentang berbagai masalah masa kini. Hanya pada bagian terakhir masing-masing bab atau pada bagian penutup buku sejarah mereka mungkin dapat memperoleh sesuatu pandangan sekilas mengenai hubungan yang hidup antara masa lampau dan masa kini. Namun demikian mungkin saja mereka segera sesudah itu melupakan banyak materi masa lampau, yang sebenarnya membuat masa kini lebih signifikan.

Tulisan ini berusaha menghindari kesukaran-kesukaran di atas, dengan menjadikan dasar penyusunan materi sejarah ialah masalah-masalah atau bidang-bidang permasalahan yang ditawarkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah

Nasional di atas. Lingkup penulisan dibatasi pada pendidikan formal "gaya baru" atau sekolah untuk semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Dalam Penelitian Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan ini digunakan metode kajian pustaka dengan melakukan penelitian berdasarkan pendekatan tekstual (berdasarkan naskah, arsip, dan dokumen). Di samping itu untuk lebih memantapkan penelitian ini dilengkapi dengan memanfaatkan metode sejarah lisan.

Penyusunan buku ini dilaksanakan oleh suatu kelompok (tim) penulis, dengan kerangka penulisannya sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, Bab II Pendidikan dan Pengajaran dalam Abad Ke-16--18, Bab III Pendidikan dan Pengajaran dalam Abad Ke-19, Bab IV Pendidikan dan Pengajaran pada Permulaaan Abad Ke-20, dan Bab V Penutup.

Pembagian tugas dalam penulisan buku adalah sebagai berikut. Prof. Dr. Djohan Makmur sebagai penyusun dan penulis, dan Drs. Suryo Haryono, Drs. Sukri Musa serta Drs. Hadi S. sebagai tim pembantu penulisan buku ini.

Penyusunan buku ini akhirnya dapat dirampungkan berkat adanya bantuan, baik moral maupun material dari berbagai pihak.

Kelompok penulis masih merasa adanya kekurangan serta kekhilafan dalam penulisan ini, dan karenanya segala usul dan kritik yang membangun akan kami sambut dengan kedua tangan terbuka.

Tim Penulis

BAB I

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM ABAD KE-16--18

1.1 Masa Pengaruh Portugis

Sejarah pendidikan yang melaksanakan sistem pengajaran dengan wujud lembaganya yang lebih dikenal dengan **sekolah**, sebenarnya sudah dimulai pada permulaan abad ke-16, yaitu dengan kedatangan Bangsa Portugis di Indonesia, yang kemudian disusul oleh Bangsa Spanyol. Kedatangan Bangsa Portugis sebagai orang *Peranggi* tidak dapat dipandang terlepas dari konteks perkembangan sistem dunia yang semakin meluas sebagai akibat ekspansi Barat sejak akhir abad ke-15. Ditambah pula bahwa hubungan di bidang politik dan ekonomi antara bangsa-bangsa di Eropa khususnya bangsa Portugis dan Spanyol, dengan bangsa-bangsa di Asia khususnya bangsa-bangsa di Timur Tengah, tidak dapat dilepaskan dari dampak Perang Salib.¹ Persaingan di bidang perdagangan dan pelayaran menambah semakin tajamnya konflik tersebut.

Dilihat dari sudut pandangan bangsa-bangsa Barat dengan sikap keagamaannya dalam abad pertengahan, yaitu bahwa setiap orang Moro/Moor (ada kaitannya dengan daerah Morokko, nama sebuah negara di Afrika Utara) yang beragama Islam, adalah musuh dari orang Kristen. Hal ini berarti bahwa mereka di mana pun di dunia harus diperangi. Usaha kristiani-

sasi yang dilakukan oleh para misionaris yang menyertai ekspedisi militer Portugis dan Spanyol semakin memperhebat konfrontasi di atas dan dengan sendirinya membawa pengaruh terhadap pendidikan di daerah-daerah yang bersangkutan. Ketika Pendeta Ignatius Loyola dalam tahun 1534 untuk pertama kali mendirikan Ordo Yesuit di Paris, tujuan semula adalah untuk membangun Orde Baru bagi pelayanan tugas-tugas misi agama Katolik Roma di Palestina, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi yang sangat militan untuk memperjuangkan dan menyebarluaskan agama tersebut ke segala penjuru dunia. Antara tahun 1539–1550 organisasi Ordo Yesuit semakin disempurnakan menjadi *a military company of Jesus*, yang disusun sangat rapi berdasarkan suatu kode peraturan yang bernama *Regimini Militantis Ecclesiae*.² Salah satu sarana bagi kegiatan misi orde ini, yang kemudian ternyata sangat efektif dan efisien adalah bidang pendidikan. Seperti yang diatur oleh Pendeta Aquaviva (1543–1615) dalam risalah *Ratio Studiorum* (1585–1599), sebuah dokumen yang sangat terkenal dalam sejarah pendidikan,³ perencanaan tentang tujuan, isi, proses dan pihak yang terlibat dalam pendidikan, merupakan usaha berskala besar dan yang disusun dengan sangat cermat yaitu untuk menambahkan ketaatan kepada cita-cita Gereja Katolik Roma melalui cara pengajaran biasa. Pendidikan agama merupakan unsur pokok dalam struktur pengajaran.

Kemashuran dan jumlah peserta sekolah-sekolah Yesuit yang semakin meningkat sebagian besar tergantung pada prioritas pelajaran tentang Sastra Yunani dan Romawi Kuna (*The Classics*). Pada umumnya sekolah-sekolah ini memperlihatkan suatu keadaan yang jauh dari suasana "pertapaan" atau yang bersifat sangat ketat. Keganjilan dan kepelikan sifat pribadi masing-masing murid mendapat perhatian khusus dari para guru, sehingga salah satu tujuan mengajar ialah untuk menemukan bakat-bakat istimewa mereka dan mengarahkannya secara bijaksana kepada kepentingan Ordo Yesuit. Para guru mengajukan tawaran pelajaran tentang bagaimana mengasihi diri dan orang lain serta peningkatan semangat melebihi apa

yang sudah mereka miliki. Para murid dianjurkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan deklamasi dan perdebatan di luar jam sekolah, bersaing untuk memperoleh penghargaan dan hadiah, memperkenalkan karya tulis tentang berbagai pengetahuan dan mengadakan pertunjukan-pertunjukan drama. Hal ini ditambah pula dengan sekolah-sekolah Yesuit yang tidak memungut biaya atau pembayaran uang sekolah, sehingga mampu menarik anak-anak berbakat dari keluarga yang kurang mampu. Sekolah-sekolah ini akhirnya mendapat perhatian dan sambutan dari berbagai kalangan masyarakat tanpa mempersoalkan agama yang dianut atau status sosialnya.

Salah seorang pengikut pertama Ordo Yesuit, yaitu Franciscus Xaverius (Francis Xavier, meninggal tahun 1552) kemudian berhasil mendirikan berbagai misi Gereja Katolik Roma di India, Indonesia, dan Jepang, sekaligus menjadi peletak dasar dari *katholicisme* di Indonesia.⁴ Dialah yang menegaskan bahwa untuk memperluas agama Nasrani perlu didirikan sekolah di mana-mana, terutama di daerah-daerah non-Kristen.

Secara historis Kepulauan Amboina sangat terkenal sebagai suatu daerah penghasil cengkih, tetapi sebenarnya daerah tersebut bukan merupakan "pulau rempah-rempah" yang asli. Selama berabad-abad sebelum kedatangan orang-orang Barat di Kepulauan Maluku, para pedagang Melayu, Jawa, dan Cina telah melakukan dagang cengkih secara "barter" di daerah-daerah bagian utara kepulauan tersebut, yaitu di Halmahera, Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Ketika orang-orang Portugis pada permulaan abad ke-16 tiba di sana, perdagangan cengkih berpusat di sekitar daerah-daerah kerajaan Islam, yaitu di Ternate dan Tidore. Selama abad ke-16 itu berkobarlah pertentangan bersenjata yang sangat hebat antara Ternate, Tidore, Semenanjung Tanah Melayu, dan Jawa dengan orang-orang Barat untuk memperebutkan hegemoni atas daerah-daerah penghasil cengkih di atas. Sebagai akibatnya, timbullah daerah-daerah baru penghasil cengkih, yaitu di daerah-daerah bagian selatan Kepulauan Maluku, seperti di Hoamoal, Hitu, Larike dan Seram.⁵ Hubungan dagang berkembang antara Hitu dengan Tuban dan Gresik di Jawa Timur. Bersamaan

dengan itu penduduk Hitu mulai memeluk agama Islam.⁶ Pada permulaan abad ke-17 cengkih yang dihasilkan di Kepulauan Amboina sudah melebihi kebutuhan konsumsi dunia.⁷

Kontak pertama antara Hitu dan orang-orang Portugis terjadi pada tahun 1525. tetapi orang-orang Portugis dipaksa pindah ke Semenanjung Leitimor. Di tempat itu mereka membangun sebuah benteng yang selanjutnya menjadi Kota Ambon sekarang. Bersamaan dengan itu mereka memperluas penanaman pohon cengkih, bukan saja di Leitimor tetapi juga di Kepulauan Lease. Sampai akhir abad ke-16 terciptalah suatu *balance of power* antara orang-orang Islam di Hitu, orang-orang Ternate di Semenanjung Hoamoal (Seram Barat) dengan orang-orang Portugis di Leitimor dan di Kepulauan Lease. Dalam keadaan yang cukup sulit ini ternyata orang-orang Portugis telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan komunitas Kristen di Ambon. Dalam tahun 1536 penguasa Portugis untuk daerah Maluku, Antonio Galvano, mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak para pemuka pribumi di Ternate, yang merupakan sekolah agama Kristen bagi anak-anak mereka. Sekolah yang sejenis kemudian didirikan di Pulau Solor, dengan jumlah murid sebanyak 50 orang. Murid-murid yang berasal dari golongan pribumi dan yang ternyata mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan ingin melanjutkannya, dapat meneruskan studi di Goa (India), yang merupakan pusat kekuatan orang-orang Portugis di Asia. Franciscus Xaverius berangkat dari Ternate ke Goa dengan membawa pemuda-pemuda Maluku untuk melanjutkan pelajarannya di kota tersebut.

Tahun 1546 di Ambon sudah terdapat tujuh buah kampung pemeluk Agama Katolik Roma.⁸ Selain pelajaran agama, diberikan pula pelajaran tentang membaca, menulis, dan berhitung (3 R), ditambah dengan pelajaran tentang bahasa Latin. Walaupun demikian, belum diketahui secara jelas bahasa apa yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut, apakah bahasa daerah, bahasa Portugis, bahasa Latin, atau bahasa yang lain? Barangkali masalah bahasa pengantar inilah yang merupakan salah satu kekurangan bahkan rintangan

dalam sistem pengajaran di sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang Portugis, walaupun wujud lembaga, tujuan, isi, proses dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sudah jelas.

Orang-orang Belanda yang kemudian menggantikan kedudukan orang-orang Portugis dengan perencanaan terarah menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu (yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia) pada sekolah-sekolahnya. Persebaran agama Katolik Roma di daerah Indonesia Bagian Timur (IBT), dan penyelenggaraan pendidikannya kurang mendapat kemajuan yang berarti. Di antaranya karena faktor-faktor yang disebut di atas di samping juga karena hubungan orang-orang Portugis dengan orang Ternate semakin kurang baik dan mereka masih harus bersaing dan berperang melawan orang-orang Spanyol dan Inggris. Akhirnya orang-orang Belanda berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Indonesia sekaligus mengambil alih segala harta kekayaan mereka, termasuk milik Gereja Katolik Roma beserta lembaga-lembaga pendidikannya. Namun demikian sebagian penduduk Indonesia Bagian Timur, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur, masih tetap memeluk agama Katolik Roma sampai sekarang.

Orang-orang Spanyol, berdasarkan Perjanjian Tordissilas yang diprakarsai oleh Sri Paus di Roma dan diselesaikan dalam Perjanjian Saragosa (1527), tidak sempat menanamkan pengaruhnya di Indonesia.⁹ Garis Saragosa kemudian pada dasarnya menjadi garis pemisah antara Indonesia bekas jajahan Belanda dan Filipina bekas jajahan Spanyol.

1.2 Masa Pengaruh Belanda

1.2.1 Kedatangan Bangsa Belanda

Akhir abad ke-16 dan awal ke-17 merupakan giliran bagi orang-orang Belanda untuk menanam dan memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Mereka mendiami tanah-tanah rendah (*De Nederlanden* atau sering disebut *Holland*) di sekitar muara sungai-sungai besar di Eropa Barat, seperti Sungai Rhein dan Sungai Maas. Mata pencaharian mereka banyak tergantung

pada laut, di antaranya dengan menggunakan kapal-kapal melakukan transportasi dan sekaligus sebagai pedagang perantara di wilayah perairan Eropa Barat. Ketika pada tahun 1585 Portugal jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Spanyol yang beragama Katolik Roma sedangkan orang-orang Belanda yang beragama Kristen Protestan sedang berjuang untuk memerdekakan negerinya dari negara penjajah Spanyol melalui perang 80 tahun (1568--1648), mata pencaharian di atas menjadi sangat sulit.¹⁰ Keadaan tersebut memaksa orang-orang Belanda mengambil keputusan untuk menjemput atau membeli secara langsung bahan-bahan dagang, terutama rempah-rempah dari daerah asalnya yaitu Kepulauan Indonesia. Jika kedatangan orang-orang Portugis ke Indonesia bermotif kepentingan ekonomi, agama dan petualangan, maka kedatangan orang-orang Belanda terutama bermotif pada kepentingan perdagangan.¹¹

Untuk melaksanakan keputusan di atas, Pemerintah Belanda melalui keputusan sidang *Staten Generaal* (parlemen) memberikan kekuasaan penuh kepada sebuah perserikatan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur, yaitu VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) untuk menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Langkah pertama orang-orang Belanda pada tahun 1605 ialah mengambil alih posisi orang-orang Portugis di Kepulauan Amboina (Maluku Selatan),¹² selanjutnya pada tahun 1619 mereka berhasil mendirikan Bandar Jayakarta sekaligus mengubah namanya menjadi Batavia, sebagai basis perdagangan dan kekuasaan politiknya di Indonesia sampai tahun 1942. Pada akhir abad ke-17 mereka berhasil mengisolasi Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga mampu mengawasi lalu lintas antarpulau di wilayah perairan Nusantara.¹³

Orang-orang Indonesia justru semakin tenggelam dalam pertikaian bersenjata antara sesamanya, sehingga tidak menyadari akan bahaya yang semakin mengancam dari pihak orang-orang Belanda. Walaupun secara kuantitatif jumlah orang Belanda kelihatan kecil dan lemah, tetapi karena adanya persatuan dan kesatuan di antara mereka serta didukung oleh disiplin yang tinggi, maka secara kualitatif mereka menjadi

sangat tangguh. Kebijakan politik dan usaha untuk melestarikan kekuasaan Belanda di Indonesia, antara lain dilaksanakan dan didukung melalui usaha-usaha di bidang pendidikan, tujuan, isi, proses dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya disesuaikan dengan kebijakan tersebut; misalnya, orang-orang Belanda beserta keluarganya memerlukan pendidikan dan latihan, baik mengenai pengetahuan umum maupun mengenai pengetahuan khusus tentang Indonesia. Di samping itu VOC memerlukan tenaga-tenaga pembantu yang murah untuk keperluan menggerakkan roda pemerintahan dan roda perekonomian yang tentunya diambil dari kalangan penduduk pribumi. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan sewajarnya untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut. Hal yang tidak kalah penting ialah bahwa pendidikan juga dimanfaatkan untuk membina kelompok-kelompok di kalangan penduduk pribumi, yang kesetiaan serta loyalitasnya kepada orang-orang Belanda dapat diandalkan, di antaranya komunitas-komunitas emigran Kristen di Ambon.¹⁴

1.2.2 Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Selama Abad Ke-16-18

Pendidikan berdasarkan sistem Barat yang pertama kali dilaksanakan di Kepulauan Maluku Selatan, terutama dikaitkan dengan ajaran agama Kristen. Sekolah yang pertama didirikan oleh orang-orang Portugis adalah di negeri-negeri (Kesatuan Daerah) yang penduduknya sudah memeluk agama Kristen. Ketika orang-orang Belanda mengambil alih kekuasaan orang-orang Portugis di sana, jumlah sekolah-sekolah yang ada tidak begitu jelas; diperkirakan bahwa di Ambon terdapat 31 sekolah dan di Kepulauan Lease 26 sekolah.¹⁵ Berdasarkan sebuah laporan dari Rumphius tentang pertemuan antara seorang raja Ambon dan seorang penguasa lautan (*zee-voogd*) VOC, yaitu Cornelius Matelief, diungkapkan bahwa orang-orang Ambon menginginkan agar orang-orang Belanda melanjutkan pendidikan yang telah dirintis oleh orang-orang Portugis, tetapi dengan cara-cara yang lebih baik, termasuk pendidikan agama Kristen Protestan.¹⁶ Selama dua dekade orang-orang Belanda

meneruskan saja apa yang telah berjalan di sekolah-sekolah, karena sebagai kongsi dagang VOC kurang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan dan menyerahkannya saja kepada pihak gereja. Baru kemudian disesuaikan tujuan, isi, proses dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dengan kepentingan VOC, misalnya pengembangan agama Kristen Protestan melalui pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan loyalitas penduduk pribumi kepada penguasa baru, yaitu orang-orang Belanda.¹⁷ Pada tahun 1614 seorang pendeta Belanda untuk pertama kalinya tiba di Ambon guna melayani umat Kristen di sana. Pada tahun 1607 mulai dirintis sebuah sekolah untuk mendidik guru-guru Injil (*school-meesters*) yang berasal dari kalangan penduduk pribumi. Di sekitar tahun 1628 sudah berdiri 18 sekolah dengan murid sebanyak 800 orang. Akhir abad ke-17 jumlah sekolah meningkat menjadi 54 buah dengan jumlah murid sebanyak 4.700 orang. Diperkirakan bahwa 30-40% anak-anak pribumi yang beragama Kristen sudah ditampung di sekolah-sekolah.¹⁸ Para guru Injil ini memiliki wibawa keagamaan di negeri-negeri,¹⁹ yaitu bertanggung jawab atas pengajaran agama dan menjadi pemimpin jemaah-jemaah Kristen di sana. Mereka ini beserta sekolah-sekolahnya kemudian menjadi fondamen bagi pembangunan protestanisme di Ambon, terutama karena murid-murid sekolah guru tersebut sebagian besar berasal dari keluarga raja-raja.²⁰

Proses belajar-mengajar masih berlaku secara sangat sederhana dengan penekanan pada pengajaran agama; misalnya pelajaran membaca, menulis, dan bernyanyi selalu dikaitkan kepada ajaran agama. Sebagian besar murid telah berhasil menyelesaikan pelajarannya, yaitu mengenai *catechismus* dan dapat membaca serta menulis seperlunya. Faktor yang lain yang turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan di zaman itu adalah bahasa yang digunakan dalam proses belajar-mengajar serta materi pengajaran. Untuk itu mula-mula banyak digunakan bahasa Belanda, tetapi sejak tahun 1630 mulai diimbangi oleh penggunaan bahasa Melayu klasik.²¹

Masyarakat pribumi yang beragama Kristen sehari-hari menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Melayu, sehingga

pengertian mereka tentang materi kurikulum sangat terbatas. Mereka lebih banyak menghafal dari pada mendapatkan pengertiannya. Walaupun demikian, ternyata bahwa sekolah merupakan suatu saluran yang sangat penting untuk menggantikan bahasa-bahasa daerah dengan bahasa Melayu, yang kemudian menjadi bahasa pergaulan bagi orang-orang Ambon yang beragama Kristen.²²

Buku pelajaran pertama tentang bahasa Belanda sebagai bahasa asing di Indonesia adalah *AB Boeck*, yang diterbitkan oleh VOC pada tahun 1611, dan khusus untuk keadaan di Indonesia disusun dalam bahasa Melayu dengan tujuan pertama untuk melatih remaja pribumi mengenal Forma Sastra Jerman Iilir (*Forma van Nederduytsche Letteren*).²³ Sayangnya, buku pelajaran yang pertama ini kemudian hilang. Pengetahuan kita tentang buku tersebut bersumber pada bagian "Pengantar" buku *Spieghel van de Maleysche tale*, karangan Albert Cornelisz Ruyll, yang juga penyusun buku AB di atas, yang diterbitkan oleh VOC pada tahun 1612 melalui penerbit *Dirrick Pietersz* di Amstelredam, *op 't Water in de witte persse*. Buku ini diperuntukkan murid-murid yang telah mempelajari buku AB dan telah agak mengerti tentang susunan alfabet. Walaupun judulnya menggambarkan tujuan yang lain, tetapi buku ini dapat dianggap sebagai buku pelajaran tertua tentang bahasa Belanda sebagai bahasa asing yang pernah diajarkan di Indonesia dan sampai sekarang masih tersimpan di Negeri Belanda. Hanya saja buku ini tidak mengungkapkan secara jelas metode pengajaran yang digunakannya. Yang pasti bahwa buku ini bertujuan dengan perantaraan bahasa Belanda dapat mendidik anak-anak pribumi tentang agama dan moralitas Kristen. Ini dapat dilihat dari judul lengkap buku tersebut, yaitu "*Spieghel van de Maleysche tale, inde welcke sich die Indiensche ieugt Christlijck ende vermaeckelijck kunnen oeffenen; Voleertijcke t'samenspraecken ende onderwijsinghen in de ware Godtsiligheyt tot voorstandt vande Christelijcke religie*". (terjemahan bebas : Cermin tentang bahasa Melayu, melalui nama remaja Indonesia dapat melatih diri mengenai agama Kristen serta kemudahannya; percakapan bersama secara jujur dan pengajaran tentang keagun-

an Tuhan agar mendapat pengertian tentang agama Kristen). Buku tersebut sebenarnya merupakan suatu kumpulan dialog, syair dan cerita yang bersifat mendidik, disertai dengan sebuah daftar kata-kata dalam bahasa Melayu-Belanda, dan bersumber pada penjelasan-penjelasan yang berasal dari buku karangan F. de Houtman, *Spraeck ende woord-boeck*, terbitan tahun 1603. Buku ini disusun dalam bahasa Melayu dan Madagaskar, dengan memuat banyak kata-kata Arab dan Turki, memuat dua belas percakapan dalam bahasa Melayu dan tiga dalam bahasa Madagaskar, disertai dengan kata-kata yang ada kaitannya dan disusun menurut abjad ABC sesuai dengan ejaan bahasa Jerman Iir (*Neder-Duitsch*).²⁴ Bahasa Belanda semula diajarkan terutama sebagai kunci untuk membuka cakrawala bagi penyebaran agama Kristen Protestan, atau tepatnya untuk membendung kemajuan agama Katolik-Roma dan sekaligus untuk menenyapkan pengaruh Portugis di Indonesia, tetapi dari dialog-dialog yang terdapat dari buku *de Spieghel* terungkap contoh-contoh yang jelas, seperti halnya dengan buku-buku pelajaran karangan Ruyll dari tahun 1611 dan 1612, bahwa sejarah bahasa Belanda sebagai bahasa asing di Indonesia sudah dimulai sejak 376 tahun yang lalu. Karangan A.C. Ruyll (mungkin Ruil atau Ruyl) yang terbit pada tahun 1629, dengan judul "*Het Nieuwe Testament, . . . in Neder-duijts ende Malaijs, na der Grieccksche waarheyt overgeset-jang Testamentum Bahru . . .*" bersalin kepada *bassa* Hulanda dan *bassa* Melaju, seperti yang *andillan bassa* Gregu, dicetak di Kota Enkhuizen oleh Jan Jacobsz Palenstein. Penerbitan ini merupakan suatu usaha menerjemahkan kitab *Evangelie* dari Mattheus, merupakan sebuah contoh yang paling tua tentang terjemahan sebuah kitab Injil ke dalam suatu bahasa non-Eropa. Terjemahan Mattheus oleh Ruyll ini ternyata kemudian hilang, termasuk buku-buku terjemahannya yang lain, yang diterbitkan antara tahun 1612 – 1629.²⁵ Tentang sejarah bahasa Belanda sebagai bahasa asing di Indonesia dapat diketahui dari sumber yang lalu, di antaranya dari orang-orang Portugis. Misalnya dari buku karangan Paula Vicente, putri penulis terkenal Gil Vicente (\pm 1465–1536/37), yang berjudul "*Arte de lingua Ingleza e Olandeza para innstrucao dos seus Natu-*

raes”, yang ditulisnya pada pertengahan abad ke-16. Penerbitan ini disebut oleh Diogo Barbosa Machado dalam *Bibliotheca Lusitania*, III, hal. 516. Buku tersebut kemudian juga hilang. Sumber yang lain adalah *Kamus Bahasa Belanda—Vlaams*, karangan Noel de Berlaimout (cetakan pertama tahun 1530), sebuah buku yang dimaksudkan sebagai alat bantu untuk belajar bahasa Belanda, yang merupakan bahasa asing di daerah yang sekarang bernama Belgia.²⁶ Tentang metode pengajaran bahasa Belanda yang dipakai di Indonesia sampai akhir abad ke-18 dan alat-alat pengajaran yang digunakan, hampir tak ada keterangan. Hanya beberapa sumber mengemukakan, bahwa pengajaran bahasa Belanda diberikan dengan bantuan naskah-naskah dan syair-syair yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.²⁷ Pada permulaan abad ke-17 untuk pengajaran bahasa Belanda, di samping buku-buku ABC, kitab-kitab *Catechismus*, kitab-kitab tentang sembahyang, kitab-kitab *Injil* dan kitab-kitab *Mazmur (Psalm)*, juga dipakai antara lain buku-buku *Nederlandsche Historien* karangan Tobias, *Nederlandsche Morgenwekkers* dan *Zeevaart* karangan Arnold Cornelius, *Cort begriep der Christelijke religie* (dalam bentuk tanya jawab) karangan Marnix van Sint Aldegonde, *Onderwijs-boekje in de Christelijke godsdienst* karangan Domine Jacobus Borstius, *Historien van Joseph*, *Spiegel van der Jeugd*, *Gebeden Havermans*, *Praktijk der Godzaligheid*, dan *Historien des Bijbels*.²⁸ Demikian pentingnya peranan bahasa Belanda dalam pendidikan yang dikembangkan oleh VOC demi tujuan politiknya, sehingga diajarkan pula ke daerah-daerah kekuasaannya di luar Kepulauan Indonesia. Misalnya, di Soelang yang terletak di Pulau Formosa/Taiwan, selama tahun 1659--1662 dibuka sebuah Collegium untuk mendidik para ahli catechismus, pendeta guru sekolah dan penterjemah, melalui bahasa Belanda dengan menggunakan buku karangan Johannes Amos Comenius, yang berjudul "*De ure off Portaal der Taalen*", berupa percakapan-percakapan sederhana yang disusun dalam bahasa Formosa dan bahasa Belanda.²⁹ Buku yang digunakan sebagai buku pelajaran untuk pengetahuan umum tentang dunia dan untuk pengetahuan bahasa Vestibularis *Grammatica Cum Translatione Belgica* memuat per-

cakapan, latihan dan sebuah daftar kata-kata, yang pada tahun 1658 diterbitkan oleh Gabrielis de Roy di Amstelodami. Buku ini berjudul, "*Eerste deel der Schoolgeleerhijd, genoemt het Portael : Inhoudende de Grondveste der dingen, en onser wijsheyd omtrent de dingen, als mede der Latijnsche Tael met de Moeder-tael; Toegeschiedt nae de wetten des laetsten Spraekweeghs, et met weel beelden verlicht : Prima pars scholasticae eruditionis, dicta vestibulum : Continens Fundamenta Rerum, & nostrae Sapiientiae circa res, ut & Latinae linguae cum Vernacula; Adomatum Juxta Leges, novissimae Methodi, multisq; Iconibus illustratum*", karangan Joannse Amos Cormenius; 156 halaman + daftar tidak diberi nomor.³⁰ Pada kulit buku ini dilukiskan kata-kata "*Portael der Saecken en Spraecken; Vestibulum Rerum et Linguarum*". Buku ini juga dipakai sebagai buku pelajaran pada Seminarie Singhala di Colombo (Srilangka, Ceylon) sesudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda – bahasa Singhala (1698–1796). Di samping itu digunakan pula buku "*Janua Linguarum*", juga disusun oleh Comenius³¹ Yang dimaksud adalah buku Janua, *Lingarum reserata arureau; Hoc ast Compediosa Latinan (et quamlibet aliam) Linguam, una cum scientiarum, artiumque omnius Fundasmentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum periodis mille comprehense* (Genevae: Johannis de Tournes, 1638), 146 halaman + daftar yang tidak diberi nomor.³² Untuk keperluan pendidikan di Formosa digunakan pula buku "*Formulier des Christendoms*" yang disusun oleh Domine Simon Van Breen dan Domine Johannse Hoppert, untuk keperluan guru-guru Injil, baik dari karangan orang-orang Belanda maupun dari kalangan penduduk pribumi.³³ Buku tersebut kemudian diterbitkan dalam dua versi; versi pertama hanya menggunakan bahasa Belanda, sedangkan versi kedua menggunakan bahasa yang dicetak secara berdampingan, ditambah dengan serangkaian keterangan serta penjelasan untuk keperluan para guru.³⁴ Versi kedua ini diterbitkan dengan memakai judul, "*Patar ki tna'msing-an ki Christang, ka Tauki-papater-en ato tmaeu 'ug tou Souka makka si-deia*" (Formulir Tentang Agama Kristen, dengan penjelasannya dalam bahasa Belanda–Formosa), yang diterbitkan oleh Michiel Har-

togh (Amsterdam, 1662, 290 halaman).³⁵ Pada sekolah Seminarie Malabar di Nalloer, Distrik Jaffnapatnan di Srilangka. digunakan buku "*Eerste Beginselen van dan Christelijke godsdi-ent*", karangan Joh. d'Outrein.³⁶ Selama periode antara tahun 1612, yaitu ketika buku "*Spiegel*"; karangan Ruyll diterbitkan dan sampai permulaan abad ke-19, belum diketemukan bukti bahwa untuk daerah-daerah di Kepulauan Indonesia sudah pernah diterbitkan satu buku pelajaran yang khusus digunakan untuk pengajaran bahasa Belanda. Dalam abad ke-17 untuk pengajaran bahasa Belanda memang pernah dipakai beberapa pelajaran yang diterbitkan di Batavia pada tahun 1671. Misalnya, buku "*Zeede-Sangen*": *Voor de Batavische Jonkheyt; Behelsende verscheijden bedenkelijke en stichtelijke stoffen; Op bekende en vermakelyke Sangtoononen gepast*, karangan Jacob J. Steendam. Selanjutnya buku, "*Eenige voorname eigenschappen van de ware deugdt, voorsichtigheijdt en volmaecktheijdt*", yang diambil alih dari buku pelajaran Conconfius, dan disusun dalam bentuk syair oleh Pieter van Hoorn. Kadangkala dipakai buku-buku tentang pelajaran bahasa dan membaca dalam bahasa Belanda yang dipakai di sekolah-sekolah di Negeri Belanda. Bagaimana pada masa itu terjalin hubungan yang erat antara pendidikan dan penyebaran agama Kristen dapat dilihat antara lain pada pengumuman yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Anthony van Diemen (1633 -- 1645) tentang "*Kerk-ordening voor de Batavische gemeente*" (Keten-tuan-Gereja bagi masyarakat Kota Betawi) Di dalamnya dimasukkan "*School-reglement*" (Peraturan tentang sekolah) tahun 1645, yaitu pasal 75, yang antara lain berbunyi, "*Het ambt vande school-meesters in vooreest de jonge jeucht de vreesse des Heeren in the scherpen, haer t' onderwijsen inde fundamenten vande christelijke religie, haer te leeren bidden, singen, met haer te kerck te gaen, te catecheseeren; ten andern haer te leeren haere ouders, overheeder ende meesters te gehoorsaemen; ten derden haer te leeren lesen, schrijven ende cijfferen; ten vierden haer te leeren alderleij goede seeden ende manieren ende eijndelijck te betrachten dat inde schoolen geen andere, als de Nederlantse taele gebruyckt werde*" (Tugas para guru, pertama mem-

perkuat rasa takut kaum remaja terhadap Yang Mahakuasa, mendidik mereka tentang dasar-dasar agama Kristen, mengajar mereka bersembahyang, menyanyi dan dengan mereka pergi ke gereja, untuk membaca kitab *Catechismus*; kedua mengajar mereka mematuhi orangtua sendiri, para penguasa dan guru; ketiga mengajar mereka membaca, menulis dan berhitung; dan keempat mengajar mereka bermacam-macam tata krama dan sopan-santun yang baik, dan akhirnya mengusahakan agar di sekolah-sekolah hanya dipakai bahasa Belanda.³⁷

Demikian pentingnya peranan pendidikan bahasa Belanda sebagai bahasa asing dalam sejarah pendidikan di Indonesia, sehingga bab I ini perlu meneruskan tulisan tentang itu melampaui abad ke-18. Dari sumber-sumber yang ada memang terbukti bahwa dengan semakin dikembangkannya sistem pendidikan Belanda, terutama sejak pertengahan abad ke-19, pengadaaan alat-alat pengajaran bahasa Belanda semakin disempurnakan dan ditingkatkan, terutama untuk keperluan sekolah-sekolah Pemerintah Hindia-Belanda. Pendidikan tersebut lebih banyak diarahkan kepada kelompok penduduk keturunan orang-orang Eropa. Yang dimaksud dengan kelompok penduduk ini adalah (1) mereka yang disebut kelompok "*De Trekkers*", yaitu orang-orang Eropa yang untuk sementara menetap di Hindia-Belanda, yang dilahirkan dan hidup di sini. Kelompok penduduk keturunan Eropa ini sebagian berasal dari orang-orang Belanda dan yang lain dari orang-orang non-Belanda. Sesungguhnya masa VOC, yaitu sejak permulaan abad ke-19, jumlah kelompok dari orang-orang Belanda meningkat terus. Pengertian orang-orang Eropa ini dikaitkan dengan suatu pengertian yuridis, ialah bahwa dalam kelompok ini termasuk orang yang secara hukum mendapat pengakuan sebagai orang-orang Eropa. Dalam abad ke-19 dinyatakan bahwa setiap perempuan yang kawin dengan orang-orang Belanda termasuk ke dalam kelompok ini; demikian pula anak-anak yang diakui oleh bapak mereka. Pada tahun 1856 di Pulau Jawa berdiam 20.000 orang Eropa, terdiri atas orang-orang Belanda dan orang-orang keturunan Eropa, yaitu orang-orang Indo-Eropa.³⁹ Dalam abad ke-20 ke dalam kelompok ini dimasukkan pula orang-

orang Jepang, Filipina, Muangthai dan Mesir yang menetap di Hindia-Belanda, atas dasar pertimbangan politik. Menurut cacah jiwa tahun 1930 jumlah mereka berjumlah 240.000 orang, dan kira-kira dua per tiga di antaranya adalah kelompok Indo-Eropa.

Berdasarkan sumber-sumber di atas ternyata bahwa pada pertengahan abad ke-19 itu sebagian besar anak-anak yang memasuki sekolah-sekolah pemerintah Hindia-Belanda, termasuk anak-anak penduduk keturunan orang-orang Eropa, kurang sekali menguasai bahasa Belanda. Pada saat itu ternyata bahwa 40 % dari anak-anak kelompok di atas yang diterima di sekolah-sekolah tidak menguasai bahasa tersebut, dan 30% hanya menguasai sedikit sekali.⁴⁰ Pada akhir abad ke-19 ternyata pula bahwa anak-anak keturunan golongan bumiputera dan orang-orang Cina baru sedikit sekali yang berkesempatan untuk belajar bahasa Belanda, di antaranya melalui apa yang dinamakan *Europeesche Lagere School* (ELS). Dalam tahun 1900 tercatat bahwa hanya 3.000 anak-anak keturunan golongan bumiputera dan orang-orang Cina yang berkesempatan belajar bahasa Belanda, di antaranya 28 juta penduduk Hindia-Belanda. Ijazah yang dikeluarkan antara tahun 1900—1904 hanya 143 kelompok Cina.

Bahasa Belanda pada abad ke-19 tersebut diajarkan di ELS. Walaupun sebagian besar murid-muridnya di rumah menggunakan bahasa lain sebagai bahasa sehari-hari, termasuk anak-anak keturunan orang Eropa, di sekolah-sekolah tersebut mereka harus menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan, termasuk dalam proses belajar-mengajar. Untuk itu sejak tahun 1829 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu seruan untuk menyusun buku-buku pelajaran bagi keperluan murid-murid tersebut. Pada tahun 1839 Komisi Pusat Pengajaran Hindia Belanda mengajukan kembali penawaran kepada umum tentang penyusunan buku-buku bacaan, yang disesuaikan dengan "Model Prinsen" tetapi dengan penampilan-penampilan dan gambar-gambar yang disesuaikan dengan objek-objek yang terdapat di negeri ini.⁴¹ Model di atas pernah disarankan melalui sebuah tulisan oleh seorang bekas kepala sekolah, yaitu AC.

Oudemans, ialah agar di Hindia Belanda diberlakukan "Sistem Prinsen". P.J. Prinsen (1777 -- 1854) telah memperkenalkan suatu metode membaca yang baru, dalam mana metode yang ejaan yang lama digantikan oleh suatu metode bunyi/suara. Metode tersebut diperkenalkan melalui bukunya yang berjudul *Leerwyse Om Kinderen te leeren lezen* (Cara belajar untuk mengajar anak membaca). Terbitan pertama pada tahun 1817, sedangkan cetakan keduabelas tahun 1878. Pertama-tama para murid dengan bantuan gambar-gambar diajarkan mengucapkan huruf-huruf hidup (buku pelajaran membaca I) dan sesudah itu dihubungkan dengan huruf-huruf mati (buku pelajaran membaca II). Secara rinci mulai dilatih mempraktekkan bermacam sambungan huruf-huruf. Pertama dengan bagian-bagian dari kata-kata, misalnya saya, datang, nanti, malam. Selanjutnya dengan suatu kalimat yang lengkap yang mempunyai arti, misalnya saya datang nanti malam (buku pelajaran membaca IX). Metode Prinsen yang semenjak permulaan abad ke-19 secara umum mendapat pengakuan dan secara umum resmi diajarkan sebagai metode membaca di Negeri Belanda, kemudian setelah disesuaikan dengan keadaan di Hindia Belanda diajarkan di sekolah di sini, dalam *Verindische Vorm, Nr. 65, 91, 97, 98*.

Pada akhir abad ke-19 Metode Prinsen ini mulai didesak oleh Metode Bouman. H. Bouman (1822--1899) memperkenalkan suatu metode bunyi yang lebih banyak didasarkan pada pengamatan, yang dinamakan "cara belajar membaca melalui pengamatan". Dengan mengamati suatu benda murid mampu membentuk suatu gambaran, yang kemudian diartikan kepada namanya, yang melalui bunyi-bunyi kata yang tunggal kemudian dipecah-pecah dan diungkapkan ke dalam kata yang dapat diamati, yang terdiri atas huruf-huruf.⁴² Pertanggungjawaban tentang metode ini dikemukakan Bouman dalam bukunya yang berjudul *Handleiding bij het aanschouwelijk lees onderwijs* (Pedoman tentang pelajaran membaca melalui pengamatan, 1867). Pada akhir abad ke-19 Metode Bouman resmi diajarkan di sekolah-sekolah Pemerintah Hindia Belanda melalui buku-buku penjabarannya, Nr. 72, 113. Keterangan lebih lanjut

tentang Prinsen dapat dibaca dalam buku karangan Boekholt dan De Booy serta karangan Zersike,⁴³ sedangkan tentang Bouman dalam buku karangan Zernike.⁴⁴ Sebelum berlakunya Metode Prinsen dan Metode Bouman, pernah dipakai buku-buku pelajaran yang disusun oleh H.A. Brand, yang selama tahun 1818--1838 menjadi guru di Semarang.⁴⁵ Buku-buku karangan Brand tersebut kemudian ternyata tidak diketemukan lagi.

Untuk membantu pengadaan dan penyempurnaan alat-alat pelajaran tersebut turut pula berperan sebuah perkumpulan guru, yaitu *Nederlandsch Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG) yang hanya dapat bertahan selama tahun 1851--1857. Dalam tahun 1894 NIOG didirikan kembali sebagai cabang organisasi persatuan guru di Negeri Belanda, yang bernama *Nederlandsch Onderwijzers Genootschap* (NOG), yang merupakan pelopor dari Serikat Sekerja Pegawai Pendidikan di Negeri Belanda yang sekarang, yang bernama *Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel* (ABOP). NIOG ini sangat berperan dalam mengembangkan alat-alat pelajaran selama abad permulaan abad ke-20. NIOG tahun 1851--1857 sempat menerbitkan majalah *Indischschoolblad ter bevordering van opvoeding en onderwijs* (majalah Sekolah Hindia Belanda untuk memajukan pendidikan dan pengajaran), selama tahun 1853--1857.⁴⁶ Perkumpulan ini juga mengambil inisiatif untuk memperbaiki buku-buku pelajaran membaca karangan AC. Oudemans tahun 1848 (M.98), yang kemudian disatukan ke dalam penerbitan 9 buku pelajaran membaca karangan PJ Prinsen untuk keperluan sekolah-sekolah di Hindia Belanda (1853--1855), beserta *Oefeningen overeenkomstig de negen leestafels* (Latihan-latihan sesuai dengan sembilan buku pelajaran membaca) pada tahun 1857--1858 (M. 91 dan 97).⁴⁷ NIOG kedua (1894--1957) juga menerbitkan majalah, yaitu *Het Onderwijs, weekblad gewijd aan de belangen van opvoeding en onderwijs in Nederlandsch-Indie* (Pengajaran, majalah sepekan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda). 1894--1910 dan majalah *De School van Nederlandsch-Indie* (Sekolah di Hindia Belan-

da), 1910--1942.⁴⁸ Sebagaimana telah dikemukakan di atas tentang keadaan penawaran untuk penyusunan buku-buku pelajaran membaca (1839), ternyata penawaran tersebut dime-mangkan oleh AC. Oedemans melalui bukunya *Leefels ten di-enste der scholen in Nederlands Indie* (Buku-buku pelajaran membaca untuk keperluan sekolah-sekolah di Hindia Belanda) tahun 1939. Mengapa buku-buku tersebut baru diterbitkan pada tahun 1848 tidak begitu jelas; yang pasti bahwa buku-buku pe-lajaran membaca berdasarkan metode DC. de Bruin, yang ber-judul *Eerste lees oefeningen overeenkomstig der Leerwijze van P.J. Prinsen ten gebruike der scholen in Nederlandsch-Indie* (Latihan-latihan membaca sesuai dengan cara belajar P.J. Prin-sen untuk keperluan sekolah-sekolah di Hindia Belanda), tahun 1845, M. 65 yang lebih banyak dipakai sampai tahun 1880. Dalam buku kenang-kenangan de Bruin mengungkapkan pertentangan antara dia sebagai wakil kepala sekolah dengan AC. Oudemans sebagai kepala sekolah, yang berakhir dengan pem-berhentian Oudemans (1840). Selanjutnya dikemukakannya bahwa kemenangan Oudemans atas penawaran di atas sebenar-nya kurang tepat.⁴⁹

Tentang penyesuaian metode belajar bahasa yang dipakai di Negeri Belanda dan seharusnya disesuaikan kembali dengan ke-butuhan sekolah-sekolah di Hindia Belanda, de Bruin mengemu-kakan pendapatnya secara sangat tepat. Kira-kira terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Anak mulai belajar melalui pengamatan. Jika kita ingin berhasil dalam meng-embangkan kemampuan-kemampuan intelektual mereka, maka untuk pelajaran yang pertama sebaiknya kita memilih objek-objek yang setiap hari dapat mereka lihat dan amati, te-tapi apakah buku-buku pelajaran yang dipakai di Negeri Belan-da, yang kemudian kita gunakan di Hindia Belanda, cocok un-tuk itu? Buku-buku tersebut dengan sengaja disusun untuk ke-perluan belajar anak-anak di Negeri Belanda. Sebagian besar isinya berkaitan dengan objek-objek, yang bagian anak-anak di Hindia Belanda sangat asing dan bahkan sering berada di luar jangkauan indera mereka. Misalnya, mereka membaca tentang

buah anggur dan apel; tentang 4 musim, es dan salju, tentang tungku pemanasan dalam rumah, tentang bermain ski di atas es, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, menurut pendapat saya, tentu juga kurang manfaatnya dan tidak sesuai apabila anak-anak di Negeri Belanda yang sedang belajar tentang huruf-huruf dan bunyi-bunyi, yang mereka dengar adalah tentang pisang, pohon kelapa, padi, kerbau, sawah, musim kemarau serta musim penghujan, dan sebagainya.⁵⁰

Dengan begitu maka berkembang selanjutnya suatu macam sejarah pendidikan di Indonesia, yaitu tentang metode-metode Belanda untuk mengalfabetisasi murid-murid ke dalam bahasa Belanda, yang diolah dan dikerjakan untuk kepentingan pendidikan di Hindia Belanda. Segalanya "di-Indisch-kan"; dengan kata lain bahwa "isi" tetap bersifat Belanda, sedangkan "kulit" bercorak Hindia Belanda. Cerita-cerita dicocokkan dengan situasi lingkungan "Indisch" (terutama yang bercorak Eropa-Indisch); nama-nama disesuaikan, gambaran tentang kehidupan dicocokkan, dan sebagainya dimasukkan ke dalam perbendaharaan bahasa. Kesemuanya ini adalah menurut keinginan dan kepentingan para penyusun buku pelajaran; sesudah tahun 1900 menurut selera dan kepentingan orang-orang dan golongan-golongan yang berkuasa.⁵¹ Di samping metode-metode Belanda yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah-sekolah di Hindia Belanda, juga dikembangkan metode-metode yang sudah berjalan selama ini di sini.

Dilihat dari pengembangan sistem pengajaran selama akhir abad ke-19, ternyata bahwa pengembangan pengadaan buku buku tentang pelajaran Bahasa Belanda di Hindia Belanda juga sangat meningkat; dan kini karena semakin berkembangnya sektor penerbitan dan percetakan. Sejak tahun 1845 sampai akhir abad ke-19 pada penerbit di negeri Belanda telah berhasil dan menerbitkan ± 80 buku-buku pelajaran bahasa dan kira-kira 140 buku-buku pelajaran membaca, yang sebagian besar juga dicetak di Hindia-Belanda. Sejumlah besar buku-buku tersebut ternyata disimpan di lembaga "*Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*" (1778--1949) dan sekarang berada

di Perpustakaan Nasional Jakarta. Perpustakaan ini ternyata memiliki suatu kumpulan yang unik (khas) tentang buku-buku pelajaran yang dipakai di sekolah-sekolah pada zaman Hindia-Belanda. Misalnya, Kees Groeneboer menulis bahwa dari sejumlah buku-buku pelajaran yang diterbitkan sebelum tahun 1900, maka 35 % berada di Perpustakaan Nasional, hanya 24 % berada pada beberapa perpustakaan di Negeri Belanda, sedangkan selebihnya sudah dianggap hilang. Penetapan prosentase di atas berdasarkan atas perhitungan judul kelompok-kelompok buku secara terpisah-pisah, kurang lebih adalah sebagai berikut :

- (1) Buku-buku pelajaran bahasa dari tahun sebelum 1900 (83 bagian) : 56% berada di Jakarta; 21 % di Negeri Belanda; 23% belum dapat diketemukan.
- (2) Buku-buku pelajaran membaca dari tahun sebelum 1900 (161 bagian) : 50 % berada di Jakarta ; 25 % di Negeri Belanda; 25 % belum dapat diketemukan.
- (3) Buku-buku pelajaran bahasa dari tahun sesudah 1900 : untuk sekolah dasar dan menengah (349 bagian) : 25% berada di Jakarta; 31 % di Negeri Belanda; 44 % belum dapat diketemukan.
- (4) Buku-buku pelajaran membaca dari tahun sesudah 1900 : untuk sekolah dasar dan menengah (362 bagian) : 22% berada di Jakarta 31% di Negeri Belanda; 47% belum dapat diketemukan.

Ini berarti dari 955 bagian buku-buku pelajaran bahasa bagi murid-murid yang berasal dari kelompok penduduk bumiputera semakin ditingkatkan, dengan semakin banyaknya mereka memasuki sekolah-sekolah sistem pendidikan Belanda. Misalnya, dalam tahun 1833 diterbitkan buku pelajaran yang berjudul, '*Vragen Voor Kinderen in that Hollandsch en het Malleisch*' (Pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu), No. 51. Dalam tahun 1866 menyusul penerbitan buku yang berjudul *Handleiding tot het aanleeren van de Hollandsch taal voor de Inlandsche Bevolking van den Indischen Archipel* (Pedoman untuk mempelajari bahasa Belanda bagi penduduk Bumiputera di Kepulauan Hindia), No. 20.

Buku ini diterbitkan sebagai hasil dikeluarkannya keputusan Pemerintah (*Regeeringsbesluit*), 24 Juni 1864, No. 10, untuk menyediakan hadiah bagi "penyusunan buku-buku, yang cocok bagi kemudahan mempelajari bahasa Belanda untuk anak-anak bumiputra." Keputusan pemerintah di atas mendapat tanggapan dari berbagai kalangan pendidikan, di antaranya dari A. Van Ekris, seorang guru di sekolah gereja di Kamarian (Pulau Seram, Maluku), yang menawarkan buku pelajaran yang disusunnya sendiri yang berjudul *Begin eener Nederdutch Spraakkunst Vor Inlander, Meer Bepaald Voor de Inwoner der Molukken* (Pengajaran Pertama Bahasa Belanda, lebih diperuntukkan bagi penduduk Kepulauan Maluku). Atas permintaan pemerintah buku ini kemudian dikaji oleh lembaga *Bataviaasch Genootschap*, yang ternyata kurang dapat menyetujuinya berdasarkan antara lain karena terlalu teoritis, kurang praktis, terlalu panjang dan ditulis secara ilmiah; tegasnya terlalu sulit, namun ada beberapa hal yang dianjurkan agar dapat diterima.⁵² Walaupun buku-buku terbitan permulaan abad ke-19 tersebut kurang mencapai sasarannya, akan tetapi peranan bahasa Belanda dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda justru semakin meningkat dengan berdirinya *Inlandsch School der Eerste Klasse tahun 1892*, *Hollandsch Chineesche Scholl* (HCS) tahun 1914. Semenjak itu pengadaan buku-buku pelajaran tentang bahasa dan membaca untuk jenis sekolah-sekolah di atas semakin ditingkatkan; buku-buku yang dipakai di FLS, ternyata ada juga digunakan, seperti buku karangan Croes yang berjudul *Mijn Hollandsch Boek*. Untuk pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa asing di *Inlandche School der Tweede Klasse* dipakai buku-buku pengajaran bahasa Nr 203, 197, 176—179. Sejak tahun 1920an semakin dipertegas adanya perbedaan antara pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa asing dan pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar atau seringkali disebut sebagai bahasa nomor dua di sekolah-sekolah. Perbedaan tersebut disusun secara teoritis oleh Nieuwenhuis (1925, 1930) dan menghasilkan beberapa buku pelajaran tentang bahasa Belanda yang banyak dipakai di HIS dan HCS, yaitu metode pengajaran bahasa Nr, 195—196, 187—189, 149—151; serta metode peng-

ajaran membaca Nr. 242, 240, 238–239, 253, 269–276. Khusus untuk HCS digunakan metode pengajaran membaca Nr. 270.⁵³ Selanjutnya diterbitkan pula buku-buku pelajaran yang khusus diperuntukkan bagi sekolah-sekolah Kristen Protestan, yaitu buku-buku pelajaran membaca Nr. 238, 218, 223, 245; dan bagi sekolah-sekolah Katolik, yaitu buku-buku metode pengajaran menulis Nr. 180 metode pengajaran membaca Nr. 283, 284, 257, 215. Perlu diingat bahwa sejak permulaan abad ke-20 *Departement van onderwijs en Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Agama), Pemerintah Hindia Belanda, melakukan pengaturan ketat tentang pemakaian buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah, khususnya yang ditangani dari pemerintah. Sebenarnya pengaturan tersebut sudah dilakukan sejak permulaan abad ke-17, karena sejak itu seluruh buku-buku pelajaran dicetak dan diterbitkan di Negeri Belanda, sedangkan Dewan Gereja (*Kerkeraad*) di Batavia berfungsi sebagai semacam depot (gudang) pusat bagi segala macam alat pengajaran bagi seluruh Hindia Belanda, termasuk pengaturan distribusinya ke Kepulauan Maluku dan bahkan ke Formosa.⁵⁴ Dalam tahun 1829 oleh Komisi Pusat Pengajaran di *Weltevreden* Batavia Centrum didirikan *Schoolboeken-Fonds* (Badan Dana Buku-buku Sekolah), dengan tugas melakukan distribusi alat pengajaran untuk sekolah-sekolah pemerintah. Melalui Surat Keputusan Pemerintah (*Regeerings-besluit*) tanggal 10 November 1850 tugas di atas dialihkan kepada seorang pedagang buku, W.J. Van Haren Norman; pada 23 Maret 1863 tugas diserahkan kepada beberapa pengusaha lainnya. Akhirnya pada tahun 1878 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Depot Alat-alat Pengajaran di Batavia, yang sampai masa Perang Dunia II (1941) mengurus pengadaan serta pendistribusian buku-buku pelajaran dan alat-alat pengajaran lainnya.⁵⁵

Dengan didirikannya berbagai bentuk sekolah lanjutan, di samping sudah terlebih dahulu berdirinya sekolah-sekolah menengah seperti *Lyces* dan *Hoogeere Burger School* (HBS), dan *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO) dalam tahun 1918, maka pengadaan alat-alat pengajaran untuk sekolah-sekolah tersebut turut meningkat. Walaupun jumlah sekolah-sekolah

menengah jauh lebih kecil dari pada jumlah sekolah-sekolah dasar, sedangkan alat-alat pengajarannya semula seluruhnya di datangkan dari Negeri Belanda, akan tetapi sejak tahun 1930an alat-alat pengajaran itu diadakan sendiri di Hindia Belanda. Misalnya, untuk MULO buku-buku pengajaran bahasa Nr. 293, 326, 318; buku-buku pelajaran bahasa nr. 351, 344; untuk AMS: buku-buku pelajaran bahasa nr. 357, 350, 364; untuk *Ambacht-Onderwijs* : nr. 289, 322; untuk *Handels-School*: nr. 332, 343, 349; dan untuk *vakschoolen* : nr. 365, 337, 338, 356, 361.

Antara tahun 1900—1950 perlu disebabkan pula berbagai metode pengajaran, yang ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan pelajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah. Selama kuartal pertama abad tersebut kegiatan pengajaran sangat didominasi oleh metode "*Mijn Hollansch Boek*" karangan J.W. Coes, yang telah menjadi pilihan Pemerintah Hindia Belanda. Metode pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa ibu digunakan baik di ELS maupun di HCS dan HIS, di mana bahasa tersebut berfungsi sebagai bahasa pengantar (nr. 152—156, 213). Salah satu buku pelajaran yang secara eksplisif diperuntukkan bagi pelajaran bahasa Belanda bagi anak-anak golongan bumiputra adalah buku pelajaran *De Nederlandsch Tall; Volledige taal-cursus ten behoeve van der Inlander* (Bahasa Belanda; kursus bahasa yang lengkap untuk keperluan anak-anak bumiputra), karangan B.J. Visscher dan Th. J.A Hilgers (nr. 203—206). Hilgers membedakan antara mengajar anak-anak "Indisch", yaitu anak-anak keturunan orang-orang Eropa, dan mengajar anak-anak "*Inlandsch*" (bumiputra), melalui dua macam metode membaca, tetapi tidak membedakan antara pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa ibu dan sebagai bahasa asing, buku-buku metode membaca karangan Hilgers antara lain adalah *Onze Vriendjes* (teman-teman kita); *Leesboek voor de Indische Scholen* (buku bacaan untuk sekolah-sekolah Hindia Belanda)", nr. 227, 229, serta pengolahannya, yaitu *Een Vriendenkring* (Sekelompok teman); *Hollansch Leesboek Voor de Inlandsche Scholen* (Buku-buku bacaan bahasa Belanda untuk sekolah-sekolah Bumiputera), nr. 230—231, yang berbedanya dua lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Metode Croes

tersebut pada tahun 1926 diganti oleh Komisi Katalogus dari *Department Van Onderwijs en Eeredienst* dengan metode Nieuwenhuis, yang bertahan sampai pecahnya Perang Dunia II.

Dengan mulai berlakunya metode Nieuwenhuis, maka mulai diadakan perbedaan yang mendasar antara pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa ibu, bahasa Belanda sebagai bahasa asing dan pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Perbedaan tersebut kemudian diolah dan diungkapkan oleh Nieuwenhuis beserta beberapa temans dalam tiga metode pengajaran bahasa, yaitu :

- (1) "*Nieus taal onderwijs; Een methode voor het lager onderwijs in Indie* (Pengajaran baru tentang bahasa; suatu metode untuk Sekolah Dasar di Hindia Belanda)", karangan W.P. Jonkmans dan G.J. Nieuwenhuis; *Methode Nederlandsch als Moedertaal voor de RLS.* (Metode Pengajaran Bahasa Belanda sebagai Bahasa Ibu; untuk ELS.), nr. 167--172, 185.
- (2) "*Dajalan ke Barat (Weg tot het westen); Nederlandsch taal cursus voor Maleisch-sprekenden* (kursus bahasa Belanda untuk yang berbahasa Melayu), karangan HP. van der Laak, M. Sjafei dan GJ. Nieuwenhuis; *methode Nederlands als vieemde taal* (metode pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa asing), yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah lanjutan kelompok bumiputra dan bermacam-macam kursus bahasa. Metode ini semula juga digunakan di HIS (nr. 176, 179). Edisi-edisi tersendiri kemudian diterbitkan untuk mereka yang berbahasa Jawa dan berbahasa Sunda (nr. 177, 178).
- (3) *Nederlandsch taalboek* (Buku pelajaran bahasa Belanda), karangan G.J. Nieuwenhuis dan H.P. van der Laak; *Methode Nederlandsch als vieemde voertaal* (Metode pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa pengantar)", yang diperuntukkan bagi HIS dan HCS di mana bahasa Belanda semula diajarkan sebagai bahasa asing, akan tetapi pada akhir pelajaran menyatu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa Ibu (nr. 187--189)..

Departemen *van Onderwijs en eeredienst* di Batavia pada tahun 1926 mewajibkan metode Nieuwenhuis ini bagi seluruh sekolah yang bersubsidi, sehingga selama lima belas tahun mendominasi sistem pengajaran bahasa. Secara kuantitatif metode ini sangat berperan dalam pengajaran bahasa Belanda di Hindia Belanda, yaitu bahwa selama periode antara tahun 1926 sampai tahun 1942 metode ini telah berhasil mengajarkan bahasa Belanda kepada ratusan ribu orang pribumi. Selama periode di atas badan penerbit Wolters telah berhasil menjual kurang-lebih 60.000 eksemplar buku *Nieuw Taal Onderwijs* karangan Jonkmans & Nieuwenhuis, bahkan selama periode 1946-1951 telah terjual kurang lebih 15.000 eksemplar. Metode ini semula diperuntukkan bagi ELS, yang selama tahun 1915-1940 mempunyai murid-murid dari golongan bumiputera dan Cina sebanyak kurang lebih 15%.^{5 6}

Sampai tahun 1942 telah terjual sebanyak 64.000 eksemplar buku *Djalan ke Barat*, karangan Van der Laak, M. Sjafei dan Nieuwenhuis selama periode 1946-1951 sebanyak 7.000 eksemplar. Sampai tahun 1942 telah terjual kurang lebih 12.000 eksemplar buku *Nederlandsch taalboek*, karangan Nieuwenhuis dan Van der Laak selama periode 1946-1951 sebanyak 2.000 eksemplar. Kalaulah diperkirakan bahwa buku-buku tersebut dipakai minimal tiga tahun pelajaran, dan berdasarkan arsip Penerbit Woltersnoordhoff di Groningen, maka dapat disimpulkan bahwa metode Nieuwenhuis minimal telah mengajarkan bahasa Belanda kepada kurang-lebih 250.000 orang bumiputera, sampai tahun 1951 jumlah tersebut meningkat menjadi kurang-lebih 300.000 orang.^{5 7}

Yang tidak kalah pentingnya adalah gerakan *Rationeel Taalonderwijs*, yang dipimpin oleh JFHA. de la Court pada akhir tahun 1930an. Berdasarkan suatu frekuensi penelitian yang disusun secara besar-besaran tentang kata-kata dan kombinasi-kombinasi kata yang paling banyak muncul dalam bahasa Belanda (1937), maka disusunlah metode pengajaran bahasa melalui buku *Een nieuwe wereld* (Suatu dunia baru), karangan JFHA. de la Court dan M Rasjid (Nr. 149-151, 219-220),

Buku ini ternyata sangat berperan dalam pengajaran bahasa Belanda di Indonesia. Selama periode sampai tahun 1942 Penerbit Wolters telah menjual kurang-lebih 14.000 eksemplar buku "*Een nieuwe wereld*", karangan de la Court; selama periode 1946-1951 sebanyak 182.000 eksemplar; belum termasuk buku yang dicetak di sekitar tahun 1944 di Melbourne (Australia). Dapat diperkirakan bahwa dengan memakai metode ini sebanyak 600.000 orang Indonesia telah dapat mempelajari bahasa Belanda. Tentang pembaharuan metode pengajaran bahasa Belanda selama tahun 1920an, melalui metode *Nieuw Taalonderwijs*, karangan de la Court, dibahas cukup rinci antara lain oleh Boukema dan Vander ree,^{5,8} dan oleh Groeneboer.^{5,9}

Tujuan pendidikan orang-orang Belanda, seperti yang diungkapkan di atas, adalah sejalan dengan kebijaksanaan politik dan usaha mereka untuk melestarikan kekuasaannya di Nusantara, sehingga isi dan proses pihak-pihak yang terlibat di dalamnya disesuaikan dengan itu, di antaranya melalui pengajaran bahasa Belanda. Prof. Dr. Slamet Imam Santoso, seorang pemerhati tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia, memperingatkan betapa pentingnya peranan bahasa dalam pendidikan.^{6,0} Diungkapkannya bahwa pendidikan bahasa pada zaman Belanda terutama ditekankan pada:

- (1) Menulis dan mengucapkan kata demi kata harus jelas. Siapa yang menulis dan mengucapkannya kurang jelas dihukum dengan disuruh mengulangi sampai lima belas kali.
- (2) Secara teratur diberikan kira-kira sepuluh perkataan untuk dicarikan artinya dengan mempergunakan kamus kecil yang berjudul *De Kleine Koenen* diberikan setelah murid duduk di kelas V HIS dan dapat berbicara cukup jelas dalam bahasa Belanda. Semua kata yang dicari artinya itu ditulis, kemudian dibaca dan diperiksa. Semuanya harus ditulis dengan jelas, karena kejelasan itu perlu supaya orang lain dapat memahaminya dengan mudah. Dalam hal ini terkait "sosialisasi", yang diperlukan dalam kita berhubungan dengan orang lain.

- (3) Setelah mahir menggunakan kamus, mulai dilatih membuat sebanyak mungkin kalimat. Tiap kalimat yang dibuat harus terdiri atas kata-kata tertentu, akan tetapi arti kalimat itu berbeda-beda. Langkah pertama dalam menggunakan kamus itu adalah merupakan usaha untuk mencari semua arti dari sebuah kata, yang merupakan bagian dari kegiatan "Analisis semantik", yang merupakan latihan untuk menggunakan suatu kata dalam konteks yang berbeda-beda.
- (4) Pada tingkat MULO maka selama tiga tahun murid dilatih membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan sedikit mungkin kata, akan tetapi lengkap dengan semua tanda baca.

Semua kalimat diusahakan singkat, jelas, tepat dan mempunyai hanya satu arti. Kalimat harus bersifat kategoris dan unit-vokal, untuk membuat konsep-konsep dalam bidang ilmu pengetahuan, serta premis-premis untuk logika. Kurang baik dalam menulis, mengucapkan kata-kata, gaya membaca, terlalu banyak menggunakan kata-kata atau tidak lengkap menggunakan tanda baca, diperhitungkan dalam menetapkan nilai kelas untuk nilai akhir. Bahkan untuk setiap mata pelajaran soal bahasa tetap diperhatikan oleh setiap guru, tegasnya bahwa bukan hanya guru bahasa saja yang mengawasi penggunaan bahasa.

Bersamaan dengan peningkatan pengajaran bahasa Belanda sebagai bahasa asing, bahasa ibu dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah, juga sistem sekolah semakin disebarluaskan ke berbagai daerah. VOC semula membatasi usaha di atas pada bekas daerah-daerah kekuasaan orang-orang Portugis dan Spanyol, khususnya di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan keadaan di Jawa, Sulawesi Selatan dan Sumatera, di mana VOC tidak mengadakan kontak langsung dengan penduduk pribumi, akan tetapi melalui para raja, sultan dan penguasa lokal, sistem pendidikan Belanda kurang berkembang di sana kecuali di tempat-tempat kedudukannya, seperti di kota-kota pelabuhan dan benteng-benteng basis kekuatan mereka.⁶¹

Selama periode antara keruntuhan VOC dan kembalinya orang-orang Belanda, baik gereja di Ambon maupun sekolah-sekolah yang dimilikinya hampir tidak mendapat perhatian sama sekali. Setelah orang-orang Inggris mengembalikan Kepulauan Amboina kepada orang-orang Belanda, tugas gereja di sana dilanjutkan oleh *Nederlandsch Zendeling Genootschap* (Perkumpulan Misionari Belanda), yang dipimpin oleh Joseph Kam, dengan bentuk organisasi dan pola prosedur kerja seperti yang telah dipraktekkan semasa VOC.⁶² Sejak tahun 1960an prioritas yang diberikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda kepada pendidikan mulai bergeser. Yang dibutuhkan ialah pemberian suatu orientasi yang praktis kepada pendidikan rakyat (*volksonderwijs*) di Kepulauan Maluku, seperti yang termuat dalam Anjuran Sekretaris Pemerintah, 21 April 1863.⁶³ Dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Belanda di Nusantara dan semakin meningkatnya keterlibatan pemerintah-pemerintah dalam masyarakat Indonesia, para penguasa kolonial mulai mencari orang-orang yang melek-huruf dasar serta mempunyai keterampilan berhitung, ditambah dengan suatu pengertian tentang bahasa Belanda, untuk mengisi jabatan-jabatan rendah dan menengah dalam birokrasi. Pada tahun 1864 mulai diadakan ujian dinas untuk pegawai negeri (*Klein-ambtenaars Examen*) yang membuka kesempatan bagi golongan pribumi memasuki jabatan dalam pemerintahan. Di bawah pimpinan Departemen Pendidikan, Agama dan Industri yang baru didirikan pada tahun 1867, mulai diperluas berbagai fasilitas pendidikan bagi golongan pribumi dan seantero Nusantara. Di Kepulauan Amboina, di mana sudah berkembang suatu sistem persekolahan secara ekstensif di negeri-negeri yang penduduknya sudah memeluk agama Kristen Protestan, kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam pendidikan telah menghasilkan suatu usaha terutama untuk memperbaiki standar pendidikan dari pada untuk memperluasnya. Walaupun Peraturan Pemerintah (*Regeerings reglement*) tahun 1854, artikel 109, menetapkan bahwa hak dan kewajiban kelompok-kelompok penduduk pribumi adalah tergantung pada *land-aard* (nationalitas) tanpa memandang agama yang mereka anut, tetapi nampak-

nya pemerintah tidak berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolahnya di negeri-negeri yang penduduknya menganut agama Islam.

Akan tetapi keberuntungan BNJ. Roskott,⁶⁴ orang yang menggantikan Joseph Kam sebagai pemimpin Perkumpulan Misionari Belanda di Ambon, baik sebagai seorang pendidik maupun prestise sekolah yang dipimpinya, justru merosot dengan adanya perubahan mengenai prioritas-prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Penekanannya pada pengajaran agama tidak mampu mengimbangi daya-tarik nilai-nilai liberal yang diajarkan oleh pendidikan baru para birokrat, sedangkan para lulusan sekolah pendidikan guru yang dikelolanya tidak memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Dalam kaitan ini pemerintah pusat di Batavia pada tahun 1863 meminta pendapat gubernur Kepulauan Maluku tentang pengoperasian sekolah pendidikan guru beserta reformasi-reformasi yang diperlukan untuk menempatkan secara langsung di bawah supervisi pemerintah. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan di sekolah-sekolah yang dimaksud, maka gubernur memberi jawaban yaitu bahwa pemerintah daerah tidak terlibat di dalam pengoperasiannya, sedangkan seluruh sistem pendidikan umum berada di bawah tanggung jawab Perkumpulan Misionari Belanda yang dipimpin oleh Roskott. Selanjutnya dilaporkan bahwa baik standarnya maupun tujuannya tidak dapat memenuhi tuntutan tentang pendidikan umum yang berguna. Pendidikan yang diberikan adalah terlalu terbatas pada masalah-masalah agama untuk dapat digunakan secara praktis. Satu-satunya pemecahan, menurut pendapat gubernur, ialah agar pemerintah mengambil alih kontrol serta tanggung jawab atas pendidikan guru. Suatu sekolah pendidikan guru yang dikelola oleh pemerintah sekaligus akan mampu melayani fungsi mendidik pegawai-pegawai negeri yang baru yang berasal dari kalangan pribumi. Sekolah semacam itu akan cocok untuk mendidik putra-putri dari kalangan elite adat, sesuai dengan Anjuran Gubernur Kepulauan Maluku, tanggal 22 April 1864.⁶⁵ Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Roskott bukan saja berasal dari pihak pemerintah sipil di Ambon, akan tetapi juga dari Perkumpulan

Misionaris Belanda, yang memecatnya pada tahun 1864 atas dasar pertimbangan terhadap perilaku moralnya. Perkumpulan juga menutup sekolah-sekolahnya untuk sementara waktu (Surat Pengurus Besar *Nederlandsch Zendeling Genootschap* di Rotterdam kepada Menteri Jajahan, 16 Agustus 1864.⁶⁶

Usul gubernur Kepulauan Maluku untuk mendirikan sebuah sekolah pendidikan guru ternyata baru dapat dilaksanakan pada tahun 1874, walaupun gubernur jenderal Hindia Belanda sendiri memang mengakui bahwa kebutuhan tentang itu bagi Kepulauan Maluku sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di Nusantara, karena sekolah-sekolah pemerintah di daerah itu lebih besar jumlahnya. Nasib sekolah guru selama sembilan tahun, yaitu antara penutupan sekolah Roskott dan pembukaan sekolah negeri agak kabur. Meskipun demikian para lulusan tahun 1877 ternyata memulai pendidikannya di Tondano (Minahasa), mungkin karena murid-muridnya yang berasal dari Kepulauan Maluku dalam waktu peralihan di atas meneruskan pelajarannya untuk sementara di sana.⁶⁷ Kurikulum disusun dengan berpijak atas suara dasar yang sangat berbeda dengan yang terdapat pada sekolah Roskott. Para murid diajarkan bahasa Belanda, bahasa Melayu, matematika, geografi, sejarah, ilmu alam, pedagogi, menggambar dan musik. Masa belajar berlangsung selama empat tahun, dan pada akhir tahun pelajaran mereka menghadapi ujian secara ekstensif, baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan selama enam hari. Misalnya, untuk ujian sejarah para murid diminta menulis segala sesuatu tentang (1) tiga serangkai dalam sejarah Belanda, yaitu tiga orang komisaris yang mempersiapkan kembalinya raja Belanda sesudah masa pendudukan Perancis dalam tahun 1913, (2) Raja Louis XIV dari Perancis, (3) Johan van Oldenbarnevelt, *the advocate of the states of Holland* tahun 1586-1618; dan (4) Pembagian Kerajaan Mataram dalam tahun 1755. Untuk ujian geografi, topiknya mencakup Residensi Timor dan penjelasan tentang Laut Utara, di sebelah utara Negeri Belanda.⁶⁸ Nampaknya bahasa Melayu digunakan pada tahun-tahun pertama sebagai bahasa pengantar dalam setiap pengajaran, karena sebagian besar murid-murid ketika belajar di sekolah rendah

pemerintah di negeri-negeri mereka masing-masing menggunakan bahasa tersebut. Ujian-ujian lisan yang dilakukan pada akhir tahun ajaran dilakukan dalam bahasa Belanda. Pada tahun-tahun pertama pembukaan sekolah pendidikan guru ini jumlah lulusannya sangat sedikit, lima orang dalam tahun 1877; enam orang dalam tahun 1879, dan sebenarnya agak lebih banyak dalam tahun 1878 walaupun jumlah itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Latar belakang para murid tersebut kurang diketahui kelas tahun 1877 mencakup dua orang putera dara pensiunan guru negeri, seorang putera seorang pencarar (*vaccinator*) dan seorang putera seorang sersan tentara kolonial, sedangkan empat orang dari kelas tahun 1879 berasal dari berbagai negeri di Kepulauan Maluku. Antara tahun 1874–1877 para lulusan sekolah pendidikan guru tersebut semuanya berasal dari *Ambonsche Burgerschool* (Sekolah Warga Ambon).⁶⁹ Melihat kepada sedikitnya jumlah lulusan, maka dampak sekolah yang baru ini atas dasar pengajaran semestinya meningkat secara berangsur-angsur, tetapi walaupun demikian, seperti yang dikemukakan oleh residen Ambon pada tahun 1879, bahwa standar pendidikan pada sekolah guru tersebut dan sekolah-sekolah negeri di mana para murid sekolah guru itu melakukan praktek mengajar ternyata belum mencapai apa-apa yang diinginkan, sedangkan pada sekolah-sekolah yang lain sesudah harus lebih ditingkatkan.⁷⁰

Di samping sekolah-sekolah yang berada di negeri-negeri yang penduduknya menganut agama Kristen-Protestan, berkembang pula selama tahun 1850an dan 1860an sebuah jenis sekolah yang lain, yang diperuntukkan hanya bagi warga Ambon, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Dalam konteks suatu perdebatan umum di kalangan para pejabat pemerintah tentang anak-anak pribumi yang memasuki sekolah-sekolah "Orang-orang Eropa", maka di Ambon pada tahun 1856 didirikanlah sekolah "Eropa" yang kedua, khususnya bagi anak-anak warga Ambon, dengan tidak dibebani bayaran atau pungutan apa pun. Seperti telah diungkapkan di atas bahwa sebagian besar murid-murid sekolah pendidikan guru yang dikelola Roskott merupakan anak-anak

warga Ambon (*Ambonsche Burger*). Kelompok warga Ambon ini semasa VOC memberlakukan sistem monopoli, mendapatkan kebebasan dari kerja-kerja wajib/paksa, seperti kerja rodi dan sebagainya, sehingga mampu dan berkesempatan menggunakan fasilitas-fasilitas pendidikan Belanda yang ada. Sekolah Ambon ini dikepalai oleh seorang guru berkebangsaan Belanda dan didampingi oleh guru-guru bantu orang-orang Ambon.⁷¹ Setelah sembilan tahun pengoperasian sekolah tersebut timbulah berbagai pendapat yang saling berbeda di antara para pejabat Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Kepulauan Maluku menyarankan agar sekolah itu dibubarkan, karena berpendapat bahwa jenis pendidikan ini, di mana pengajaran diberikan dalam bahasa Belanda diberikan kepada anak-anak yang sehari-hari menggunakan bahasa Melayu, sehingga lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Para murid dibekali dengan sebagian pengetahuan tentang bahasa Belanda dan karena menolak pekerjaan tangan/kasar mereka mencari kerja di kantor-kantor, di mana hanya beberapa orang saja yang dapat dipekerjakan sebagai juru tulis (*clerks*) yang selebihnya menjadi lamban, tetapi gubernur menyadari bahwa orang-orang "Burger Ambon" yang angkuh itu akan menolak jika anak-anak mereka dimasukkan ke sekolah-sekolah umum, seperti yang dikemulkannya dalam "Anjuran Gubernur Kepulauan Maluku", 22 April 1864.⁷² Gubernur jenderal Hindia Belanda tidak dapat menerima saran di atas, tetapi meminta agar pertimbangan tentang permasalahan di atas diserahkan kepada Komisi Pusat Pendidikan di Batavia. Untuk itu Inspektur Pendidikan JA. Van Der Chijs, berkunjung ke Ambon dan memeriksa serta menilai sekolah yang bersangkutan secara pribadi. Van Der Chijs menentang usul pembubaran sekolah atas dasar pertimbangan bahwa setelah sembilan tahun pelajaran semestinya tidak mungkin ada masalah tentang pembubarannya; pertamanya apakah ada atau tidak ada pemikiran dahulunya bahwa sekolah tersebut seharusnya tidak diadakan. Pembubarannya dapat juga menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan warga Ambon.⁷³ Perbedaan pendapat tentang itu berjalan terus dan akhirnya pada tahun 1869 secara resmi pemerintah

mengakui keberadaan *Ambonsche Burgerschool*. Sekolah yang serupa kemudian didirikan pula di beberapa tempat di luar Kepulauan Maluku, di mana terdapat sejumlah warga Ambon di antaranya serdadu-serdadu tentara kolonial Belanda, seperti Kotaraja (Banda Aceh yang sekarang). Hasil pengamatan Van Der Chijs semasa itu juga memberikan wawasan atau pengetahuan yang mendalam tentang sikap-sikap warga Ambon terhadap pendidikan Belanda dan dampak pendidikan tersebut atas masyarakat, antara lain sebagai berikut. "Di kalangan para murid yang berasal dari warga Ambon pengetahuan tentang bahasa Belanda lebih berkembang daripada misalnya di kalangan orang-orang Jawa atau orang-orang Melayu. Dalam banyak hal tata krama dan adat kebiasaan orang-orang Belanda menjadi milik mereka. Sementara di Jawa anak pribumi pada umumnya lebih senang bergaul dengan sesamanya daripada dengan orang Belanda dan lebih suka berbicara dalam bahasa Melayu daripada dalam bahasa Belanda, dengan anak-anak justru sebaliknya. Sebanyak mungkin orang-orang Ambon ingin menjadi orang Belanda, dan satu keuntungan bagi mereka bahwa di Ambon terjadi semacam percampurbauran antara orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi.

Memang tidak dapat dinyatakan di mana yang satu dimulai dan yang lain berakhir. Pemisahan antara orang-orang Belanda, anak-anak pribumi dan orang-orang pribumi hampir tidak dijumpai lagi. Walaupun bukan berarti bahwa semua warga Ambon sudah berada pada suatu tingkat peradaban yang cukup baik, akan tetapi mereka tahu bagaimana membaca dan menulis. Beberapa orang di antara mereka sudah berpartisipasi dalam suatu kelompok sastra Barat dan bahkan beberapa orang telah mempelajari dan memahami majalah *Het Regt in Nederlandsch Indie* (Hukum di Hindia Belanda) dan buku-buku statuta (*Het Staatsblad en het Bijblad/Lembaran Negara dan Lampiran*). Salah seorang dari mereka menjadi anggota Badan Peradilan dan seorang sebagai anggota pengurus "Perkumpulan Masyarakat Belanda" (*Nederlandsche Societeit*). Seorang tokoh yang cukup terkenal, yaitu Hoedt, yang diangkat pemerintah untuk melakukan satu koleksi tentang bahan-bahan ilmu alam, adalah

seorang pribumi Ambon. Yang lainnya merupakan perwira-perwira pasukan milisia, ada pula yang telah lulus dalam ujian pegawai rendah (*klein-ambtenaars-examen*). Selama bertahun-tahun apotik di Kota Ambon dikelola oleh seorang pribumi di sana. Pemimpin (kapiten) orang-orang Cina di Ambon, lebih suka berbicara dalam bahasa Belanda.⁷⁴

Pengamatan yang dilakukan oleh Van Der Chijs tentu saja terhadap seluruh orang Ambon, tetapi terhadap sekelompok kecil yang berasal dari komunitas Kristen Protestan, yang merupakan anggota-anggota pertama dari suatu kelas baru dalam masyarakat Ambon, yang berpendidikan Belanda dan menetap di kota-kota. Mereka bersama-sama dengan serdadu-serdadu Ambon yang menganut agama Kristen, kemudian merupakan pemandangan yang terkenal di seluruh Nusantara, yaitu sebagai abdi yang setia dari pemerintah kolonial Belanda. Bagi orang-orang yang tidak kenal dengan masyarakat Kepulauan Ambon, kedua kelompok emigre Ambon ini merupakan contoh tentang orang-orang Ambon pada umumnya dan merupakan pula suatu anggapan umum bahwa rasa pengenalan diri yang lebih dekat dengan serta loyalitas kepada orang-orang Belanda adalah khas masyarakat Ambon secara keseluruhan. Walaupun kelompok baru dari penduduk kota yang berpendidikan Belanda ini merupakan suatu kelompok baru dari penduduk yang penting serta bergengsi menurut pandangan para pejabat kolonial, tetapi di masyarakat Ambon itu sendiri kedudukan mereka kurang diyakini dan tidak begitu terjamin. Di dalam masyarakat Kristen kesempatan untuk mendapatkan pendidikan meluas jauh melewati kaum elit adat dan agama; dan menyediakan suatu kesempatan bagi anak-anak keluarga non-elit untuk mendapatkan prestise dan kekayaan di dalam suatu sistem status yang baru hasil perencanaan pemerintah kolonial, yang diatur menurut prestise di bidang pendidikan dan pekerjaan dan bukan menurut status yang dianggap berasal dari adat. Para anggota kelompok yang berhasil karena mendapat pendidikan Belanda sangat dikagumi. Di dalam masyarakat Kristen, karena telah mampu membuat suatu impian orang-orang Ambon menjadi kenyataan, akan tetapi mereka harus pula berjuang

untuk mendapatkan suatu kedudukan bagi dirinya di dalam kepemimpinan sosial. Fungsi tersebut dan di dalamnya melekat status sosial yang paling tinggi, oleh para elit adat ternyata tidak bersedia dialihkan. Sebagaimana halnya dengan berbagai masyarakat di Nusantara, persoalan di atas adalah merupakan salah satu di antara konflik-konflik inti lainnya di dalam masyarakat Ambon selama masa penjajahan Belanda.

Selama beberapa dasawarsa sesudah didirikannya *Ambonsche Burgerschool* beserta sekolah pendidikan guru negeri, ternyata bahwa sistem pendidikan di atas tidak mampu melakukan perubahan yang penting, baik mengenai struktur maupun mengenai jumlah sekolah di negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen. Sebagai akibat dari perubahan kurikulum untuk pendidikan guru, maka sifat pendidikan pada sekolah-sekolah negeri berubah pula secara berangsur-angsur. Bagaimana pun, *Ambonsche Burgerschool* beserta sekolah pendidikan guru menandai permulaan dari suatu perluasan pendidikan bahasa Belanda. Di sekitar tahun 1920an sektor bahasa Belanda semakin berkembang dan mencakup tiga buah "Sekolah Rendah Belanda", yang terutama dimasuki oleh anak-anak Ambon, tiga buah *Christian Hollandsch-Inlandsch School* (HIS, bahasa Belanda dan murid-murid pribumi), sebuah HIS negeri di kota Saparua, dan sebuah MULO. Pada tahun 1926 jumlah murid sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda di Kepulauan Ambon ada sebanyak 2.826 orang.^{7 5}

Timbulnya malaise ekonomi di Kepulauan Ambon sebagai akibat dicabutnya monopoli atas cengkik dan akhirnya membawa kemunduran di bidang perdagangannya di sekitar tahun 1890an, bersamaan dengan diadakannya perbaikan dalam fasilitas-fasilitas pendidikan, justru Ambon menjadi terbelakang dan terpinggirkan di dunia ekonomi. Pada tahun 1878 residen Kepulauan Maluku mengemukakan keterangan bahwa daerahnya hanya dapat menyediakan kesempatan pekerjaan atau jabatan yang sangat terbatas bagi para lulusan *Klein Ambtenaars Examen*.^{7 6}

Bagi orang-orang Ambon yang beragama Kristen yang kurang mampu dan trampil akan tetapi berbadan sehat, tersedia

tempat dalam tentara kolonial sebagai suatu pilihan kedua. Dalam dekade-dekade abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, ribuan orang Ambon yang cukup terdidik, sehat badaniah dan pernah ambisi meninggalkan kampung halaman mereka, untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial dalam berbagai jabatan menengah dan rendah yang terdapat dalam birokrasi kolonial yang semakin meluas, di samping sebagai guru, misionaris dan serdadu. Dalam tahun 1930 sekurang-kurangnya 16% dari komunitas orang-orang Ambon yang beragama Kristen berdiam di Kepulauan Maluku. Menurut sensus 1930, dari seluruh orang-orang Ambon yang berjumlah 220.773 jiwa, maka sebanyak 21.211 jiwa berada di luar Kepulauan Maluku. Jumlah orang-orang Ambon yang memasuki *Koninklijke Nederlandsch Indische Leger/KNIL* pada akhir tahun 1929 berjumlah 4.257 orang, dan sebagian besar ditempatkan di luar Kepulauan Maluku. Dari sejumlah 1.832 pria Ambon yang berdiam di Jawa Barat, maka sebanyak 858 orang adalah serdadu KNIL. Diperkirakan bahwa antara 30 dan 35% dari masyarakat emigre Ambon terdiri atas kaum serdadu dan keluarga mereka, dan semuanya memeluk agama Kristen. Dalam masyarakat Ambon di Jawa dan Madura hanya terdapat 71 orang atau 0,60% dari masyarakat tersebut yang beragama Islam.^{7 7} Pada tahun 1945, orang-orang Ambon Republikein yang berada di daerah NRI berjumlah 30.000 orang.^{7 8}

Jabatan sebagai pegawai negeri atau sebagai anggota KNIL telah mampu menawarkan standar kesejahteraan material yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka serta mobilitas sosial yang lebih besar dari pada keadaan sebelum di Ambon, terutama di negeri-negeri. Terciptanya suatu sistem pendidikan di Kepulauan Maluku, di mana para lulusannya hanya bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka dengan jalan harus meninggalkan kampung halamannya, ternyata membawa akibat-akibat sosial. Dalam tahun 1920an dan 1930an kaum nasionalis Ambon, yang sebagian besar merupakan hasil pendidikan yang menggunakan bahasa Belanda, memperingatkan bahwa sistem pendidikan Belanda sebenarnya merupakan suatu berkah yang tidak memenuhi syarat bagi

masyarakat Kristen. Pemimpin Sarekat Ambon, J. Latuharmay melalui tulisannya pada tahun 1931 antara lain menentang dengan menyatakan bahwa pendidikan di Ambon direncanakan hanya untuk menghasilkan juru tulis dan serdadu. Selama 300 tahun pendidikan tersebut telah menghasilkan orang, yang berpikir bahwa dirinya adalah lebih tinggi dari pada nya, terasing dari sejarah, ekonomi dan masyarakat, sampai lupa bahwa negeri dan rakyatnya sendiri hidup dalam kesengsaraan. Sekolah-sekolah tersebut telah menghasilkan orang-orang, yang berpikir bahwa dirinya adalah lebih tinggi dari pada orang-orang senegerinya dan yang menghargai kesamaan dengan orang-orang Belanda sebagai suatu pujian, menurut Latuharmay permasalahannya ialah bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak memiliki dasar kebangsaan dan bahwa para pemuda Ambon tumbuh tanpa sadar akan kemelaratan kampung halamannya.⁷⁹⁾

Pemerintah kolonial Belanda ternyata juga harus menghadapi berbagai masalah dengan sistem pendidikan di atas. Pada permulaan abad ke-20 mulai terlihat bahwa fasilitas-fasilitas peningkatan pendidikan telah meninggalkan suatu keinginan besar untuk kemajuan pendidikan. Jumlah orang-orang Kristen yang semakin meningkat menyadari bahwa pendidikan, terutama pendidikan yang menggunakan pendidikan Belanda, merupakan suatu jalan raya untuk menuju kepada kemakmuran dan status yang relatif. Dalam kaitan dengan masalah di atas para pejabat pemerintah kolonial Belanda terutama memperhatikan dua aspek. Yang pertama, tidak semua mendapat pendidikan Belanda ternyata berhasil untuk memperoleh pekerjaan dalam birokrasi, atau karena ketidakberhasilan tersebut, maka dapat diterima dalam KNIL. Tentang hal ini pernah seorang residen Maluku menulis, antara lain sebagai berikut. "Kaum murba (proletariat) telah diolah, yang sebenarnya tidak tahu bagaimana menemukan suatu jalan ke luar, yang menganggap dirinya terlalu tinggi untuk menerima pekerjaan tangan/kasar, sehingga walaupun pendidikan semakin diperlukan, hasilnya tidak semakin memperbesar kesejahteraan".⁸⁰⁾

Yang kedua, mereka yang pernah menikmati suatu pendidikan yang menggunakan bahasa Belanda semakin banyak menggunakan hak untuk mendapatkan suatu status hukum sebagai orang Belanda (*Gelijktelling*, dipersamakan). Memang terdapat beberapa keuntungan di bidang hukum dan lapangan pekerjaan karena status tersebut, tetapi motivasi pokok yang berada di belakangnya hanyalah untuk mendapatkan suatu pernyataan simbolis tentang persamaan status dan kompetensi.⁸¹ Sampai pecahnya Perang Dunia II (1939) akibat-akibat suatu pendidikan yang menghasilkan para lulusan, banyak di antaranya tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang cocok di daerahnya, telah menjadi sorotan utama dalam berbagai perdebatan di kalangan para pejabat pemerintah kolonial. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa pemecahannya harus dengan jalan menurunkan tingkat subsidi pemerintah dan menyuruh orang-orang Ambon membayar sebagian besar biaya pendidikan mereka. Misalnya, dalam *budget* untuk tahun 1927 sebanyak F.6.925.000 disisihkan sebanyak F.670.000 untuk mengeluarkan bidang pendidikan. Tentang perluasan subsidi bagi sekolah-sekolah Kristen di negeri-negeri dilukiskan melalui contoh yang berlaku untuk Hutumuri (Pulau Ambon). Sekolah yang terdapat di sana mempunyai empat orang guru dan 165 murid. Gaji para guru, termasuk pastor dinaikkan menjadi F.500 per bulan, sedangkan negeri hanya memasukkan pajak sebesar kurang lebih F.1.410 per bulan tahun fiskal.⁸²

Yang lain menginginkan agar sekolah-sekolah disederhanakan. Ini berarti bahwa standarnya harus diturunkan; misalnya mengubah (konversi) sekolah-sekolah Belanda menjadi HIS dan mempersingkat tahun ajaran sekolah-sekolah negeri. Memang sejak itu terjadi beberapa perubahan, meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk itu.⁸³ Yang jelas bahwa akhirnya para pengusaha Belanda di Batavia lebih melihat keuntungan, jika diteruskan saja produksi orang-orang Ambon yang berpendidikan Belanda serta loyal kepada pemerintah kolonial, yang duduk dalam birokrasi dan KNIL. Demikianlah perkembangan mengenai wujud lembaga. tujuan,

isi, proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengajaran Belanda yang lebih dikenal sebagai sekolah, kesemuanya itu dirintis dalam abad ke-16--18, yaitu di daerah Kepulauan Maluku, di mana-mana orang-orang Belanda mengadakan kontak langsung dengan rakyat di sana, dan pengaruhnya justru sangat terasa di seantero Nusantara, terutama dalam abad ke-19 dan abad ke-20. Perkembangan pendidikan dan pengajaran abad ke-16--18 di Kepulauan Maluku ini terpaksa dibicarakan sampai abad ke-19 dan abad ke-20.

Bagaimana pula perkembangan di Jawa, Sulawesi Selatan dan Sumatera, di mana-mana orang-orang Belanda dalam abad 16--18 tidak mengadakan kontak langsung dengan penduduk pribumi, tetapi melalui para sultan, raja atau penguasa setempat? Di beberapa kota pelabuhan atau benteng-benteng yang merupakan basis kekuatan Belanda, mulai didirikan sekolah-sekolah. Misalnya, pada tahun 1617 didirikan sekolah yang pertama di Batavia, yang pada tahun 1622 bernama *Batavische School*. Pada tahun 1630 didirikanlah *Burgerscholl*. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Van Imhoff, sempat mendirikan sebuah Akademi Pelayaran (1743) dan *Seminarium Theologicum* untuk mendidik calon-calon pendeta (1745). Keduanya di Batavia. Untuk penduduk keturunan Cina pemerintah kolonial mendirikan pula sekolah (1737), khusus bagi anak-anak Cina golongan miskin, tetapi ditutup sebagai peristiwa "*De Chineezenmoord*" (1740). Pada tahun 1753 dan 1787 sekolah semacam itu didirikan kembali atas biaya masyarakat Cina sendiri. Bagi penduduk pribumi yang Islam pendidikan Belanda kurang diminati.^{8 4}

Bagaimana pula perkembangan pendidikan formal "gaya baru" atau sekolah ini yang dikelola oleh pihak swasta selama abad ke 16--18? Paralel dengan pembahasan tentang perkembangan sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Belanda semacam itu di Kepulauan Maluku, ternyata bahwa pengetahuan tentang pengetahuan agama di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam sangat minim. Walaupun sudah dimulai dengan terjadinya kontak pertama dengan orang-orang Islam, akan tetapi pengajaran agama nampaknya dilakukan

dengan cara-cara yang sederhana, yang didasarkan atas pembacaan dan hafalan ayat-ayat *Al-Qur'an*. Pada permulaan abad ke-17 diketemukan bukti tentang adanya sekolah-sekolah khusus untuk pendidikan agama bagi anak-anak golongan elit Islam. Para guru terdiri atas pedagang-pedagang yang biasanya menetap selama satu tahun di Ambon, yaitu sambil mereka menjual barang dagangannya dan membeli cengkih dalam perjalanan pulang. Mereka sebagian besar terdiri atas orang-orang suku Jawa dan turut dibantu oleh orang-orang Gujarati (India).^{8 5}

Berbeda dengan tempat-tempat yang lain di Nusantara, di negeri-negeri tidak terdapat atau madrasah.^{8 6} Keadaan ini berlangsung sampai permulaan abad ke-20. Misalnya, Kennedy mengamati di Tulehu (1949) bahwa murid-murid baru datang ke sekolah-sekolah agama yang dijalankan oleh guru-guru yang beragama Islam ialah sore hari, di mana mereka belajar bahasa Arab dan membaca *Al-Qur'an*. Menurut Kennedy, kegiatan belajar tersebut baru dimulai sekitar tahun permulaan tahun 1900, dan mutu pendidikannya sangat terbelakang karena tidak didukung oleh sekolah-sekolah sekuler.^{8 7}

Pada tahun 1924 masyarakat Arab mulai membangun madrasah di Kota Ambon dan sebagian terbesar dari murid-muridnya adalah anak-anak Ambon yang berasal dari negeri-negeri. Di samping para petugas mesjid, para guru diambil dari orang-orang Arab yang tinggal di kota, dari orang-orang kampung yang sudah menunaikan ibadah haji dan dari orang yang bukan berasal dari suku Ambon seperti Haji Mohammad Joesoef yang berasal dari Singapura. Haji M. Joesoef telah membina pengikut-pengikutnya di beberapa negeri, terutama di Tulehu, yaitu selama tahun 1927--1934. Ajaran ajarannya dituduh sebagai penyebab timbulnya pertikaian dan pertentangan di berbagai negeri, sehingga raja melarangnya mengunjung beberapa negeri dan dinyatakan sebagai seorang pengacau dan koruptor moral.^{8 8} Kraemer menyatakan bahwa ajaran-ajaran Joesoef memiliki sifat yang dogmatis dan mistik. Pada tahun 1934 Joesoef dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun atas suatu tuduhan sebagai seorang pemalsu.^{8 9} Timbul-

lah berbagai usaha untuk meningkatkan standar pengajaran Islam di berbagai negeri oleh orang-orang Ambon sendiri. Pada tahun 1932 pemimpin Sarkat Islam, AM Sangadji, kembali ke negerinya, Rohomony, di mana yang menjadi raja adalah abangnya, dan berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah SI., akan tetapi menemui kegagalan.⁹⁰ Pada permulaan tahun 1900an Hindia Belanda mulai mendirikan *Volks-Schoolen* (Sekolah Rakyat) di enam negeri di Kepulauan Ambon, yang penduduknya memeluk agama Islam, yaitu di Tulehu, Hitumessing, Laha, Pelauw, Kaibobo dan Kulur (Saparua) dan Haruku.⁹¹ Pembukaan sekolah-sekolah tersebut merupakan usaha pertama pemerintah untuk memperluas pendidikan sekuler ke negeri-negeri yang penduduknya menganut agama Islam. Sekolah-sekolah ini menyediakan suatu pendidikan dasar yang lebih banyak bersifat elementer dan yang berlangsung selama tiga tahun, dibandingkan dengan sekolah-sekolah Kelas Dua yang didirikan pemerintah di daerah yang penduduknya menganut Agama Kristen dan yang berlangsung selama empat sampai lima tahun. Sekolah-sekolah ini didirikan, dipelihara serta dibiayai oleh penduduk negeri yang bersangkutan, dengan mendapat subsidi dari pemerintah. Subsidi-subsidi tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang diberikan kepada sekolah-sekolah di negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen, sedangkan guru-guru yang diperbantukan sangat rendah pendidikannya. Enam sekolah yang terdapat di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam pada tahun 1926 menerima subsidi yang seluruhnya berjumlah f.2.743.75, sedangkan di Negeri Kilang yang penduduknya beragama Kristen dan berjumlah hanya 607 jiwa dibandingkan dengan Tulehu sebanyak 2,027 jiwa, menerima seluruhnya f.3,950.00. Perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi orang-orang Islam dan orang-orang Kristen jelas terlihat pada pengeluaran belanja pemerintah kolonial tahun 1926 bagi *onderafdeeling* (kecamatan) Saparua. Pengeluaran rata-rata untuk golongan Kristen per kepala, untuk pendidikan f.3,06, peribadatan umum f.1.16, administrasi f.0,44 (seluruhnya berjumlah f.4.66), untuk golongan Islam: untuk pendidikan

f.0,17; peribadatan umum tidak ada; administrasi f.0,38 (seluruhnya berjumlah f.0,55). Sebaliknya, pengenaan pajak rata-rata per kepala bagi orang-orang Kristen sebanyak f.0,65, bagi orang-orang Islam f.0,86.⁹² Anak-anak keluarga Islam yang memasuki sekolah-sekolah berbahasa Belanda di kota Ambon juga sangat terbatas, hanya berjumlah 96 murid dari seluruh murid yang berjumlah 1.980 orang.⁹³ Sebagian besar dari murid-murid yang beragama Islam tersebut dari keluarga-keluarga raja atau dari masyarakat pengusaha Islam di Ambon. Hasil yang dicapai oleh sekolah di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam adalah berbeda-beda. Pada pertengahan tahun 1930an ternyata yang dapat bertahan dan yang mengoperasikannya dapat bersaing dengan sekolah di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam di Pulau Ambon adalah hanya yang terdapat di Tulehu; dua sekolah yang lain terpaksa ditutup karena kekurangan murid.⁹⁴ Kepulauan Amboina merupakan salah satu daerah di Hindia Belanda yang mempunyai angka melek-huruf tertinggi, kota Ambon 44.9%.⁹⁵ Akan tetapi melihat kepada fasilitas-fasilitas pendidikan yang diberikan kepada setiap kelompok agama, maka angka yang tersebut di kalangan orang-orang Kristen adalah sangat tinggi dan di kalangan orang-orang Islam adalah rendah.⁹⁶

Para pejabat Pemerintah Hindia-Belanda ternyata telah memberikan berbagai pendapat tentang situasi pendidikan yang berkembang sejak tahun 1600 di Kepulauan Maluku khususnya di daerah Kepulauan Ambonia, di mana pemerintah mengadakan kontak langsung dengan penduduk. HJ. Schmidt, yang pada permulaan tahun 1900an merupakan salah seorang asisten residen di Ambon dan yang mendirikan enam sekolah di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam, mengatakan bahwa penduduk tidak merasa butuh akan pendidikan dan bahwa banyak raja-raja Islam yang konservatif tidak begitu tertarik pada suatu sekolah, yang mendidik rakyat mereka menolak pekerjaan kasar/tangan. Akan tetapi Smidt juga dapat membenarkan bahwa kecemasan di atas tidak seluruhnya tanpa dasar.⁹⁷ NA. Vaan Wijk, yang di sekitar tahun 1930an merupakan seorang *controleur* (wedana) di Ambonia,

menjekaskan bahwa terdapat suatu keyakinan yang mendalam di kalangan orang-orang Islam tentang anak-anak mereka, yang apabila masuk sekolah nantinya mereka akan menjadi orang-orang Nasrani, yaitu suatu gagasan yang disebarluaskan oleh para guru mengaji. Memang tidak semuanya benar bahwa Pemerintah Hindia Belanda melakukan suatu tekanan atas masalah-masalah keagamaan, akan tetapi bagaimana pun ada kenyataan bahwa negeri-negeri yang memeluk agama Islam, yang pernah masuk sekolah akhirnya semakin menjauhi agama mereka.^{9 8}

Orang-orang Ambon yang beragama Islam ternyata mempunyai pandangan yang agak berbeda tentang kebijaksanaan politik pemerintah kolonial mengenai pendidikan. Misalnya, A. Halim M.A. Tuasikal dalam bukunya antara lain menulis:

"Di kalangan penduduk kepulauan Maluku hampir tidak terdapat intelektual-intelektual muslim (. . .) ini adalah suatu konsekuensi dari kebijaksanaan politik kolonial tentang pendidikan dan bagaimana pun besarnya bakat orang-orang Islam untuk kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan pendidikan yang terbuka berdasarkan 1001 sebab atau alasan dihalang-halangi bahwa waktu ia mempengaruhi seorang raja dengan pengaruh yang besar dalam masyarakat dan bahkan terhadap administrasi Hindia-Belanda. Dari sekian banyaknya raja-raja Islam hanya beberapa orang yang mampu mendapatkan tempat bagi anak-anaknya di MULO; dan lagi di HBS, dan diperguruan tinggi".^{9 9}

Apakah orang-orang Islam yang menghindarkan diri atau mereka memang dihindarkan dari kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan pendidikan, masalah ini merupakan suatu hal yang masih saja di perdebatkan. Betapa pun masalah ini telah mencerminkan sesuatu tentang hubungan antarpenguasa-penguasa kolonial dan komonitas Islam. Tegasnya, suatu hubungan yang ada jaraknya, yaitu "hidup dan membiarkan hidup", bercampur dengan saling ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Sebenarnya sampai akhir abad ke-17, pengalaman penduduk Kepulauan Ambonia dengan orang-orang Belanda

tidak sama dengan yang mungkin dianjurkan oleh bujukan-bujukan agama yang terpisah. Pada mulanya orang-orang Islam dan orang-orang Kristen, kadangkala bersama-sama melakukan berbagai perlawanan terhadap dominasi politik dan ekonomi, tetapi begitu dominasi Belanda sudah tertanam dengan kokoh sekali, maka baik komunitas Islam maupun komunitas terbuka bagi komunitas Kristen, maka hubungan antara komunitas Islam dan Kristen mulai berbeda secara dramatis. transformasi dan perluasan fasilitas-fasilitas pendidikan, yang terbuka bagi komunitas kristen, maka hubungan antara komunitas Islam dan Kristen dengan mulai berbeda secara dramatis. Orang-orang Kristen Ambon yang berpendidikan Belanda mulai memainkan suatu peranan yang penting dalam berbagai kegiatan kolonial, yaitu sebagai juru tulis (*clerks*), profesional dan serdadu. Dalam posisi-posisi tersebut mereka dapat menikmati suatu tingkat kesejahteraan material dan suatu status yang tidak mungkin didapat di negerinya dan ketergantungan mereka kepada orang-orang Belanda tercermin pada suatu rasa loyalitas yang tinggi terhadap dan pemihakan yang tegas kepada pemerintah kolonial). Jelaslah bahwa tujuan, isi, proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, yang menciptakan situasi yang berkembang di kalangan penduduk Kepulauan Ambonia seperti yang dilukiskan di atas, yang akibatnya masih terasa sampai tahun 1950an, di antaranya Peristiwa Republik Maluku Selatan (RMS).¹⁰⁰

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sistem pendidikan Belanda melalui lembaga-lembaga sekolah selama abad ke-16--18, justru sangat giat dilaksanakan di daerah Kepulauan Maluku, khususnya di negeri-negeri Kepulauan Ambonia yang penduduknya sudah memeluk agama Kristen Protestan. Di daerah-daerah yang lain di Nusantara penyelenggaraannya hanya khusus untuk orang-orang di lingkungan VOC. Selain itu pengaruh bangsa Portugis dan Spanyol tidak pernah masuk ke sana, sehingga agama Katolik Roma tidak terdapat di kalangan penduduk pribumi. Sampai akhir abad ke-18 Belanda baru sempat mendirikan sekolah-sekolah hanya di beberapa tempat saja, di antaranya di Batavia, Banten, Cirebon, Sumatera Barat dan Makasar.¹⁰¹

CATATAN

1. Sartono Kartodirdjo, *PENGANTAR SEJARAH INDONESIA BARU. 1500-1910. Dari Emporium Sampai Imperium* (Jakarta. Penerbit P.T. Gramedia, 1987), hal. 36-37.
2. T. Hughes, *Loyola and the educational system of the Jesuit* (New York, 1892).
3. E.A. Fitzpatrick *St. Ignatius and Ratio Studiorum* (New York: Mc Graw-Hill, 1933), hal. 185, 206.
4. Sumarsono Mestoko, et. al. *PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI ZAMAN KE ZAMAN* (Jakarta: Depdikbud/Balai Pustaka, 1986).
5. G.J. Knaap, *Kruidnagelen en Kristenen: De Verenigde Oost. Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696* (Dordrecht/Providence: Foris, 1987; KITLV, Verhandelingen 125), hal. 15.
6. Z.J. Manusama, *Hikayat Tanah Hitu: Historie en Sociale Structuur van de Ambonese Eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der Zeventiende Eeuw* (Ph.D. Thesis, Rijks Universiteit Leiden, 1977).
7. Roy F. Ellen, "Sago Subsistence and the Trade in Species: A provisional model of ecological succession and imbalance in Mollucan History", in *P.C. Burnham and R.F. Ellen/eds.*, *Social and Ecological Systems* (London; Academic Press, 1979), hal. 43-74.
8. Drs. A. Ahmadi, *PENDIDIKAN DARI MASA KE MASA* (Bandung. C.C. Armico, 1987, hal. 17.

9. E.S. De Klerck, *History of the Netherlands East Indies* (Rotterdam: W.L.E.J. Brusse, N.V., 1938) Vol. I, hal. 169.
10. Sartono Kartodirdjo, et. al., *SEJARAH NASIONAL INDO-NEsia* (Jakarta: Depdikbud, 1975), Jilid III, hal. 331 ff.
11. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Selected Writings of B. Schrieke (Den Haag: N.V. Van Hoeve, 1959), Part I, hal. 37.
12. Knaap, *op. cit.*, hal. 83
13. Prof. Dr. H. Muh. Said dan Dra. Junimar Affan, *MENDIDIK DARI ZAMAN KE ZAMAN* (Bandung: Jemmars, 1987), hal. 18 ff.
14. Richard Chauvel, *NATIONALIST, SOLDIERS AND SEPARATISTS: Verhandelingen van het KITLV*, 143 (Leiden: KITLV Pers, 1990), hal. 25 ff.
15. H. Kroeskamp, *Early schoolmasters in a developing Country. A history of experiments in school education in 19th. Century Indonesia* (Assen: Van Gorcum, 1974), hal. 9
16. N.A. Van Wijk, *Memories van Overgave van de Onderafdeling Amboina, 1937*, hal. 145-146.
17. Knaap, *op. cit.*, hal. 85.
18. *Ibid*, hal. 94-95.
19. Richard Z. Leirissa 'Maluku Tengah dalam abad kesembilanbelas. Studi pendahuluan', *PRISMA*, 9-8 (Agustus 1980), hal. 64-77.
20. Sekolah Guru (Kweekschool) yang didirikan Belanda di Bukittinggi, oleh rakyat dinamakan Sekolah Raja.
21. J.J. Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indie* (Groningen-Batavia : J.B. Wolters, 1938), hal. 22.
22. Knaap, *op. cit.*, hal. 49-7.
23. Kees Groeneboer, *Het ABC voor Indie* (Leiden : KITLV Uitgeverij, 1991) hal. 1.
24. Jan Evertsz. t'Amstelredam : Cloppenburch Boekvercoper op't water inden groten Bijbel; Met Privilegie van acht Jaeren, 1603, VIII, 225 bladzijden + 13 bladzijden (Teeuw, 1961 : 14, 116.

25. J.L. Swellengrebel, in Leijdeckers voetspoor; Anderhalve eeuw Bijbelvertaling in de Indonesische talen (Den Haag : Nijhoff, 1974–1978), Dua jilid, KITLV. Verhandelingen : 68, 82.
26. Kees Groeneboer, *op. cit.* hal. 10.
27. Lihai : Brugmans, 1938; Kroeskamp, 1974.
28. a. H. Grandijs, "Het Onderwijs ten tijde van de Oost-Indische Compagnie (VOC)" in P.J. Ravesteyn en H. Grandijs, twee bijdragen tot de kennis van de geschiedenis van het onderwijs aan Europeanen in Nederlandsch-India (Batavia. Kolff, 1896), Jilid I, hal. 30–1.
- b. J. Mooij, Geschiedenis der Protestansche Kerk in Nederlandsch-Indie (Weltevreden, Batavia Centrum : Landsdrukkery, 1923) hal. 310.
- c. C.A.L. Van Troostenburg de Bruijn, De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indie onder de oost Indische Compagnie, 1602–1795 (Arnhem : Tjeen Willink, 1884), hal. 511.
29. W.A. Ginsel, De gereformeerde kerk op Formosa of de lostgevallen eener handelskerk onder de oost-Indische Compagnie, 1627–1662 (Leiden : Mulder, 1931), hal. 111.
30. Bibliotheek Rijks-universiteit Leiden : 2006 F 21.
31. P. Van Dam, Beschrijvinge van de Oost. Indische Compagnie. Diterbitkan oleh Dr. C.W. TH. Baron van Boetzelaer van.
32. Bibliotheek Rijks-universiteit Leiden : 564 G 29.
33. Troostenburg de Bruijn, *op. cit.*, hal. 456.
34. Van Ginsel, *op. cit.*, hal. 104–5.
35. Bibliotheek Rijks-universiteit Leiden : 1840 F 20
36. Troostenburg de Bruijn, *op. cit.*, hal. 515.
37. J.A. Van der Chys (Redakteur), Nederlandsch-Indisch Plaatboek (Batavia . Lands-drukkerij; Den Haag : Nijhoff, 1880–1900; Zeventien Deelen), III, hal. 52
38. L. de Jong, het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag : Staatsuitgeverij, 1984), 1984 Deel II a, hal. 99–109.
39. Historisch Overzicht van het regerings beleid ten aanzien van het onderwijs voor de Inlandsche bevolking (Batavia:

- Lands-drukkerij, 1931), Publicaties Hollandsche-Inlandsch Onderwijs-Commissie, Tweede stuk, hal. 34.
40. P.W. Van der Veur, Education and social change in colonial Indonesia, I (Athens : Ohio University Press, 1969), Southeast Asia Series, 12, hal. 10-7.
lembar untuk anak-anak Pribumi dan 28 lembar untuk anak-anak.
 41. P.J. Van Roversteyn, "Vijftigjaren; Een bijdrage tot de kennis der geschiedenis van het onderwijs in Indie ge durende de laatste helft dezer eeuw", dalam; P.J. Van Ravesteyn en H. Grondys, Twee bijdraden tot de kennis van de Geschiedenis van het onderwijs aan Europeanen in Nederlandsch-Indie, II (Batavia : Kolff, 1896), hal. 38-43.
 42. C.F.A. Zernike (red.), Paedagogisch Woordenboek (Groningen : Wolters, 1905), hal. 164.
 43. P.Th.F.M. Boekholt en E.P de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland (Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1987), hal. 104-6; Zernike, *op. cit.*, hal. 919-21.
 44. Zernike, *op. cit.*, hal. 160-4.
 45. Van Ravensteyn, *op. cit.*, hal. 38.
 46. a. Koninklijk Bibliotheek Den Haag : 506 A.9-10 (1856-1857).
b. Bibliotheek Universiteit van Amsterdam : 357 a 13 ag (1856-1857).
 47. Van Ravesteyn, *Op. cit.*, hal. 3-47.
 48. R. Sikkers, "De regeering maakt haar ambtenaren rebels; De Geschiedenis van het Nederlands Indisch Onderwijzers Genootschap", Het Schoolblad (20 November 1986), hal. 21-37.
 49. D.C. de Bruin, Fragmentarische herinneringen uit het leven van een oud-gouvernements-onderwijzer. (Semarang : Semarang Drukkerij en beekhandel, 1893), hal. 14-20.
 50. D.C. de Bruin, "Voorbericht Eerste Lees oefeningen (. . .), Eerste stukje : 3-4.
 - 51 C.R. Groeneboer (1989 a), "Ruim 375 jaar Nederlands Vreemde en Tweede Taal in de Indonesische Archipel", in Handelingen tiende colloquium van docenten in de Veer-

- landistiek aan buitenlandse universiteiten; Gent 1988, pp. 293–301. 'S. Gravenhage : Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
52. Notulen Bataviasch Genootschap, 3 (1865), hal. 120–125.
 53. G.J. Nieuwenhuis. Bronnenboek voor het nieuw taalonderwijs in Indie (Broningen–Den Haag–Weltevreden : Wolters. 1925).
 54. Kroekamp, *op. cit.*, hal. 22.
 55. Brugmans, *op. cit.*, hal. 105–185.
 56. Vander Veur, *op. cit.*, hal. 2.
 57. Kees Groeneboer. Het ABC Voor Indie, hal. 15-6.
 58. D. Boukema en S. van der Ree. Het onderwijs Nederlands in Indonesie: de laatste 75 jaar". *Levende Talen* 411 (Mei, 1986), hal. 318-29.
 59. C.R. Groeneboer. "Nieuw Taalonderwijs; De Betekenis van G.J. Nieuwenhuis voor het Nederlanda in Indie", in: C.R. Groeneboer (res.), *Studi Bahasa di Indonesia-Nederlandse Studien in Indonesie*". (Jakarta. Djambatan. 1989 b), hal. 319-31.
 60. Prof. Dr. Slamet Imam Santoso. *Pendidikan Di Indonesia: Dari Masa ke Masa* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hal. 1 ff.
 61. Sumarsono Mestoko, *et. al.*, *Op. cit.*, hal. 80.
 62. Kroeskamp, *Op. cit.*, hal. 10 ff.
 63. R.Z. Leirissa, Z.J. Manusama, A.B. Lapien dan Paramita R. Abdulrachman (eds.), *Maluku Tengah di masa lampau: Gambaran sekilas lewat arsip abad sembilan belas* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hal. 228.
 64. Kroeskamp, *Op. cit.*, hal. 23, 59, 62, 76.
 65. Leirissa, *et. al.*, *Op. cit.*, hal. 228-30.
 66. *Ibid*, hal. 231.
 67. *Ibid*.
 68. Laporan tentang ujian akhir yang diadakan di Sekolah Guru (Kweekschool) untuk-untuk Bumiputera di kota Ambon, tahun 1877 dan 1879, berturut-turut nr. 480/77 dan 303/79.

69. Verslag eind-examen Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzerste Amboina, 1977, nr. 480/77.
70. Surat G.J. Van Der Turk, Residen Ambon, kepada Gubernur Jenderal di Batavia, tanggal 15 Oktober 1879, no. 2774, nr. 696/79.
71. Historisch overzicht, 1930-31, I, hal. 53-
72. Leirissa, *et. al.*, *Op. cit.*, hal. 229-30.
73. Historisch overzicht, 1930-31, I, hal. 54-5.
74. Historisch overzicht, hal. 54-55.
75. L.H.W. Van Sandick, Memorie Van Overgave, 1926, V: Appendix.
76. Algemeen Verslag Residentie Amboina, 1878. ANRI No. 582.
77. Volkstelling 1936, V: 24 en tekstabel no. 2, 40-1, I: 18, III: 212
78. Richard Z. Leirissa, Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia (Jakarta: FSUI. — Lembaga sejarah, 1975), hal. 101.
79. J. Latuharhary, Azab sengsara kepoeloean Maloekoe (Makasar, 1931), hal. 29-30.
80. G. Sieburgh, Memorie Van Overgave het bestuur over Residentie AMbonia Van aftredenden Reident G. Sieburgh. Mr. 1487/10, hal. 50.
81. *Ibid*, hal. 47-48.
82. A.J. Beversluis en A.H.C. Gieben, Het Gouvernement der Molukken (Wetvereden, Batavia: Landsdrukkerij, 1929), Hal. 110-1, 161.
83. N.A. Van Wij, *Op cit*, hal. 147-8.
84. Sumarsono Mestoko, *et.a.*, *Op cit*, hal. 78-82
85. G.J. Kenaap (187), *Op. cit*, hal. 75.
86. Ch. F. Van Fraasen, Ambon-rapport (M.A. Tesis, Rijks Universiteit Leiden, 1972), hal. 324.

87. Raymond Kennedy, Field Notes on Inonesia: Ambon and Ceram, 1949–1950, edited by Harold C. Conklin (New Haven: HRAF, 1955), hal. 57.
88. H. Kraemer, Medelingen over den Islam op Ambon en Haroekoe, Djawa 7 (1927), hal. 88.
89. Verslag over den bestuurlijken en politiek-politioneelen toestand over het Zehalfjar 1934 Residentie Molukken, Mr. 382 grh/35.
90. Politiek Verslag Zehalfjaar 1953 Residentie Ambonia, Mr. 637 geh/33. Moslems religious and organizations are dicussed in greater detail in Chapter VIII.
91. Van Sandick, Memrie Van Overgave, 1926, V: Appendix.
92. a. *Ibid*
b. Beversluis en Gieben, *Op cit*, hal. 111-2
93. Van Sandick, Memorie Van Overgave, 1926: Appendix XI.
94. Van Wijk, Memorie Van Overgace, 1937, hal 147.
95. Volkstellig 1936, V. hal. 83.
96. H.E. Haak, Memorie Van Overgave, 1931, hal. 33.
97. Van H.J. Smidt, Memorie van Overgave, 1837, 1927 : F.
98. Van Wijkl, Memorie Overgave, 1937, hal. 1946.
99. A. Halim M.A. Tausikal, "De Islam in de Molukken" Cultureel Nieuws Indonesia, 2–20 (1952), hal. 385–6.
100. J.A. Manusama, Om recht en Vrijheid: De strijd om de onafhankelijk heid der Zuid-Molukken (Utrecht: Libertas, 1952, hal. 54.
101. Sartono Kartodirdjo, *Op cit*, hal. 349–359.

BAB II

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM ABAD KE-19

Dalam abad ke-18 daerah kekuasaan Kompeni di Indonesia, terutama di Pulau Jawa semakin luas, perdagangan semakin besar jumlahnya dan pekerjaannya pun makin beragam pula. Untuk keperluan usaha itu, Kompeni sangat membutuhkan bantuan tenaga rakyat Indonesia yang terdidik. Faktor inilah yang mendorong Kompeni untuk merencanakan pembukaan sekolah-sekolah.¹ Rencana tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh Kompeni, karena VOC terpaksa bubar dan kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda yang untuk selanjutnya akan mengatur masyarakat dan pemerintah di daerah jajahannya.

Pemerintah Hindia Belanda juga merasakan akan kebutuhan tenaga kerja yang terdidik, sehingga timbul pikiran untuk mengadakan pengajaran bagi rakyat umum di Indonesia. Timbulnya gagasan tersebut disebabkan pula oleh dorongan paham *aufklarung*, yang berarti fajar atau terang (yang telah menjadi terang). Ciri-cirinya antara lain ialah percaya pada nalar, pada sifat-sifat baik dari manusia dan kesempurnaannya, menuju ke arah perikemanusiaan, dan menjunjung akal sehat. Dengan kata lain paham *aufklarung* ini menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang kemudian menjelma dalam bentuk-bentuk Sekolah Negeri. Berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja atau agama tertentu yang mengutamakan

kan kepada warga gereja atau agama masing-masing, maka paham baru tersebut memperkenalkan sistem pendidikan untuk masyarakat atau rakyat banyak yang membebaskan kewajiban itu kepada negara (pemerintah),² tetapi gagasan itu tidak dapat segera dilaksanakan terutama karena pecahnya Revolusi Perancis tahun 1789 yang kemudian menjalar hampir ke seluruh Benua Eropa termasuk Belanda jatuh ke dalam kekuasaan Perancis (Napoleon Bonaparte). Di Negeri Belanda, Napoleon Bonaparte menempatkan saudaranya yakni Louis Bonaparte. Salah satu akibat dari revolusi Perancis adalah terjadinya perubahan dalam bidang sosial, di antaranya bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini disebabkan Napoleon Bonaparte sangat memperhatikan bidang tersebut. Pendidikan dan pengajaran yang dalam pemerintahan lama dapat dikatakan hanya terdapat di kalangan atas, oleh Napoleon Bonaparte diubah dan pendidikan dijadikan tanggungan pemerintah. Pendidikan dan pengajaran rendah, menengah dan tinggi disusun dan dinetralisasi. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran tidak lagi merupakan monopoli golongan atas saja.³

2.1 Pendidikan dan Pengajaran Masa Daendels (1808--1811)

Pengaruh Revolusi Perancis dalam bidang pendidikan sampai pula ke Indonesia. Hal ini terjadi tahun 1808 sejak diangkatnya Daendels menjadi gubernur jenderal untuk berkuasa di Indonesia oleh Raja Belanda Louis Napoleon.

Pemerintah Daendels di Indonesia membawa angin baru terutama di bidang pendidikan. Pendidikan yang mulanya didasarkan agama Kristen mulai ditinggalkan dan berusaha menghidupkan kembali pendidikan yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Untuk merealisasi apa yang diinginkan itu pada tahun 1808 Daendels memerintahkan kepada para bupati di Pulau Jawa agar diadakan pengajaran di kalangan rakyat, dan tiap-tiap distrik mempunyai sekolah yang memberikan pendidikan berdasarkan adat-istiadat,

undang-undang, dan pokok-pokok pengertian keagamaan khususnya agama Islam.

Pada tahun 1809 untuk pertama kalinya diselenggarakan pendidikan bidan sebagai bagian dari usaha pemeliharaan kesehatan rakyat dengan Guru-guru yang terdiri atas para dokter yang tinggal di Batavia (Jakarta) dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu.

Kemudian dengan dalih untuk "memajukan seni tari rakyat", maka pada tahun yang sama (1809) Daendels memerintahkan kepada bekas sultan Cirebon untuk mendirikan tiga buah sekolah tari gadis yang dinamakan "Sekolah Ronggeng". Sekolah ini menjadi tanggungan sultan, murid-muridnya terdiri atas anak-anak perempuan dari keluarga tidak mampu dan berumur di bawah 12 tahun. Lama belajarnya 4 tahun, sedangkan pelajaran yang diajarkan meliputi menari, menyanyi, membaca dan menulis. Sekolah Ronggeng ini meskipun dalam teorinya merupakan tempat untuk mendidik, namun pada hakekatnya sekolah ini lebih merupakan usaha untuk mendemoralisasikan pemuda atau pemudi Indonesia, karena memang tujuan utamanya adalah untuk menjauhkan semangat heroisme dan patriotisme rakyat Indonesia, sehingga mereka tidak menaruh perhatian terhadap agitasi politik.

Pada tahun 1811 masa pemerintah Daendels berakhir karena kekuasaan di Pulau Jawa jatuh ke tangan Pemerintah Inggris, pada hal perintahnya mengenai pembukaan sekolah di tiap-tiap distrik dan persebaran pengajaran belum terlaksana. Namun demikian pemerintah Daendels mengandung arti penting, yaitu pemerintah untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemberian pengajaran kepada rakyat adalah tugas dan kewajiban pemerintah. Dan pengajaran itu tidak terbatas kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja, melainkan merata di semua lapisan masyarakat.⁴

2.2 Pendidikan dan Pengajaran Masa Raffles (1811--1816)

Pembaharuan dalam bidang pendidikan pada masa Daendels, dalam pelaksanaannya ternyata banyak mengalami kegagalan.

Hal ini terutama disebabkan tidak adanya biaya khusus untuk pembinaan pendidikan dan pengajaran dan terjadilah peralihan pemerintah ke tangan Inggris yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stanford Raffles.

Demikianlah, mulai tahun 1811 tindakan Raffles dalam menjalankan pemerintahannya adalah kebalikan dari pada Daendels. Dalam Bidang ekonomi, Raffles berusaha memeringankan nasib rakyat. Hal-hal yang memberatkan seperti pekerjaan rodi (kerja paksa) ciptaan Daendels dihapuskan dan diganti dengan kewajiban membayar pajak. Demikian pula perbudakan diusahakan untuk dihilangkan. Sebaliknya masalah pendidikan dan pengajaran rakyat diabaikan. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan mendapat perhatian besar dari Raffles, terbukti dengan berhasil disusunnya buku *History of Java*. Akibatnya Raffles selaku penguasa tidak memperhatikan bidang pendidikan dan pengajaran, maka sekolah-sekolah yang didirikan pada masa pemerintahan Daendels keadaannya sangat menyedihkan, bahkan pada masa akhir pemerintahannya (1816) sekolah-sekolah itu hampir tidak ada lagi.⁵

2.3 Pendidikan untuk Penduduk Golongan Eropa

Setelah kekuasaan di Pulau Jawa pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya diambil alih kembali oleh Pemerintah Hindia Belanda, barulah terjadi perkembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, melanjutkan usaha yang telah dirintis sebelumnya.

Sejak tahun 1816 kekuasaan atas Pulau Jawa kembali ke tangan Pemerintah Belanda. Kali ini pemerintahan diwakili oleh Komisaris Jenderal Elout, Buykes, Van der Cappelen, dan Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignies. Para penguasa tersebut pada dasarnya sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan usaha Daendels dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini penyelenggaraan sekolah-sekolah mereka serahkan kepada CGC. Reinwardt yang terkenal sebagai pendiri Kebun Raya Bogor. Tugasnya dalam lapangan pengajaran berat baginya. Maka usaha pertama dari Reinwardt adalah menyusun undang-undang

pendidikan dan pengajaran yang memuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan umum mengenai persekolahan, pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Akhirnya pada tahun 1818 keluarlah peraturan pemerintah yang memuat peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah rendah. Isinya hanya berupa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan, sedikit mengenai penyelenggaraan pengajaran, dan peraturan itu sama sekali tidak menyinggung tentang pendidikan untuk anak-anak bumiputera. Dari peraturan itu terbukti bahwa pendidikan itu dimaksudkan hanya untuk orang-orang Belanda saja.

2.3.1 Pendidikan Dasar (*Europeesche Lagere School* atau ELS)

Berdasarkan undang-undang tersebut maka pada 24 Februari 1817 di Batavia (Jakarta) dibuka sekolah pertama untuk anak-anak Eropa yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS) yang mencontoh sekolah dasar yang ada di Negeri Belanda. Kemudian pada tahun 1820 sekolah jenis ELS dikembangkan menjadi 7 buah, yaitu 2 buah di Batavia (*Welterden da Molenvliet*), dan masing-masing 1 buah di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Gresik. Di Sekolah Dasar itu diberikan pelajaran menulis, membaca, berhitung, bahasa Belanda, sejarah dan ilmu bumi. Setelah pendidikan dasar tersebut berlangsung kurang-lebih 9 bulan, pada tahun 1826 kegiatan lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga urusan pendidikan dan pengajaran sangat disederhanakan. Tidak heran kalau sampai waktu itu masih belum juga ada perhatian pada pengajaran rakyat umum. Sekolah-sekolah yang ada tetap hanya bagi anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani.

Sementara itu pada tahun 1830 kekuasaan di Indonesia beralih ke tangan Gubernur Jenderal Van de Bosh yang terkenal dengan sebutan "Bapak Cultuurestelsel atau Tanam Paksa". Untuk kelancaran pelaksanaan *Cultuurstelsel*, Van den Bosh

sangat membutuhkan tenaga pekerja yang terdidik. Oleh karena itu bidang pendidikan, baik untuk golongan Eropa maupun untuk golongan bumiputra ditingkatkan. Demikian pada tahun 1833 jumlah sekolah dasar dikembangkan menjadi 19 buah, tahun 1845 menjadi 25 buah, tahun 1895 menjadi 159 buah, kemudian tahun 1902 meningkat lagi menjadi 173 buah. Dengan jelas dapat dilihat bahwa sejak pertengahan abad ke-19, sebagian besar anak-anak penduduk golongan Eropa dapat menikmati pendidikan dasar. Meskipun jumlah sekolah secara kuantitatif memenuhi harapan, namun sampai pertengahan abad ke-19 Sekolah Rendah (ELS) secara kualitatif menurut ukuran orang Belanda sangat menyedihkan. Hal ini disebabkan karena murid-murid yang ada berasal dari keturunan campuran dan anak tidak sah. Kalau ada keturunan Eropa totok, bahasa sehari-harinya adalah bahasa Melayu, sehingga mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran yang diberikan dengan mempergunakan bahasa Belanda.

Selain sekolah negeri tersebut di atas, hanya terdapat 2 Sekolah Rendah Eropa milik swasta. Kedua-duanya terdapat di Vatavia yaitu satu khusus untuk pria yang diselenggarakan oleh Ny. Gronovius. Dibandingkan dengan sekolah negeri, kedua sekolah swasta tersebut lebih bermutu. Pada sekolah tersebut antara lain diajarkan bahasa-bahasa asing. Di samping itu masih terdapat sekolah khusus bagi anak-anak personal militer. Sekolah tersebut didirikan pada tahun 1828 dan sedikit banyak terikat dengan kehidupan garnisun. Guru-gurunya adalah anggota militer dan sekolah tersebut di kompleks zeni. Selain bahasa Belanda, pada sekolah tersebut diberikan pelajaran bahasa Melayu.⁶

2.3.2 Pendidikan Menengah dan Lanjutan (*Hogere Burger School atau HBS*)

Mengingat pada sekitar pertengahan abad ke-19 jumlah sekolah dasar semakin meningkat, sehingga sebagian besar anak-anak Eropa sudah memperoleh pendidikan dasar, Pemerintah Belanda di Indonesia berkali-kali mengajukan usul kepada

Pemerintah Kerajaan Belanda dan mencoba untuk mendirikan sekolah lanjutan bagi anak-anak golongan Eropa, khususnya Belanda. Akan tetapi sampai pertengahan abad ke-19 usaha tersebut selalu mengalami kegagalan. Setelah mengalami proses yang berlarut-larut, akhirnya Raja Belanda Willem III memberikan kuasa kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan suatu *Gymnasium* (Sekolah Menengah dengan catatan agar nama raja Belanda dipakai sebagai nama sekolah tersebut).

Dengan adanya kuasa atau wewenang dari Raja Belanda, maka pada tahun 1860 di Batavia dibuka *Gymnasium Willem III* yang merupakan sekolah lanjutan (menengah) pertama untuk anak-anak golongan Eropa dengan lama belajar 3 tahun. Kemudian pada tahun 1867 sekolah tersebut dibagi menjadi dua bagian (*afdeeling*), yakni bagian A dengan lama belajar 5 tahun dan selanjutnya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan bagian B dengan lama belajar 3 tahun dan selanjutnya dapat melanjutkan ke pendidikan perwira, pendidikan pegawai negeri atau Akademi Perdagangan dan Kerajinan di Delf Negeri Belanda. Dalam perkembangannya, akhirnya *Gymnasium Willem III* diubah namanya menjadi *Hogere Burger School* (HBS) dengan lama belajar 5 tahun.⁷

2.4 Pendidikan untuk Golongan Bumiputera

Politik pendidikan yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu tidak lain adalah hanya untuk mempersiapkan anak didik menjadi pegawai administrasi di kantor pemerintah atau di perusahaan-perusahaan Belanda. Karena itu hanya sampai pada Sekolah Dasar Eropa (ELS). Tingkat kepandaianya belum dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dari lulusan atau tamatan ELS masih diduduki oleh tenaga dari Negeri Belanda yang pendidikannya lebih tinggi dari lulusan atau tamatan ELS masih diduduki oleh tenaga dari Negeri Belanda yang pendidikannya lebih tinggi.

Selain pertimbangan itu pemerintah memperhatikan tidak lanjut dari pendidikan yang telah ada agar modernisasi di bidang pendidikan segera dapat tercapai. Perhatian pemerintah itu

didasarkan adanya beberapa usul dan desakan dari orang-orang Belanda sendiri untuk mendirikan sekolah lanjutan. Akan tetapi pelaksanaannya masih selalu mengalami kegagalan. Baru kemudian setelah Franssen van der Putte dari golongan liberal tampil di dalam pemerintah di Negeri Belanda mempunyai niat melaksanakan pendidikannya bercorak liberal.

Mulai saat itu pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengalami perluasan. Bukan hanya terbatas pada bangsa Belanda saja, tetapi juga untuk orang-orang bumiputra. Franssen van der Putte dikenal sebagai seorang tokoh liberal dan yang memperkenalkan pendidikan liberal di Indonesia, karena itu menurut pendapatnya pengajaran untuk anak-anak Bumiputera harus ada dan diperluas. Tidak hanya terbatas pada usaha mempersiapkan calon-calon pegawai pemerintah saja, tetapi seperti halnya di Nederland, sekolah-sekolah juga ditujukan untuk memajukan penduduk.

Sesungguhnya tujuan utama Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan kepada golongan bumiputera adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Sebab bila pegawai untuk administrasi pemerintah ataupun pekerja bawahan harus didatangkan dari Negeri Belanda, sudah tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Van den Bosch selaku gubernur jenderal Hindia Belanda pada waktu itu (1829--1834) merasakan bahwa tanpa bantuan penduduk bumiputera yang terdidik, pembangunan ekonomi di Hindia Belanda yang menjadi tugas utamanya tidak akan berhasil. Untuk maksud tersebut, dibukalah pendidikan untuk golongan bumiputra, agar pelaksanaan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) mendatangkan keuntungan besar sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi Negeri Belanda. Pendidikan untuk golongan bumiputra dilaksanakan melalui sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. Di Pulau Jawa bangun-bangunan sekolah Bumiputra didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Biasanya mengambil tempat di halaman kabupaten. Meskipun masih sederhana, tetapi pada umumnya bangunan-bangunannya terpelihara

karena para bupati turut memperhatikannya, sedangkan di luar Pulau Jawa keadaannya tidak memuaskan. Sejak dahulu urusan sekolah itu dibebankan kepada rakyat, tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Beberapa tempat memiliki bangunan sekolah, yang mirip sekali kepada sebuah gubug yang disusun dari dahan-dahan dan kulit kayu. Isi rencana pelajarannya terutama sekali disesuaikan dengan keharusan sekolah untuk mendidik calon-calon pegawai, karena praktek menuntut dari pegawai bumiputra penguasaan bahasa Melayu, yang ketika itu dipakai sebagai bahasa resmi, maka di sekolah di samping bahasa daerah diberikan juga bahasa Melayu. Yang jelas menunjukkan sifatnya mendidik calon-calon pegawai ialah diberikannya mata pelajaran mengukur tanah, hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan Tanam Paksa.

2.4.1 Sekolah Dasar Negeri

Sebagai langkah pertama dalam melaksanakan tujuan tersebut di atas, pada tahun 1831 Van den Bosch mengedarkan angket tentang pendirian Sekolah Dasar Negeri di tiap-tiap keresidenan. atas biaya "Persekutuan Injil", tetapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena tanggapan terhadap angket itu bertentangan dengan pokok kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang ingin bersikap netral dalam bidang yang menyangkut agama.

Setelah melalui prosedur dan pembicaraan yang berlarut-larut, akhirnya keluarlah Keputusan Raja Belanda Nomor 95 tertanggal 30 September 1848 yang memberikan wewenang kepada gubernur jenderal untuk menyediakan dana sebesar 25.000 gulden per tahun guna pendirian Sekolah Bumiputra di Pulau Jawa, dengan tujuan utama mendidik calon-calon pegawai negeri.⁸ Setahun kemudian pada tahun 1849 didirikanlah Sekolah Bumiputra pertama di Kota Jepara (Jawa Tengah) dan Pasuruan (Jawa Timur) dengan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya. Namun Gubernur Jenderal Rochussen berpendapat bahwa sebaiknya yang dijadikan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu.

Atas dasar wewenang tersebut, maka sebagai langkah pertama didirikanlah 20 buah Sekolah Dasar Negeri, masing-masing satu buah sekolah di tiap-tiap ibukota keresidenan. Berhubung Tanam Paksa terutama dilaksanakan di Pulau Jawa, maka sekolah pun mula-mula didirikan di Pulau Jawa.

Pendirian sekolah tersebut dalam praktek ternyata yang diutamakan adalah mendirikan sekolah untuk anak-anak Belanda, sedangkan sekolah untuk anak-anak bumiputra dinomorduakan. Hal ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-19.

Selanjutnya pemerintah mulai menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah pendidikan, dan menyadari ketinggalan yang perlu dikejar. Tugas pemerintah adalah merealisasi gagasan-gagasan atau tindakan-tindakan yang telah dirintis oleh Fransen Van der Putte. Hal ini diperluas lagi dengan pernyataan Menteri Bosse yang mengemukakan bahwa sudah terlalu lama pendidikan bumiputera diabaikan dan pemerintahlah yang berkewajiban memikul beban untuk mengurus perkembangan dan peradaban penduduk. Pengajaran direncanakan tidak hanya mencakup golongan bumiputera, tetapi juga rakyat pada umumnya. Dalam hal ini, metode pengajarannya dipikirkan pula dengan mengingat (1) golongan bumiputra di Jawa yang telah mendapat pengajaran pertama masih sangat kecil jumlahnya, pertimbangan kasarnya adalah satu dalam 500 penduduk, (2) pendidikan bumputra pada pelaksanaannya terhambat oleh dana yang kecil, bahkan dana tersebut dibagi-bagikan lagi ke dalam beberapa pos pendidikan, dan (3) gerakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia usianya masih muda.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah kemudian mendirikan sebuah departemen khusus untuk menangani masalah pendidikan, agama, dan industri. Dengan adanya departemen tersebut, sekolah dasar untuk bumiputra menjadi berkembang. Pada tahun 1864 tersebut meningkat jumlahnya menjadi 186 sekolah, dan pada tahun 1882 naik menjadi 152 sekolah tersebut diseluruh wilayah Hindia Belanda.

Dana sekolah pun meningkat dari 25.000 gulden (tahun 1884) menjadi 400.000 gulden (tahun 1883) untuk pulau Jawa saja. Kemudian pada tahun 1893 terjadi reorganisasi pada pendidikan dasar yang berlandaskan pada keputusan raja tanggal 28 September 1892 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 125 tahun 1893).⁹

Pada waktu itu Sekolah Dasar Bumiputra terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

(a) Sekolah Dasar Kelas Satu (*De School der Eerste Klasse*)

Sekolah ini didirikan di ibukota keresidenan, keputatian, kewedanaan atau yang sederajat, dan di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan kerajinan, atau di tempat-tempat yang dipandang perlu untuk memiliki sekolah ini. Murid-murid yang dapat diterima di sekolah ini adalah anak-anak golongan masyarakat atas, seperti anak-anak bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang bumiputera yang terhormat. Hal ini disebabkan arah sekolah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan. Lama belajar pada Sekolah Kelas Satu adalah 3 tahun, dengan bahasa pengantar mula-mula bahasa Melayu dan bahasa daerah, tetapi kemudian secara berangsur-angsur diubah menjadi bahasa Belanda.

(b) Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Schoolen der Tweede Klasse*).

Sekolah Kelas Dua didirikan di distrik-distrik atau kewedanaan-kewedanaan sehingga disebut juga Sekolah Distrik. Sekolah dibuka dengan maksud untuk memenuhi untuk kebutuhan pendidikan masyarakat umum. Dengan kata lain, sekolah tersebut disediakan bagi anak-anak bumiputra dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah.

Lama belajar pada Sekolah Dasar Kelas Dua adalah 5 tahun.

Perbedaan antara Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua dapat dilihat dari tempat atau lokasi sekolah dan asal murid yang menjadi pelajar. Dapat dilihat juga dari lama belajar, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah.

Adanya perkembangan pendidikan di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan dan usaha yang berhasil dari perjuangan Partai Liberal di Negeri Belanda. Meskipun demikian pada umumnya Kaum Liberal belum merasa puas dengan Peraturan Pemerintah 1854. Peraturan itu sama sekali tidak menyebut masalah pembiayaan untuk daerah jajahan, meskipun tampak adanya perluasan hampir di setiap kota yang biayanya tidak lebih dari yang ditentukan yaitu 25.000 gulden setahun. Dengan adanya perluasan pendidikan tersebut jelas memerlukan tenaga pengajar. Tidak mungkin pemerintah jajahan mendatangkan tenaga pengajar dari Negeri Belanda. Karena itu tenaga pengajar harus diambilkan dari anak-anak bumiputra. Pertimbangan ini dirasa perlu sekali oleh pemerintah jajahan untuk mendirikan sekolah kejuruan.¹⁰

2.4.2 Sekolah Raja (*Hoofdenschool*)

Hoofdenschool atau Sekolah Raja mula-mula didirikan di Tondano pada tahun 1865. Didirikannya Sekolah Raja itu melalui pertimbangan yang realistis demi kepentingan konsolidasi di Indonesia. Sekolah ini disediakan bagi anak-anak dari orang-orang bumiputra yang menjadi kepala daerah dan tokoh-tokoh golongan bumiputra yang menjadi kepala daerah dan tokoh-tokoh golongan bumiputra lainnya. Setelah percobaan di Tondano berhasil, maka pada tahun 1878 Sekolah Raja didirikan lagi di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan umum dengan tujuan mendidik calon-calon pegawai bumiputra demi kepentingan administrasi pemerintah Hindia Belanda. Setelah mereka selesai akan menduduki jabatan pekerjaan yang layak di kantor-kantor pemerintah. Keberhasilan itu sebenarnya berkat usaha yang aktif dari Van der Chijs yang melanjutkan gagasan van der Putte dalam rangka mengkonsolidasikan pemerintah dengan membentuk suatu pemerintahan sentralisasi. Sudah selayaknya kalau pada saat itu pemerintah jajahan membutuhkan tenaga yang cukup terdidik untuk kebutuhan administrasi. Meskipun telah ada tenaga yang terdidik dari keluaran Sekolah Raja, namun pemerintah jajahan tidak akan mengesampingkan orang-orang

Belanda atau bangsanya sendiri, yang jelas mereka tetap menduduki jabatan yang penting. Karena sekolah itu untuk tugas-tugas pemerintah, maka bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda.

Hoofdenschool atau Sekolah Raja memastikan anak-anak yang berasal dari bumiputra dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah. Dengan modal bahasa Belanda yang mereka miliki sewaktu di Sekolah Raja, mereka dapat dengan mudah melaksanakan tugas-tugas pemerintah.¹¹

2.5 Pendidikan Kejuruan

2.5.1 Sekolah Pertukangan (*Ambachtschool*)

Di negara jajahan seperti Indonesia, tenaga pendidikan untuk sekolah kejuruan sangat dibutuhkan sekali. Baik mereka itu berasal dari bangsa Belanda sendiri maupun dari bangsa Indonesia. Kenyataan itu memang benar-benar dirasakan sekali oleh pemerintah jajahan. Kecuali itu dengan dibukanya perkebunan-perkebunan di Jawa sangat besar kebutuhan tenaga terdidik. Demikian pula timbulnya pabrik-pabrik seperti pabrik gula dan lain sebagainya, kebutuhan tenaga untuk melayani dan menjaga besar sekali. Untuk itulah, maka pemerintah akhirnya juga mendirikan sekolah-sekolah kejuruan.

Sekolah kejuruan pertama di Hindia Belanda diusahakan atas prakarsa pihak swasta, yaitu Sekolah Pertukangan yang dibuka pada tahun 1856 di Batavia. Sekolah ini merupakan sekolah Kristen dan lebih bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan. Murid-muridnya berusia 6-15 tahun. Tujuan dibukanya sekolah tersebut ialah untuk membantu golongan peranakan Indo-Belanda agar dapat mencari penghidupan yang layak. Ternyata sekolah ini hanya dapat bertahan sampai tahun 1873.

Setelah pihak swasta (*zending*) merintis pembukaan sekolah pertukangan, tahun 1860 pemerintah membuka sekolah pertukangan di Surabaya, tetapi sekolah pertukangan milik pemerintah ini pun mengalami nasib yang sama seperti sekolah pertukangan swasta, yaitu tidak dapat bertahan lama. Hal

ini mungkin disebabkan oleh karena sedikitnya biaya pengolahan sekolah atau minat dari pada murid-murid. Tahun 1886 dicoba lagi untuk membuka sekolah pertukangan di Batavia, tetapi ternyata tidak dapat berjalan lancar meskipun kepada murid-murid diberikan uang harian dari subsidi pemerintah.

Ketika industri gula di Jawa Timur berkembang dengan pesat, dirasakan sekali kebutuhan akan tenaga tukang yang terdidik. Mengingat hal itu, maka pada tahun 1877 dibuka kursus pertukangan malam hari yang dikaitkan dengan HBS di Surabaya. Mula-mula kursus ini lamanya 2 tahun. Pada tahun 1885 lama kursus diperpanjang menjadi 3 tahun dan dilepaskan dari HBS sehingga menjadi sekolah yang berdiri sendiri. Sesudah diadakan reorganisasi pada tahun 1894, lama belajarnya diperpanjang lagi menjadi 4 tahun dan diarahkan untuk dapat mengikuti ujian akhir dalam jurusan pengairan, pekerjaan umum, kadaster (pengukuran tanah), dan mesin. Sekolah ini mula-mula hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, tetapi kemudian anak-anak bumiputra diperkenankan untuk memasukinya. Sebenarnya, sebelum sekolah pertukangan tersebut di atas dibuka, bagi anak-anak Indo-Belanda telah didirikan semacam sekolah pertukangan yang diarahkan untuk keperluan militer. Pada tahun 1854 di Kedung Kebo (Gombang) telah dibuka *Pupillenkorps* untuk mendidik anak-anak ke arah fungsi teknis militer praktis dan dilatih di bengkel-bengkel senjata agar mereka menguasai masalah persenjataan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan Barat yang diselenggarakan di Hindia Belanda pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu memperkuat dominasi Belanda di tanah jajahannya. Perlu disebutkan di sini, bahwa sekolah pertukangan pertama untuk golongan bumiputra juga dibuka oleh pihak swasta (*zending*) di Tanawangko (Minahasa) pada tahun 1881. Dalam pelaksanaannya sekolah tersebut dikaitkan dengan Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*), dan memberikan pelajaran menganyam, pertukangan kayu, seni ukir dan lain-lain.¹²

2.5.2 Sekolah Pendidikan Guru (*Hollands Inlandsche Kweekschool*)

Sekolah Pendidikan Guru pertama didirikan di Hindia Belanda diselenggarakan oleh pihak swasta (*zending*), dimaksudkan sebagai persiapan untuk mendirikan sekolah-sekolah Bumi-putra. Didirikan di Ambon tahun 1834 dan dapat memenuhi kebutuhan guru bumiputra bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Sekolah semacam itu juga didirikan di Minahasa pada tahun 1852 baik di Ambon maupun di Minahasa, bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Sebagai kelanjutan dari keputusan Raja tanggal 30 September 1848 tentang pembukaan Sekolah Dasar Negeri, maka untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah-sekolah dasar, tahun 1852 dibuka Sekolah Pendidikan Guru di Surakarta. Sesudah itu berturut-turut didirikan sekolah sejenis di Bukittinggi (1856), di Tapanuli (1864), di Tondano (1873), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makasar (1876), Padangsidempuan (1879). Jenis Sekolah ini mengalami pasang surut. Karena adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, maka beberapa sekolah ditutup dengan alasan penghematan keuangan negara. Sekolah yang ditutup yaitu yang di Magelang dan Tondano (1885), Padangsidempuan (1891), Banjarmasin (1893) dan Makasar (1895). Semula bahasa pengantar pada Sekolah Pendidikan Guru adalah bahasa Melayu, namun sejak tahun 1865 bahasa Belanda mulai diajarkan, dan pada tahun 1871 bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah tersebut.

2.6 Sekolah Dokter

Masalah kesehatan di Indonesia mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Pemberantasan penyakit sangat perlu untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk orang-orang Eropa sendiri. Langkah untuk menuju ke arah pendidikan kedokteran sebenarnya sudah dimulai sejak permulaan abad ke-19. Pada tahun 1811 beberapa orang bumiputra dilatih untuk menjadi "juru cacar" dan mereka dididik oleh para "penilik vaksinasi". Pendidikan ini dilakukan secara intensif mengingat penyakit

cacar merupakan penyakit yang banyak diderita oleh rakyat Indonesia. Menjelang pertengahan abad ke-19 lembaga pendidikan (latihan) ini diadakan secara reguler. Atas dasar Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 Januari 1849 telah diputuskan untuk mendirikan sekolah "Ahli Kesehatan" untuk diperbantukan kepada rumah sakit militer di Batavia. Sekolah tersebut dibuka pada tahun 1851 dan dimulai dengan 13 murid. Pendidikan "juru cacar" yang semula 1 tahun lama belajarnya, diperpanjang menjadi 2 tahun dengan penambahan beberapa mata pelajaran sehingga para lulusannya dapat mengenal penyakit-penyakit yang banyak terdapat di Indonesia dan dapat melakukan pembedahan ringan serta merawat penyakit seperlunya. Sesudah dididik selama 2 tahun, para siswa diuji oleh panitia yang terdiri dari dokter dan apoteker militer dan kalau lulus mendapat gelar "Dokter Jawa". Pada tahun 1864 lama belajarnya diperpanjang lagi menjadi 5 atau 6 tahun. Selama itu pelajaran diberikan dalam bahasa Melayu dan sejak tahun 1875 diberikan dalam bahasa Belanda. Untuk murid-murid yang berasal dari sekolah yang tidak berbahasa pengantar bahasa Belanda, diadakan pendidikan pendahuluan selama 2 sampai 3 tahun khusus untuk belajar bahasa Belanda. Sejak tahun 1975 gelar "Dokter Jawa" diubah namanya menjadi "Ahli Kesehatan Bumiputra atau Inlandsche Geneeskundige". Dengan adanya perubahan ini diharapkan oleh pemerintah, bahwa yang telah berhasil lulus itu akan lebih sesuai dengan perkembangan profesinya sebagai seorang ahli di bidang kesehatan.¹³

1. Depdikbud, Pendidikan dari jaman ke Jaman, Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hal 41-42.
2. Edi S. Ekajati dkk, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Proyek IDKD, Depdikbud, Jakarta, 1984, hal. 36, Depdikbud, *op. cit*, hal 86-88.
3. Edi S. Ekajati, *Ibid*, hal. 36-37.
4. Suratmi dkk, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek IDKD Depdikbud, Jakarta, 1982, hal. 37-38; Edi S. Ekajati, *Ibid* hal. 51, I. Djumhur & H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, Bandung, Ilmu, 1976, hal 120.
5. Edi S. Ekajati, *Op cit*, hal. 38
6. Depdikbud, *op. cit*.hal. 90-91, Djumhur dan Dasuparta, *op. cit*. hal. 120-122
7. Edi S. Ekajati, *op. cit*, hal. 39-40.
8. Edi S. Ekajati, *Ibid*, hal. 39-41 Djumhur dan Danasuparta, *op. cit*, hal. 124.
9. Edi S. Ekajati, *Ibid*, hal. 40-41; Darsiti Suratman, Politik Pendidikan Belanda Dan Masyarakat di Jawa Tengah Pada Akhir abad 19, Seminar Sejarah Nasional II. Yogyakarta, 1970, hal. 3-5.
10. Heru Sukardi dkk, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur, Proyek IDKD, Jakarta, 1980/1981, hal. 101-102.
11. Heru Sukardi, *Ibid*, hal, 102-103.
12. Depdikbud, *op..cit*, hal. 94-95, Edi S. Ekajati, *op. cit*. hal. 43-44.
13. Depdikbut, *Ibid*, hal 97-98; Heru Sukardi, *op. cit*. hal. 108-109.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ABAD KE-20

3.1 Pendidikan dan Pengajaran Zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan penjajah. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah, mengabdikan kepada kepentingan Belanda, karena itu tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, sehingga isi pendidikan itu pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah.

Sifat pendidikan semacam itu, mulai abad ke-20 berangsur-angsur berubah. Hal ini antara lain sebagai akibat lahirnya Politik Etis (*Etische Politiek*) yang dikemukakan oleh Van Deventer seorang pendukung dari Van Dem, Van Kol, dan Brooschooft dari golongan sosialis yang melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia. Tahun 1899 Van Deventer menulis sebuah karangan dalam majalah *De Gids* yang berjudul "Hutang Kehormatan". Dalam tulisan itu antara lain Van Deventer menyatakan bahwa dari hasil panen yang sangat berharga melalui Tanam Paksa, Negeri Belanda memperoleh keuntungan berjuta-juta gulden. Antara tahun 1867 sampai

1878 keuntungan yang telah diperoleh tidak kurang dari 187 gulden. Hal ini merupakan hutang Belanda terhadap rakyat Indonesia yang perlu dikembalikan, sekalipun dalam bentuk lain, karena hal itu merupakan hutang kehormatan. Anjuran Van Deventer itu kemudian terkenal dengan "Trilogi Van Deventer" yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Akhirnya Politik Etis mulai dijalankan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden. Politik Etis telah mengubah pandangan dalam politik kolonial sehingga Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan, tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan untuk dapat memenuhi keperluannya serta adanya peningkatan budaya rakyat.

Gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern bagi penduduk bumiputra antara lain dicetuskan oleh kaum reformer kolonialis Belanda yang diwakili oleh Snouck Hurgronje, seorang ahli agama Islam dan penasihat urusan bumiputra, khususnya anak-anak lapisan atas, sehingga Pemerintah Belanda dapat mempertahankan kolonialisnya di Hindia Belanda. Dengan memberikan pendidikan tersebut akan terjalinlah hubungan akrab antara pemerintah jajahan di bidang spiritual, intelektual, politik dengan golongan atas masyarakat Bumiputera Indonesia. Pertimbangan lain, mereka dapat diberikan kedudukan dalam Pemerintah Hindia Belanda dengan gaji yang lebih rendah daripada orang-orang Belanda sendiri, mengingat taraf hidupnya yang masih rendah.

Pendapat umum orang Eropa menyatakan bahwa pemerintah kolonial seharusnya menyelenggarakan pendidikan yang betul-betul diperlukan bumiputra. Mengingat sebagian besar orang Indonesia masih hidup tergantung pada pertanian, maka didasarkan perlunya pendidikan yang hanya bersifat sederhana untuk orang bumiputra tanpa memberikan pelajaran bahasa Belanda, ilmu pengetahuan modern dan sejarah.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah mendasarkan kebijaksanaan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

- (1) Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputra. Untuk itu

bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

- (2) Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan serta persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui 2 jalur. Di satu pihak diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi, dan di lain pihak terpenuhi tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Tujuan pendidikan selama periode kolonial tidak pernah dinyatakan secara tegas. Tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh untuk kepentingan kaum modal Belanda. Dengan demikian penduduk setempat dididik untuk menjadi buruh-buruh tingkat rendah (buruh kasar). Ada juga sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lain yang diangkat sebagai pekerja kelas dua atau kelas tiga.¹

Dalam rangka perbaikan pengajaran rendah bagi bumiputra, Gubernur Jenderal Van Heutz pada tahun 1907 antara lain mengambil tindakan penting, yaitu memberikan corak dan sifat kebelanda-belandaan pada Sekolah Kelas Satu.

Pada sekolah-sekolah kelas satu, bahasa Belanda mendapat perhatian penting di samping mata pelajaran yang lain, karena dengan berbahasa Belanda akan memudahkan komunikasi dan juga memahami kehendak Pemerintah Belanda, Bahasa Belanda diberikan sejak kelas 3 sampai kelas 5 bahkan dalam perkembangannya, setelah sekolah-sekolah kelas satu menjadi 6 tahun, bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas tersebut. Kecuali sekolah kelas satu didirikan pula Sekolah Dasar.

Dalam dua dasawarda pertama setelah tahun 1900, pendidikan dasar di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya. Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem yang umum bagi sekalian banyak golongan penduduk yang ber-

aneka ragam coraknya. Secara umum sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (klas) sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu.

3.1.1 Pendidikan Sekolah Dasar

3.1.1.1 Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda

3.1.1.1.1 Sekolah Rendah Eropa (*Europeesche Lagere School* atau ELS)

Sekolah ini merupakan sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa, anak-anak keturunan Timur, dan anak-anak Bumiputra dari golongan priyayi atau elite. Lama sekolah 7 tahun dan mulai berdiri pada tahun 1818. Nama *Europeesche Lagere School* sendiri baru dipakai pada tahun 1902 sebagai pengganti nama *Lager Onderwijs en Lagere Scholen voor Europeanen*. Pada tahun 1820 jumlah sekolah ELS ada 7 buah di Hindia Belanda, tahun 1845 menjadi 24 buah, tahun 1868 menjadi 68 buah, tahun 1883 menjadi 129 buah, dan pada tahun 1898 menjadi 191 buah, dan pada tahun 1917 menjadi 198 buah.

Sebelum masuk ELS ada Sekolah Taman Kanak-Kanak (Frobel). Di samping itu juga ada sekolah persiapan masuk ELS bagi anak-anak yang bukan Eropa, agar anak-anak itu mendapat latihan berbicara bahasa Belanda sehingga pada saat masuk ELS mereka sudah mampu mengikuti kelas satu ELS yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Anak-anak bumiputra dapat memasuki salah satu di antara dua tersebut di atas yaitu masuk Taman Kanak-Kanak dahulu atau masuk sekolah persiapan ELS.

Batas usia masuk ELS antara 6--16 tahun, tetapi khusus untuk anak-anak Eropa dan anak-anak dari perkawinan campuran wanita Eropa dengan laki-laki bumiputra dapat masuk ELS sebelum usia 6 tahun, sedangkan anak-anak bumiputra yang akan menjadi murid ELS harus cukup usianya dan diseleksi. Untuk menyusun organisasi pengajaran yang cukup memuaskan

kedua belah pihak tidak mungkin tercapai. Bagi anak-anak yang bukan Eropa selalu kurang diperhatikan kebutuhannya pendidikan, sedangkan anak-anak Eropa lebih diberi perhatian untuk mendapat kesempatan belajar lebih baik. Hal ini tidak hanya berlaku bagi sekolah dan ciri sekolahnya, tetapi juga masa belajarnya lebih singkat dan guru-gurunya dipilih yang lebih bermutu.²

3.1.1.1.2 *Inlandsche School (HIS)*

Sekolah ini memberi kesempatan bagi anak-anak bumiputra untuk masuk sekolah rendah klas satu yang juga dimasuki oleh anak-anak Belanda. Adanya pembagian Sekolah Rendah Kelas Satu dengan Sekolah Rendah Klas Dua berlaku sejak tahun 1893 (*Indische Staatsblaad No. 125*). Terutama sekolah ini dimasuki oleh anak-anak Kepala Pemerintah Bumiputra dan anak-anak Bumiputra lainnya dari lapisan atas masyarakat bumiputra. Dibandingkan dengan Sekolah Bumiputra Klas Dua, sekolah ini jam belajarnya lebih lama, bahan pelajarannya lebih luas, dan guru-gurunya dipilih yang lebih baik kemampuan mengajarnya.

Pada tahun 1914 HIS direorganisasi menjadi sekolah yang setingkat dengan ELS agar mudah untuk melanjutkan ke MULO dan persiapan masuk lembaga pendidikan berbagai macam jurusan. Sekolah ini merupakan sekolah istimewa bagi masyarakat Bumiputera yang ingin mendapatkan pendidikan seperti Sekolah Rendah Eropa; karena perlengkapan sekolah seperti perpustakaan dan tempat olah raga juga tersedia. Di sekolah HIS juga diajarkan bahasa Daerah dan bahasa Melayu.

3.1.1.2 *Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Daerah.*

3.1.1.2.1 *Sekolah Bumiputra (Inlandscheschool) Klas Dua*

Sekolah Klas Dua ini lama belajarnya 5 tahun dan disediakan untuk anak-anak bumiputra golongan menengah. Dengan demikian bagi anak-anak bumiputra golongan menengah ini terbuka dua jenis sekolah, yakni Sekolah Klas Dua dan HIS.

3.2.1.2.2 *Sekolah Desa (Volksschool) atau Sekolah Rakyat*

Sekolah Desa didirikan tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh gubernemen akan tetapi diselenggarakan oleh desa. Guru-gurunya bukan pegawai gubernemen, melainkan pegawai desa. Karena sekolah ini yang menyelenggarakan desa, maka perkembangannya sangat lambat. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk desa di Indonesia miskin dan belum begitu tertarik pada pendidikan.

Setelah tahun 1920 pemerintah kolonial memutuskan untuk memberikan bantuan (subsidi) lebih banyak kepada Sekolah Desa, sehingga situasi pendidikan mulai menjadi baik. Namun demikian hal itu tidak berlangsung lama, sebab pada tahun 1930 dana bantuan untuk Sekolah Desa menjadi berkurang dengan adanya depresi ekonomi. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan keengganan pemerintah kolonial untuk menyediakan dana yang cukup bagi pendidikan bumiputra kurang membawa hasil terhadap penambahan sekolah dalam menunjang program pendidikan. Misalnya Sekolah Desa, pada hakekatnya dimaksudkan untuk menghasilkan kaum tani dan kaum buruh yang terpelajar. Untuk sebagian besar orang tua bumiputra dari kalangan rendah tidak menghendaki anak-anaknya pergi ke sekolah dan lebih baik mereka membantu orang tua bekerja di sawah atau di rumah. Hal ini merupakan tradisi kehidupan sosial ekonomi bumiputra kalangan rendah. Faktor lainnya, bahwa Sekolah Desa tidak sesuai dengan gaya hidup pedesaan. Mereka berlibur sendiri dan tidak bersekolah jika mereka sedang diperlukan menuai padi di sawah, atau jika ada pesta perkawinan maupun keagamaan di rumah. Banyak anak-anak yang jarang masuk sekolah bahkan ke luar dari sekolah sebelum tamat belajar. Hal ini tentu mengurangi efisiensi sistem pendidikan Sekolah Desa.

Sekolah Desa merupakan sekolah baru yang berbeda dengan Pesantren yang sudah dikenal di mana-mana. Sekolah Desa kurang berhasil menjadi tempat pendidikan kecuali beberapa sekolah yang memiliki guru yang berpengaruh. Di samping itu kalau sekolah juga ditambah dengan fasilitas yang cocok dengan

kehidupan desa, antara lain gedung sekolah desa diberi bentuk seperti Pendopo agar suasana pedesaan dapat membantu kerasannya anak-anak belajar. Di belakang pendopo dibuat bangunan dalam yang dipakai sebagai rumah guru, seperti halnya Pesantren, di mana gedung sekolah dan rumah guru menjadi satu, karena itu disenangi anak-anak dan masyarakat untuk tempat pendidikan.³

3.1.1.2.3 Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*)

Sekolah ini dibuka pada tahun yang bersamaan dengan tahun pendirian HIS yaitu tahun 1914, dan merupakan sekolah lanjutan dari Sekolah Desa (*Volkschool*). Lama belajarnya 3 tahun dan disediakan untuk murid-murid Sekolah Desa yang berprestasi baik.

3.1.1.2.4 Sekolah Peralihan (*Schakelschool*)

Disebut Sekolah Peralihan karena memang sekolah tersebut merupakan peralihan dari Sekolah Desa 3 tahun (*Volkschool*) yang berbahasa pengantar bahasa daerah ke Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar Belanda, dengan lama belajar 5 tahun. *Schakelschool* dapat menampung murid-murid tamatan *Vervolgschool*. Bagi mereka yang pandai dapat memasuki sekolah ini.⁴

3.1.2 Pendidikan Menengah Umum

3.1.2.1 MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)

dalam tahun 1914 dibuka kesempatan bagi para tamatan Sekolah Rendah untuk melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah umum yaitu sekolah yang disebut MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dengan masa belajar 3 tahun atau dapat juga menjadi 4 tahun apabila melalui *voorklas* atau kelas pendahulu. Sesungguhnya MULO adalah sebagai lanjutan dari pelajaran Sekolah Rendah Belanda. Karena itu sejak tahun berdirinya, sekolah MULO sudah dapat diselenggarakan di beberapa kota

secara serempak. Tetapi dalam tahun-tahun permulaan MULO hanya dikunjungi oleh murid-murid Belanda, karena HIS atau Sekolah Rendah 7 tahun untuk bumiputra baru didirikan dalam tahun 1914, dan baru menghasilkan tamatannya yang pertama dalam tahun 1915.

Pendidikan lanjutan umum sesudah sekolah rendah pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada, akan tetapi selalu disatukan dengan Sekolah Kejuruan. Di antaranya OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*), STOVIA (*School toot Opleiding Voor Inlandsche Artsen*), *Rechtschool* (Sekolah Kehakiman) dan *Kweekschool* (Sekolah Guru) sedangkan MULO adalah sekolah umum yang berdiri sendiri, jadi serupa dengan Sekolah Menengah Pertama sekarang.

Jumlah sekolah MULO pada waktu itu masih sangat terbatas. Pada tahun 1917 sekolah MULO baru terdapat di Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Padang, dan Makasar.

3.1.2.2 AMS (*Algemene Middelbare School*)

Berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda 16 Januari 1919, pada tahun itu juga telah diadakan persiapan tarakhir untuk membuka sekolah AMS sebagai lanjutan MULO. Sekolah ini juga merupakan persiapan untuk keperguruan tinggi dengan lama pendidikan 3 tahun, jadi serupa dengan Sekolah Menengah Atas sekarang.

AMS pertama kali dibuka di Indonesia ialah di Yogyakarta pada 5 Juli 1919 dengan nama *AMS Afdeling B* (bagian Ilmu Pasti dan Alam). Kemudian pada tahun 1920 dibuka di Bandung *AMS Wesres Klassieke Afdeling*. Tahun 1926 dibuka *AMS Afdeling B* di Jakarta, dan di Malang.

Sampai pecah Perang Dunia II kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bidang pendidikan sangat lambat khususnya untuk lanjutan tingkat atas di Indonesia. Meskipun sekolah AMS sudah berlangsung selama 20 tahun, tetapi di seluruh Indonesia baru ada 5 buah *AMS* negeri yang lengkap, yakni di Sura-

baya (Afdeling B), di Jakarta (Afdeling B), di Semarang (Afdeling B), dan di Yogyakarta (AMS A-II dan AMS Afdeling B).

Pada 22 Agustus 1936 oleh direktur. *Departemen Van Onderwijs en Eredienst* diterbitkan pembaharuan surat keputusan mengenai peraturan AMS yang menyatakan bahwa tujuan AMS adalah memberi pendidikan tingkat menengah dan persiapan untuk tinggi.

3.1.2.3 *Hogere Burger School (HBS)*

Hogere Burger School atau HBS adalah sama dengan SMA sekarang, khususnya untuk masyarakat kolonial Belanda di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Mata pelajaran serta ijazahnya sama dengan sekolah HBS di Negeri Belanda.

Berbeda dengan sekolah menengah lainnya seperti MULO, AMS yang khusus untuk murid-murid bumiputra, HBS murid-muridnya khusus untuk anak-anak Belanda. Dengan maksud agar kalau orang tuanya kembali ke Negeri Belanda, anak-anaknya otomatis dapat meneruskan pelajaran dan pendidikannya ke dalam sistem pendidikan di Negeri Belanda. Sebagian besar murid-muridnya adalah pemuda-pemudi Belanda asli tetapi ada juga segolongan kecil atau ke sekolah HBS boleh dikatakan tergolong suatu perkecualian, yaitu mereka yang dianggap luar biasa baik oleh masyarakat kolonial Belanda maupun oleh masyarakat bumiputra sendiri.

Sekitar tahun 1930 kota-kota yang ada HBSnya yaitu Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, dan Jakarta.⁵

3.1.3 *Pendidikan Kejuruan*

Sekolah lanjutan tingkat atas kejuruan pada waktu itu mengalami pembinaan cukup baik, terbukti dengan banyaknya sekolah kejuruan yang terutama di Pulau Jawa. Hal ini terjadi sebagai akibat pelaksanaan Politik Etis, di mana Pemerintah Hindia Belanda banyak mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan terutama pendidikan kejuruan.

Pada tahun 1904 diadakan percobaan dengan membuka Sekolah Kerajinan Rumah, yang memberikan pelajaran mengukir dan menganyam. Sekolah itu berada di bawah pimpinan Bupati Ngawi RMT. Utoyo. Ketika itu sudah ada beberapa sekolah pertukangan yang didirikan oleh zending. Didesak oleh majunya perindustrian bangsa Erpa yang banyak membutuhkan tukang-tukang yang berpendidikan, maka pada tahun 1909 pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka 3 sekolah pertukangan di Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Pengajaran pertukangan itu mempunyai dua macam tujuan, yakni membentuk tukang-tukang biasa dan membentuk tukang-tukang yang dapat mengisi jabatan-jabatan rendah yang mempunyai tugas mengawasi, seperti masinis, montir, dan lain-lain. Untuk golongan pertama diadakan pendidikan dua tahun lamanya, dan yang diterima sebagai murid-muridnya adalah mereka yang telah tamat dari Sekolah Klas Dua. Pada sekolah itu ada dua bagian, yaitu bagian kayu dan bagian besi. Pendidikan yang dua tahun itu diikuti oleh kursus sambung selama setahun untuk vak-vak khusus seperti montir mobil, tukang listrik, tukang kayu, dan tukang batu, sedangkan untuk golongan kedua diadakan sekolah-sekolah pertukangan yang lamanya 3 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi mereka yang telah mengikuti pengajaran rendah Barat (Belanda) sampai tamat.

Karena semua murid-murid tidak mendapat pendidikan untuk berdiri sendiri, maka tamatan sekolah ini tidak ada yang sanggup untuk berdiri sendiri, misalnya mendirikan perusahaan sendiri atau memperbaiki keadaan pertukangan di desa-desa, melainkan semua mencari pekerjaan pada perusahaan-perusahaan orang Eropa.

3.1.3.1 Sekolah Teknik

Pengajaran teknik diadakan karena pada permulaan abad ke-20 perusahaan teknik dan industri makin diperluas, karena itu maka pada tahun 1906 di Jakarta didirikan *Koningin Wilhelmina School* atau KWS yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian HBS 3 tahun dan bagian teknik. Kemudian pada ta-

hun 1911 bagian HBS dapat berdiri sendiri, sehingga KWS itu menjadi sekolah teknik yang pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1912 di Surabaya didirikan sekolah semacam itu dengan nama *Koningin Emma School*. Kedua sekolah itu mempunyai kursus 5 tahun dan sederajat dengan HBS 5 tahun. Sekolah itu mempunyai beberapa jurusan yakni ilmu bangunan, ilmu pesawat dan teknik listrik.

3.1.3.2 *Pengajaran Perniagaan*

Pengajaran perniagaan hanya terbatas pada 3 jenis sekolah saja yang tidak tersebar luas, yakni:

(1) Sekolah-sekolah Malam

Sekolah ini didirikan pada tahun 1914 di Surabaya bagi mereka yang menamakan HBS tahun atau yang sederajat. pada tahun 1926 ditambah satu lagi di Jakarta.

(2) Sekolah-sekolah Dagang Rendah

Lama belajar di sekolah ini 3 tahun dan murid-muridnya berasal dari HIS atau ELS. Jumlahnya hanya dua buah di seluruh Indonesia yakni di Semarang yang didirikan tahun 1922 dan di Surabaya yang didirikan tahun 1928.

(3) Sekolah Dagang Menengah.

Sekolah ini mulai dibuka di Jakarta pada tahun 1935. Yang dapat diterima di sekolah ini hanyalah lulusan MULO.

3.1.3.3 *Pengajaran Pertanian*

Pada tahun 1911 di Bogor didirikan *Cultuurschool*. Lama belajar di sekolah ini 3 tahun, dan yang dapat diterima di sekolah ini adalah mereka yang telah menamatkan pengajaran rendah Barat. Sekolah ini mempunyai dua jurusan, yakni jurusan pertanian dan jurusan kehutanan.

3.1.4 *Sekolah Hakim Tinggi*

Sekolah Hakim Tinggi atau *Rechtskundige Hooge School* (RHS) didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Lama belajarnya 5

tahun. Sebelum RHS didirikan sudah ada sebuah sekolah yang mendidik ahli-ahli hukum bangsa Indonesia. Sekolah itu dinamakan *Rechtsschool* (Sekolah Hakim) yang didirikan pada tahun 1909 di Jakarta. *Rechtchool* itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian persiapan dan bagian pendidikan kejurusan, yang masing-masing lamana 3 tahun. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Tamatan dari sekolah ini dijadikan jaksa atau hakim pada pengadilan, namun mereka belum bergelar sarjana hukum. Sekolah ini merupakan persiapan untuk membuka RH'.

3.2 Pendidikan dan Pengajaran Zaman Pergerakan Nasional

Timbulnya perasaan nasional, bahwa masa depan untuk kemerdekaan Indonesia telah berada di ambang pintu dengan bayangan yang demikian itu maka timbul perasaan bahwa mereka yang telah sadar harus tampil ke depan. Maka lahirlah pergerakan-pergerakan kebangsaan dan keagamaan sebagai alat perjuangan mencapai kemerdekaan. Perasaan nasional yang telah ada pada dada menjadi milik bangsa Indonesia berkobar dengan hebatnya. Bentuk semangat yang menyala-nyala itu terwujud dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Timbulnya organisasi yang disertai dengan perasaan murni menimbulkan perkembangan baru di lapangan pendidikan dan pengajaran.

Motivasi yang menimbulkan pendidikan pergerakan nasional adalah:

- (1) Motivasi nasional yaitu adanya sistem pendidikan kolonial yang tidak diperuntukkan semua anak pribumi Indonesia, tetapi terbatas pada anak pribumi golongan elit dan anak pribumi yang dicalonkan menjadi pegawai pemerintah kolonial. Justru menimbulkan rasa tidak puas dan berusaha menciptakan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia.
- (2) Adanya sistem pendidikan kolonial yang intelektualistis dan individualistis. Kurang memperhatikan keterampilan

dan kepentingan hidup bersama, apa lagi yang diperlukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia adalah pendidikan untuk anak-anak petani dan buruh yang nantinya dapat mengabdikan untuk kepentingan masyarakat.

- (3) Adanya diskriminasi pendidikan yang membedakan sekolah untuk anak-anak Belanda dan kulit putih lainnya yang serba cukup, sedangkan sekolah untuk anak-anak pribumi kurang memadai dan terbatas jumlahnya, misalnya *ELS*, *HIS* dan *Volkschool*.
- (5) Perlawanan politik yang kurang berhasil menimbulkan perlawanan lewat pendidikan untuk menanamkan benih-benih nasional kepada murid-murid pribumi yang nantinya akan menggantikan pemimpin-pemimpin politik yang sudah ada, misalnya dirikannya Taman Siswa oleh Ki Hadjar Dewantara.⁶

Para pemimpin pergerakan nasional dengan sadar ingin mengubah keadaan yang kurang tepat. Mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam program perjuangannya, karena itu kemudian lahir sekolah-sekolah patikelir atas usaha perintis-perintis kemerdekaan.

Sekolah-sekolah itu mula-mula mempunyai dua corak, yaitu sesuai dengan haluan politik dan sesuai dengan tuntutan agama (Islam). Termasuk ke dalam golongan satu antara lain adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta, sedangkan yang termasuk golongan dua adalah sekolah-sekolah Serikat Islam, sekolah-sekolah Muhammadiyah, Sumatera Tawalib, sekolah-sekolah Nahdatul Ulama, dan sekolah-sekolah Persatuan Ummat Islam.

Di samping kedua golongan sekolah tersebut di atas, banyak pula sekolah-sekolah partikelir yang tidak mempunyai corak apa-apa. Sekolah-sekolah itu mempunyai rencana pelajaran yang tidak berbeda dengan rencana pelajaran sekolah-sekolah pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah dari golongan ketiga ini didirikan sekedar untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan pengajaran.

3.2.1 Kelembagaan

3.2.1.1 Taman Siswa

Taman siswa adalah suatu Lembaga Perguruan Kebangsaan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada 3 Juli 1922, Pada mulanya bernama *National Onderwijs Instituut Taman Siswa*.

Sesuai dengan sifat pendidikannya, kultural nasional, Taman Siswa berbentuk perguruan; tempat berguru, tempat murid-murid mendapat pendidikan dan pula tempat kediaman guru. Dengan demikian gedung perguruan tidak hanya dipergunakan untuk keperluan mengajar, melainkan juga tempat anak-anak berkumpul dengan gurunya setelah berguru sehingga terjalinlah hubungan batin antara yang mendidik dengan yang dididik. Rasa kekeluargaan meresap. Dengan pergaulan itu diharapkan agar kehidupan guru selalu menunjukkan sifat perbuatan yang dapat diteladani oleh para murid.

Sebagai perguruan yang lahir di alam penjajahan, sudah selayaknya dalam perjuangannya menemui rintangan yang tidak sedikit. Namun demikian berkat keuletan dan dedikasi yang tinggi dari para pamongnya, semua rintangan itu dapat diatasinya. Berbagai rintangan dalam masa perjuangannya antara lain adalah:

- (1) Pada tahun 1924 Taman Siswa dikenakan pajak rumah tangga, namun Ki Hadjar Dewantara tetap menolaknya karena hal itu tidak sesuai dengan keadaan keluarganya yang hanya menempati dua kamar di tengah-tengah perguruan. Menurut pendapatnya tidak semestinya ia dan keluarganya dikenakan pajak rumah tangga, sedangkan barang-barang lain adalah milik Perguruan Taman Siswa yang bebas dari pajak. Karena menolak untuk membayar pajak rumah tangga, akhirnya barang-barang milik Perguruan Taman Siswa dilelang di muka umum. Ki Hadjar Dewantara mengajukan protes. Akhirnya, karena kecintaan para pembeli, barang-barang yang terlelang itu pun diserahkan kembali kepada Perguruan Taman Siswa.

- (2) Rintangan berikutnya berupa *Sonderwijs Ordonnantie* bagi sekolah partikelir atau lebih dikenal dengan nama Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Schoolen Ordonantie*) yang muncul pada 17 September 1932. Isi ordonansi itu ialah (a) pendirian sekolah partikelir termasuk Taman Siswa harus minta izin kepada Pemerintah Hindia Belanda, (b) bagi guru-guru sekolah partikelir, sebelum mengajar terlebih dahulu harus memiliki izin mengajar dari Pemerintah Hindia Belanda, dan (c) isi pelajaran harus sesuai dengan Sekolah Negeri tidak boleh melanggarnya.

Ki Hadjar Dewantara menentangnya, karena isi ordonansi itu dianggap melampaui batas. Untuk itu Ki Hadjar Dewantara itu segera mengirimkan surat protes kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sementara itu, sikap berani dari Ki Hadjar Dewantara ternyata mendapat sambutan dari partai-partai politik dan surat kabar-surat kabar yang kemudian memperjuangkannya di dalam *Volksraad*. Akhirnya pada tahun 1935. Ordonansi Sekolah Liar dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

- (3) Pada tahun 1935 Perguruan Taman Siswa mendapat cobaan lagi. Kali ini Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah yang menyangkut hak atas tunjangan. Tunjangan hanya diberikan kepada pegawai negeri yang anaknya bersekolah pada sekolah negeri, sekolah partikelir yang mendapatkan subsidi dan yang berhak memakai salah satu nama seperti sekolah negeri, misalnya *HIS*, *Volkschool* dan lain-lain. Atas perjuangan Ki Hadjar Dewantara, maka mulai tahun 1938 semua pegawai negeri yang menyekolahkan anaknya, baik di sekolah negeri, bersubsidi maupun di sekolah partikelir mempunyai hak yang sama atas tunjangan anak.
- (4) Selain itu, pada tahun 1935 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan mengenai pajak upah. Ki Hadjar Dewantara menolak dengan tegas, karena dalam Taman Siswa tidak ada majikan dan buruh, tetapi semuanya berdasarkan atas kekeluargaan. Atas perjuangan Ki Hadjar

Dewantara, akhirnya mulai tahun 1940 guru-guru Taman Siswa dibebaskan dari pajak upah.

Sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa meliputi:

- (1) Taman Indriya (Taman Kanak-kanak) bagi anak-anak yang berumur 5--6 tahun,
- (2) Taman Anak (Kelas 1--III Sekolah Dasar) bagi anak-anak yang berumur 6--10 tahun),
- (3) Taman Muda (Kelas IV--VI Sekolah Dasar) bagi anak-anak yang berumur 10--13 tahun,
- (4) Taman Dewasa (Sekolah Menengah Pertama),
- (5) Taman Madya (Sekolah Menengah Atas), dan
- (6) Pendidikan Guru yang terdiri atas: (a) Taman Guru BI untuk menyiapkan calon guru Taman Anak dan Taman Muda (1 tahun sesudah Taman Dewasa), (b) Taman Guru B II (1 tahun sesudah Taman Guru B I), (c) Taman Guru B III (1 tahun sesudah Taman Guru B II), menyiapkan calon Guru Taman Dewasa. Pada Taman Guru B III diadakan penjurusan yaitu: Bagian A (Alam/Pasti) bagi mereka yang akan mengajar Bagian B (Budaya) bagi mereka yang akan memberi pelajaran bahasa, sejarah, dan lain-lain. (d) Taman Guru Indriya, khusus bagi gadi-sgadis tamatan Taman Dewasa atau Sekolah Lanjutan lainnya (Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Kepandaian Putri), yang ingin menjadi Guru pada bagian Taman Indriya yang lama belajarnya 2 tahun.

Pada akhir zaman penjajahan Belanda, Perguruan Taman siswa telah mempunyai 199 cabang dengan 207 perguruan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih-kurang 20.000 orang murid dan 650 orang Guru.⁷

3.2.1.2 Muhammadiyah

Perkumpulan Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkumpulan Muhammadiyah dapat dianggap sebagai pelopor

pembaharuan pengajaran agama di Indonesia, karena perkumpulan itu berusaha mengembalikan ajaran agama Islam kepada sumberdnya ialah *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Itulah sebabnya, maka tujuan perkumpulan ini adalah meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern, serta memperkuat keyakinan tentang agama Islam, sehingga terujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Untuk mencapai tujuan itu Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di bawah pimpinan Majelis Pengajaran. Sekolah-sekolah itu di samping mengajarkan pendidikan agama Islam, juga memberikan mata pelajaran-mata pelajaran seperti di sekolah-sekolah pemerintah. Usaha-usaha lain adalah memperluas pengajian-pengajian, menyebarkan bacaan agama, mendirikan mesjid-mesjid, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren dan lain-lain.

Muhammadiyah sebagai organisasi pendidikan dan sosial memperluas gerakannya dalam lapangan-lapangan lain, misalnya mendirikan rumah-rumah yatim-piatu (di bawah asuhan PKU), Majelis Pembinaan Kesejahteraan Ummat), rumah sakit-rumah sakit, poliklinik-poliklinik untuk memelihara kesehatan rkyat. Selain itu didirikan bagian wanita (Aisyiah), bagian putri (Nasyiatul Aisyiah), bagian pemuda (pemuda Muhammadiyah), dan kepanduan (Hizbul Wathon).

Karena rencana pelajaran sekolah-sekolah Muhammadiyah sesuai dengan *stelsel* pengajaran Pemerintah Hindia Belanda maka banyak sekolah-sekolahnya yang mendapat subsidi dari pemerintah kolonial. Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai bagian-bagian sekolah, yaitu: Taman kanak-kanak (Busthanul Aftal) atau *Inhemse MULO* Sekolah Kelas II atau *Normalschool*), Sekolah *Schaakel* atau *Kweekschool*, HIS atau HIK, dan MULO atau AMS. Sedangkan sekolah agamanya meliputi: Ibtidaiyah (Sekolah Dasar dengan dasar Islam), Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan dengan dasar Islam), Diniyah, yang hanya pelajaran agama, Mualimin atau Mualimat (SGB Islam), dan Kullliyaatul Mubaligin (SPG Islam).

Taman kanak-kanak Muhammadiyah lebih banyak dikenal dengan nama "bustan" dalam lingkungan masyarakat Muhammadiyah. Mula-mula didirikan di tengah-tengah Kampung Kauman Yogyakarta sekitar tahun 1924 sebagai pelaksanaan keputusan Muktamar Aisyiah yang ke-2 yang menghendaki didirikannya *Frobelschool*. Sekolah yang didirikan oleh para ibu Aisyiah ini dinamakan "Bustanul Aftal" yang berarti "kebun Kanak-kanak". Sekarang nama lengkapnya "Taman Kanak-kanak Aisyiah" Bustanul Aftal disingkat TKABA. TKABA adalah salah satu gerakan Aisyiah dalam bidang pendidikan yang bermaksud akan mendasari pertumbuhan dengan pendidikan agama Islam.

Pada tingkat Taman Kanak-kanak ini ajaran *Tauhid* mulai ditanamkan kepada anak-anak melalui pelajaran dan melalui berbagai ragam permainan. nyanyian, cerita dan lainnya sesuai dengan kurikulum Taman Kanak-kanak pada umumnya. Urusan TKABA menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan oleh Pimpinan Aisyiah Cabang Urusan Pendidikan dan Pengajaran.

Pada tingkat permulaan, langkah gerak Muhammadiyah untuk mengembangkan **Sekolah Dasar** ialah dengan meneruskan usaha pendidikan yang telah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ruang belajar yaitu dengan duduk di lantai, memakai dampar (meja kecil) sebagai mejanya. Selanjutnya dipindahkan di ruang yang lebih luas, berada di muka rumah kiai dilengkapi dengan bangku dan mejanya. Semuanya itu diselenggarakan atas bantuan para hartawan di Kauman.

Dalam perkembangannya yang setapak demi setapak, Sekolah yang diidam-idamkan oleh Muhammadiyah sudah dapat terwujud, guru yang mengajar pengetahuan umum sudah ada. Hal ini disebabkan oleh karena Muhammadiyah mendapat bantuan dari pimpinan Budi Utomo yang lebih tahu mengenai persekolahan, kemudian menghubungkan Muhammadiyah dengan pemerintah. Dengan perantaraan Budi Utomo inilah sekolah-sekolah Muhammadiyah mendapat subsidi dari pemerintah sehingga jalannya sekolah mulai teratur, lengkap dengan guru-gurunya.

Mengingat cita-cita kiai akan mengejar ketinggalan umat Islam, maka di samping menyelenggarakan sekolahan, anak-anak keluarga Muhammadiyah supaya ada yang menuntut ilmu ke luar kampungnya sendiri. Pemuda-pemuda dianjurkan supaya pergi ke pondok pesantren. Putra Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Siraj yang ada di Banjarnegara dikirim ke Jakarta bersama dengan beberapa pemuda lainnya, masuk Sekolah Al Atas dan sebagian lagi ke Perguruan Al Irsyad.

Sementara itu, anak-anak perempuan atau gadis-gadis mendapat perhatian khusus dari kiai. Mereka dengan seizin orang tuanya masing-masing banyak dimasukkan ke *Neutral School*. Hal ini dianggap langkah yang maju dan menggemparkan, karena anak-anak perempuan dari Kauman ke luar kampung untuk masuk sekolah yang dipimpin oleh orang-orang Belanda. Putri-putri itu antara lain ialah Badilah, Bustanah, Bariah, Dawimah,

Dalalah, Wadingah, Wardhiyah, Walidah, Aisyiah, Wakirah, Amanah, Hayaimah. Mereka ini pada waktu pagi hari bersekolah di *Neutrals School*, siang harinya dihadapi oleh kiai sendiri untuk diberi pendidikan agama Islam. Putri-putri inilah yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan wanita dalam masyarakat Islam.

Dari taraf pengajian, kemudian terwujudlah sekolah tingkat sekolah dasar dengan lima tahun masa belajar. Pada sekolah ini murid-murid tidak terbatas dari Kampung Kauman saja, tetapi mulai menampung anak-anak dari luar Kampung Kauman. Orang tua anak tertarik karena pada sekolah itu selain pelajaran umum diberi juga pelajaran agama. Demikianlah kemudian menyusul berdiri Sekolah Muhammadiyah di Karangakajen, Kotagede dan Lempuyangan. Sekolah yang ada di Kauman makin terasa sempit, kemudian pindah ke Suronatan, yang kemudian mulai dikenal dengan nama *Standardschool Muhammadiyah Kauman* di Suronatan. Sekolah ini didirikan pada tahun 1918. Sementara itu ruang sekolah yang ada di Kauman tetap dipertahankan oleh kiai sebagai sekolah khusus untuk anak perempuan. Sekolah tersebut dinamakan "Pawiyatan", se-

tingkat dengan *Volkschool* (Sekolah Desa 3 tahun). Pawiyatan sebagai sekolah khusus untuk perempuan terus berkembang. Agar sekolah tersebut tidak hanya terbatas sebagai *Volkschool* (3 tahun), maka dipandang perlu untuk mengadakan kelanjutannya. Untuk itulah, maka dibuka *Kopschool*, ialah sekolah putri 3 tahun dengan tambahan mata pelajaran keputrian. Sekolah ini bertempat di Purwadiningratan. Lengkapnya sekolah ini disebut *Meisjes Kopschool Muhammadiyah* Gading di Purwodiningratan Yogyakarta.

Sekolah Rakyat yang lama belajarnya 3 tahun telah merata dibuka di beberapa tempat. Pada akhir tahun 1932 Muhammadiyah telah mempunyai 103 buah *Volkschool* dan 47 buah *Standardschool*. Sebagai kelanjutan dari *Volkschool*, telah dibuka sekolah lanjutan yakni *Vervolgschool* yang lama belajarnya 2 tahun.

Suatu persyaratan dari pemerintah, bahwa untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi harus menguasai bahasa Belanda. Padahal kesempatan untuk memasuki sekolah yang berbahasa Belanda pada saat itu sangat terbatas. Sekitar tahun 1920 mulai dirintis berdirinya HIS atau *Hollandsch Inlandsche School*. Atas usaha Muhammadiyah dibuka "*HIS met den Qur'an*" yang lama belajarnya 7 tahun dan masih ditambah lagi 1 tahun sebagai *Voorklas*.

Untuk memberi kesempatan menuntut ilmu yang lebih tinggi kepada anak-anak yang bersekolah di *Volkschool*, telah dibuka sekolah sambungan (*Schakelschool*) atau murid dari *Standardschool* yang naik ke kelas IV. Sebagai alumni dari *Schakelschool Muhammadiyah* antara lain Presiden Soeharto. Pada akhir tahun 1932 telah tercatat HIS Muhammadiyah ada 69 buah, sedangkan *Schakelschool Muhammadiyah* ada 25 buah.

Untuk menyelenggarakan pendidikan menengah pertama, Muhammadiyah sebagai pembaharu dalam bidang agama dan pendidikan Islam berusaha mengejar ketinggalan kaum beragama dari peradaban dunia. Sebagai kunci untuk maju tidak lain harus meninggalkan sikap mengasingkan diri dari per-

golakan zaman. Angkatan baru harus menuntut ilmu, harus mengejar ketinggalannya.

Pada 25 Oktober 1938 berdirilah Sekolah Dagang Kecil (*Kleinhandelschool*) di Yogyakarta, terdiri atas dua kelas, sebagai tangga menuju Sekolah Tenun, Sekolah Pertukangan dan MULO. MULO ini hanya disediakan bagi siswa-siswa yang mengerti bahasa Belanda. Anak-anak dari *Standaardschool* (Sekolah Angka II) tetap tertutup kesempatannya untuk mengikuti ilmu yang lebih tinggi. Usaha pendirian SMP ini dimaksudkan juga untuk menampung anak-anak dari *Standarschool*. Dengan bantuan dari pemerintah, dibukalah *Inheemse MULO* pada tahun 1937.

Pada tahun 1935 MULO Muhammadiyah berdiri di Madrasah Muallimin Ketanggungan Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1936 MULO Muhammadiyah diganti menjadi MULO HIK Muhammadiyah, tempatnya berpindah ke Bintaran Tengah Yogyakarta.

Muhammadiyah makin hari makin berkembang, dan telah tersebar ke berbagai daerah. Ranting-ranting Muhammadiyah berdiri di luar daerah Yogyakarta. Untuk memimpin gerakan ini masih terasa adanya kekurangan juru penerang dan tenaga guru agama, karena itu Muhammadiyah mulai bersiap-siap mendidik tenaga mubaligh dan guru. Muhammadiyah mulai merintis pendidikan sekolah guru. Murid-murid *Standarschool* yang semula berjumlah 10 orang dididik di serambi rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disebut orang "*Qismul-Arqa*" perlu dikembangkan lebih luas lagi.

Putra Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siraj, yang baru pulang dari Jakarta tahun 1918 diserahi tugas membantu mengajar bahasa Arab. Karena belum mempunyai tempat yang tetap, maka beberapa kali berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Setelah mendapatkan tanah dibangunlah gedung beserta asramanya di Kampung Ketanggungan Yogyakarta. Namanya berganti-ganti pula, yaitu dari *Qismul-Arqa* berganti menjadi *Kweekschool Islam* dan kemudian menjadi *Kweek-*

school Muhammadiyah. Akhirnya sampai sekarang bernama Madrasah Muallimin Muhammadiyah.

Siswa yang telah tamat dari sekolah itu lalu dikirim ke daerah-daerah yang sangat memerlukannya. Beberapa daerah yang ada di luar Jawa, misalnya Aceh, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Kepulauan Sunda Kecil dan beberapa daerah lainnya menjadi jangkauan pemuda-pemuda lulusan Muallimin. Meskipun Pemerintah Belanda tidak mau mengakui *civiel effect* ijazahnya, namun dalam menunaikan tugas suci ini tidak semata-mata berdasarkan ijazah. Ilmu pengetahuan, semangat dan mental mereka cukup tangguh untuk ditugaskan di semua pelosok tanah air. Pedoman kerjanya, bahwa yang mengakui dan menghargai mereka adalah masyarakat dan bukan tergantung pada pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat menghargai pemuda-pemudi karena amalannya, dan bukan karena kertas ijazah yang dikantonginya.

Untuk mencukupi tenaga pengajar pada Sekolah Rakyat (*Volkschool*) 3 tahun diperlukan tenaga-tenaga guru yang terdidik. Agar keperluan itu dapat segera tercukupi, maka pada tahun 1926 diadakan kursus Pendidikan Guru Sekolah Rakyat (*Normaal Leergang tot Opleiding van Volks Onderwijzers*). Kursus ini diselenggarakan di Sekolah Dasar (*Standaardschool Muhammadiyah*) di Kauman dengan waktu 2 tahun. Mata pelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, berhitung, menggambar, agama dan ilmu mengajar. Karena mendesaknya tenaga guru untuk ditempatkan di sekolah rakyat 5 tahun (*Standaardschool*) dan pada sekolah lanjutan 2 tahun (*Vervolgschool*), maka dibukalah Sekolah Guru yang disebut *Normaalschool Tot Opleiding van Inlandsche Leerkrachten*.

Kebutuhan guru untuk mengajar bahasa Belanda terasa pula kekurangannya. Untuk memenuhi kekurangan itu di Sala dirintis pendirian HIK Muhammadiyah (*Hollandsch Inlandsche Kweekschool*) yang lama belajar 6 tahun. Murid-muridnya diterima dari HIS atau *Schakelschool* atau 3 tahun dari MULO dan digabungkan dengan MULO Muhammadiyah.

Pada tahun 1938 telah dibuka Sekolah Dagang Kecil (*Kleinhandelschool*) bertempat di *Standaardschool* Suronatan, dengan lama belajarnya dua tahun. Siswa yang diterima adalah mereka yang telah tamat dari *Standaardschool*.

Di samping beberapa sekolah tersebut di muka, pada 1 Agustus 1934 oleh Muhammadiyah Cabang Yogyakarta dirintis berdirinya sekolah sebagai kelanjutan dari MULO. Sekolah yang dimaksud disebut "Sekolah Pertengahan Muhammadiyah II" atau lazim dikenal sebagai AMS (*Algemene Middelbare School*).⁸

3.2.1.3 Pesantren Persatuan Islam (Persis)

Pesantren Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada tahun 1923. Mula-mula diketuai oleh A. Hasan, sedangkan penasihatnya ialah M. Natsir yang juga bekerja sebagai guru.

Persis bertujuan mempersiapkan calon-calon ulama yang agar tidak kaku menghadapi masyarakat, menghasilkan mubalig-mubalig yang memiliki kemampuan serta kesanggupan menyebarkan, membela serta mempertahankan agama Islam.

Dengan mengembalikan ajaran agama Islam kepada Qur'an dan Sunnah, Persis sangat giat membuat tazkiah, membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat, memberikan pengertian tentang hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, didirikanlah pesantren dan madrasah; juga diselenggarakan pendidikan waktu sore untuk anak laki-laki dan perempuan.

Pesantren Persis di Bandung terdiri atas tingkat ibtidaiyah atau tajhiziyah, tsanawiyah, muallimin dan aliyah. Lama pelajaran tingkat ibtidaiyah adalah 6 tahun, yang terdiri atas klas tahdiri (persiapan) untuk 2 tahun yang pertama (Klas A dan Klas B) dan setelah itu baru menjadi Klas I, II, III, diakhiri dengan Klas IV. Mulai Klas IV digunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya tingkat tajhiziyah. Tingkat

tajhiziyah menampung lulusan Sekolah Dasar untuk menyiapkan diri selama 2 tahun supaya dapat ikut memasuki tsanawiyah. Pada tingkat ini 100% dimatangkan agama dan bahasa Arab. Pada tingkat tsanawiyah lama pelajaran adalah 4 tahun. Yang dapat diterima pada tingkat ini adalah mereka yang telah lulus ibtidaiyah dan tajhiziyah. Pelajaran diberikan lebih banyak, sedangkan pelajaran umum hanya yang penting-penting saja, di antaranya ilmu mengajar dan perbandingan agama. Bahasa Arab diperdalam dan di samping itu diajarkan bahasa Inggris. Tingkat mualimin menerima lulusan tsanawiyah dengan lama belajar 2 tahun. Di samping mempelajari bidang ilmiah, praktek kemasyarakatan menjadi tugas pokoknya. Kecuali praktek mengajar, diberikan pula praktek tabliq dan kepemimpinan. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat ini, barulah siswa itu mendapat tugas ke luar daerah. Terakhir adalah tingkat aliyah. Tingkat aliyah bertujuan untuk memantapkan ilmu pengetahuan dengan menerima lulusan Muallimin dengan masa belajar 3 tahun.

3.2.1.4 Nahdatul Ulama

Organisasi lain yang juga turut giat menyebarkan benih-benih agama Islam di Indonesia ialah Nahdatul Ulama (NU) yang mula-mula didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926. Salah seorang yang turut membangun perkumpulan NU ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah menjadi Raisul Akbar dalam perkumpulan itu. Karena usaha-usahanya, maka NU menjadi perkumpulan ulama yang terbesar di Indonesia.

Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dilahirkan di Jombang Jawa Timur pada tahun 1871, telah bertahun-tahun bermukim di Mekkah untuk menuntut ilmu agama Islam dan bahasa Arab. Untuk melaksanakan cita-citanya, maka pada tahun 1899 ia membuka Pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Timur.

Sebelum menjadi partai politik, NU bertujuan memegang teguh salah satu mazhab imam yang berjumlah empat, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali serta mengerjakan apa-

apa yang menjadikan kemaslahatan (umum) untuk agama Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diadakan berbagai usaha seperti memajukan dan memperbanyak pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah serta mengadakan tabliq-tabliq dan pengajian-pengajian, di samping usaha sosial lainnya.

Pada akhir tahun 1938 Komisi Perguruan Nahdatul Ulama telah menetapkan susunan madrasah-madrasah nya sebagai berikut.

- (1) Madrasah Awaliyah dengan lama belajar 2 tahun,
- (2) Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 3 tahun,
- (3) Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar 3 tahun,
- (4) Madrasah Mu'allimin Wustha dengan lama belajar 2 tahun,
dan
- (5) Madrasah Mu'allimin Ulya dengan lama belajar 3 tahun.

3.2.1.5 *Indonesische Nederlandsche School (INS Kayu Tanam)*

Pada tahun 1926 Moh. Syafei mendirikan sebuah Perguruan yang dinamakan *Indonesische Nederlandsche School* di Kayu Tanam lebih kurang 50 km dari Padang, Sumatera Barat. Sekolah ini lebih terkenal dengan nama "Perguruan Ruang Pendidik INS". Keistimewaan dari perguruan itu ialah rencana pelajaran dan metode mengajarnya yang tidak disesuaikan dengan rencana pelajaran sekolah kolonial. Ia berpendapat, bahwa anak-anak kita itu perlu belajar bekerja, sehingga mereka pandai mempergunakan tangannya di samping memakai otaknya. Hendaknya kepada anak-anak itu diajarkan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan pembawaan dan kemauannya bagi penghidupannya kelak. Jelaslah, bahwa hal ini merupakan reaksi terhadap sekolah kolonial yang mempersiapkan murid untuk menjadi buruh pada kantor pemerintah atau perusahaan-perusahaan milik orang asing (Belanda). Dengan sekolahnya itu Moh. Syafei ingin membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang berani bertanggung jawab, berani berdiri sendiri, hidup bebas dan tidak bergantung kepada orang lain. Karena itulah maka tujuan perguruannya ialah.

- (1) Mendidik anak-anak agar mereka dapat berpikir secara rasional. Dengan ini ia ingin membawa anak-anak kepada hal-hal yang praktis, agar mereka kelak dapat memegang peranan tertentu yang menguntungkan bagi masyarakat. Untuk itu anak-anak sebagai calon anggota masyarakat, harus memiliki kecakapan-kecakapan praktis. Karena itulah ia memilih aliran Sekolah Kerja. Dan hal ini akan lebih jelas lagi kalau kita menghubungkannya dengan tujuan yang kedua, yakni:
- (2) Mendidik anak-anak bekerja beraturan dan sungguh-sungguh. Moh. Syafei mengadakan hubungan yang seerat-eratnya antara berpikir, dan berbuat. Ia berpendapat, bahwa kemiskinan dan kesengsaraan sebagian besar disebabkan karena rakyat kurang mampu mempergunakan otaknya. Karena pertimbangan itulah, maka tiap-tiap hari anak-anak dilatih pikirannya dan dibiasakan untuk bekerja secara sistematis, beraturan dan efisien. Itulah sebabnya, maka pekerjaan tangan dijadikan mata pelajaran yang penting sekali. Anak-anak di tiap-tiap kelas mendapat pekerjaan tangan sekitar 3 jam sehari. Pekerjaan itu diberikan seluas-luasnya/dari yang seringan-ringannya seperti membuat alat-alat pelajaran dari kayu, bambu, rotan, tanah liat, bercocok tanam, beternak dan lain-lain sampai kepada pekerjaan yang besar-besar seperti mendirikan ruangan-ruangan untuk belajar, tempat kediaman murid dan guru, tempat bermain sandiwara, membuat lapangan olah raga, dan masih banyak lagi. Dari kegiatan-kegiatan itu tampak dengan jelas, bahwa sekolah tampak berdaya upaya untuk menutupi sendiri sekalian biaya.
- (3) Membentuk murid-murid menjadi manusia yang berwatak. Ia beranggapan, bahwa sistem belajar dengan jalan bekerja itulah yang dapat membentuk watak anak-anak.
- (4) Menanam perasaan persatuan. Dalam segala usahanya Moh. Syafei ingin menanamkan perasaan persatuan, perasaan bekerja bersama antara murid-muridnya. Dalam mendirikan ruangan belajar, membuat lapangan olah raga,

mengangkut batu dari sungai dan sebagainya, perasaan persatuan itu timbul dengan sendirinya. Juga dalam berbagai-bagai permainan sandiwara, musik, olah raga, persatuan dan bekerja bersama itu berlangsung dengan memuaskan sekali. Untuk lebih mempererat semangat bersatu, maka di kalangan murid-murid didirikan perkumpulan koperasi. Usaha itu dapat juga dianggap sebagai latihan bekerja, bersama dalam lapangan ekonomi.

3.2.1.6 Pondok Modern Gontor

Pondok Modern Gontor Ponorogo merupakan sebuah Madrasah yang diselenggarakan secara baru dan mempergunakan cara-cara mendidik dan belajar menurut sistem modern. Pondok ini didirikan pada tahun 1926 dan dijadikan pondok modern pada tahun 1936 oleh Imam Zarkasyi. Lama pelajaran di sekolah ini 6 tahun. Pelajaran yang diberikan meliputi: ilmu agama, bahasa Arab, dan pengetahuan umum. Mulai kelas III diajarkan ilmu mendidik dan ilmu jiwa, sedangkan praktek mengajar dimulai dari kelas IV.

Bahasa Arab dijadikan bahasa pengantar dan bahasa pergaulan di antara para pelajar. Bahasa ini diajarkan dengan mempergunakan metode langsung. Bahasa Inggris dipentingkan pula.

Para pelajar mengorganisasi sendiri perkumpulan yang terdiri dari bagian-bagian Olah Raga, Kesenian, Kesehatan, Keagamaan, Kepanduan, Pelajaran, Penerangan dan lain-lain. Segala sesuatu mudah dilaksanakannya, karena semua pelajar tinggal dalam asrama. Gedung-gedung sekolah dilengkapi dengan aula besar untuk segala kepentingan pertemuan para pelajar dan sebagai tempat hiburan para pelajar sendiri, lengkap dengan alat-alat musiknya. Pondok modern ini banyak menghasilkan pelajar yang besar jasanya kepada kemajuan agama, masyarakat dan tanah air, baik sebagai guru, *mubaliq*, pemimpin dan lain-lain sehingga pondok ini banyak dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh pendidikan dari dalam dan luar negeri.⁹

3.3 Pendidikan dan Pengajaran pada Zaman Pendudukan Jepang

Pada 18 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Stakenborg dan Panglima Militer Ter Porten atas nama Pemerintah Hindia Belanda menandatangani kapitulasi di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Tentara Pendudukan Jepang. KNIL dibubarkan dan semua perlawanan dihentikan tanpa suatu pertempuran yang sengit. Pada hal pada mulanya mereka mengumandangkan semboyan "Lebih baik mati berdiri dari pada bertekuk lutut". Dengan berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu Periode Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang. Sesudah tentara pendudukan Jepang mulai berkuasa, tak ada satu sekolah pun yang diperkenankan dibuka kembali. Lagi pula persiapan-persiapan ke arah itu belum diadakan. Masih banyak kesulitan-kesulitan yang perlu diatasi terlebih dahulu, lebih-lebih kesulitan mengenai guru, karena Pemerintah Kolonial Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru Indonesia untuk sekolah-sekolah menengah, apa lagi menengah atas, sehingga saat terakhir dari masa penjajahan Belanda hanya ada beberapa orang guru Indonesia yang mempunyai wewenang penuh untuk mengajar sekolah lanjutan. Kesulitan lainnya ialah mengenai buku-buku pelajaran. Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda. Sedangkan pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. Akan tetapi sebaliknya, karena kesulitan-kesulitan inilah yang rupanya mendorong bangsa Indonesia untuk melengkapi bahasanya dengan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Di samping itu, pemerintah pendudukan Jepang hanya mendorong bangsa Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang yang masih asing sama sekali bagi telinga bangsa Indonesia. Untuk maksud itu, pemerintah pendudukan Jepang membuka sekolah-sekolah yang khusus memberi pelajaran bangsa Jepang secara kilat. Sekolah-sekolah itu disebut *Nippongo Gakko*. Selain itu ada pula pendidikan yang disebut "*Hakko Ichiu*" yang mengajak bangsa Indonesia bekerjasama

dengan bangsa Jepang dalam rangka pencapaian "Kemakmuran Bangsa Asia Timur Raya".

Membicarakan tentang pendidikan dasar pada masa pendudukan Jepang, kiranya tidak dapat lepas dengan keadaan pendidikan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat tingkatan-tingkatan pendidikan di sekolah dasar, yang satu sama lain terdapat jurang pemisah. Tingkatan semacam tersebut pada masa pendudukan Jepang dihilangkan. Semua sekolah dasar memiliki derajat yang sama yaitu bernama Sekolah Rakyat. Penghapusan tingkatan pendidikan itu bagi bangsa Indonesia besar sekali manfaatnya, karena dengan demikian tidak terdapat lagi diferensiasi di antara bangsa-bangsa kita sendiri yang pada hakekatnya sebagai manusia berkedudukan sama.

Dasar pendidikan di sekolah-sekolah ialah pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan diliputi oleh suasana perang, maka banyak nyanyian-nyanyian dan semboyan serta latihan-latihan dihubungkan dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi perang. Dengan semboyan "Asia Timur Raya Untuk Kemakmuran Bersama", maka semangat Jepang ditanamkan melalui sekolah-sekolah.

Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. Jumlah sekolah, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, maupun Sekolah Kejuruan sangat menurun. Hal ini mengakibatkan makin bertambahnya orang-orang yang buta huruf. Pendidikan di Sekolah dasar diseragamkan menjadi 6 tahun. Hal ini untuk memudahkan pengawasan baik dalam hal isi maupun penyelenggaraannya.

Pemakaian bahasa Belanda di sekolah-sekolah dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan merupakan mata pelajaran utama. Demikian pula bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah-sekolah. Semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan yang dalam waktu singkat dikeluarkan oleh Kantor Pengajaran (*Bunkyo Kyoku*). Bilamana buku-buku berbahasa

Jepang atau terjemahannya tidak diterimanya, maka para guru berusaha menerjemahkan dan menyusunnya sendiri dari buku-buku yang berbahasa Belanda. Dengan demikian bahasa Indonesia mendapat peranan penting. Pelajaran bahasa Daerah diberikan kepada murid-murid kelas I dan kelas II sebagai bahasa pengantar sampai mereka mengerti bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia baru mulai diajarkan di kelas III.

Bagaimana pun kemerosotan dan kemunduran dalam bidang pendidikan, baik kuantitas maupun kualitas sehingga kebebasan berpikir dan berbuat hilang lenyap, namun demikian banyak hal-hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia di kelak kemudian hari. Hal-hal yang sangat menguntungkan itu antara lain :

- (1) Bahasa Indonesia berkembang secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Istilah-istilah diciptakan untuk semua jenis kepentingan.
- (2) Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dalam suasana perang hak cipta internasional diabaikan. Bahasa asing selain bahasa Jepang dilarang.
- (3) Seni bela diri dan perang dimiliki oleh pemuda-pemuda, khususnya untuk pelajar Indonesia ternyata berguna di dalam perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi kemudian.
- (4) Perasaan rindu kepada kebudayaan dan kemerdekaan nasional berkembang dan berkeajaiban secara luar biasa.
- (5) Karena dalam suasana perang dan serba kekurangan kreativitas para guru berkembang, misalnya apabila tidak memperoleh buku dari kantor pengajaran (*Bunkyo Kyoku*), maka mereka menerjemahkan langsung dari buku-buku bahasa asing. Alat-alat peraga diciptakan dari bahan-bahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya.
- (6) Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan dan agama ditiadakan sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.
- (7) Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan, walaupun di bawah pengawasan orang-orang Jepang.

- (8) Sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan, meskipun sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sekolah-sekolah bekas Zending, dan Missie diizinkan terus berkembang tetapi di bawah pengaturan dan diselenggarakan sesuai dengan Sekolah Negeri.

3.3.1 Jenis Sekolah Pada Masa Pendidikan Jepang

3.3.1.1 Sekolah Rakyat

Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu macam sekolah untuk sekolah dasar, yaitu yang disebut Sekolah Rakyat, terbuka untuk umum dan semua golongan penduduk. Lama pendidikannya 6 tahun. Sekolah rakyat terdapat di semua kota dan desa atau di tempat yang dahulunya ada Sekolah Desa, Sekolah Klas Satu, Sekolah Klas Dua, atau HIS atau ELS.

3.3.1.2 Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko)

Sebagai kelanjutan dari Sekolah Rakyat adalah Sekolah Menengah Pertama atau *Shoto Chu Gakko*. Lama pendidikannya 3 tahun. Baru dalam bulan September 1942, setelah beristirahat kurang lebih 5 bulan, sekolah-sekolah menengah diperbolehkan dibuka kembali setelah diadakan persiapan-persiapan seperluanya.

3.3.1.3 Sekolah Menengah Tinggi

Sekolah lanjutan umum tingkat atas, yang dibuka dengan nama Sekolah Menengah Tingkat (SMT), mula-mula hanya ada 4 buah untuk seluruh Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian pada tahun 1943 dibuka dua buah SMT di Bandung dan di Surakarta.

Sekolah ini mempunyai sifat pengajaran umum dan ditujukan untuk menyiapkan para pelajar guna melanjutkan pada sekolah tinggi. Yang diterima pada SMT ialah mereka yang lulus pada ujian penghabisan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

3.3.1.4 Sekolah Kejuruan

Sekolah Kejuruan Menengah yang ada ialah Sekolah Pertukangan dan Sekolah Teknik Menengah. Pada zaman pendudukan Jepang didirikan Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi di Cirebon.

3.3.1.5 Sekolah Guru

Untuk mendidik para calon guru terdapat tiga jenis sekolah, yaitu Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Suhan Gakko*), dan Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*).

3.3.1.6 Perguruan Tinggi

Hampir semua perguruan tinggi ditutup, kecuali yang masih ada ialah Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta yang dibuka kembali tahun 1943. Juga Sekolah Ahli Obat (*Yaku Gakko*) di Jakarta, dan Sekolah Kedokteran Gigi (*Shika Gakko*) di Surabaya. Tahun 1944 dibuka Sekolah Teknik Tinggi (*Kagyo Dai Gakko*) di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, dan pada awal tahun 1945 dibuka Akademi Pemerintahan (*kenkoku Gakko In*) di Jakarta.¹⁰

CATATAN

1. Depdikbud, Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman, Balai Pustaka Jakarta, 1979, Hal. 107–109; Djumhur dan H. Danasaputra, Sejarah Pendidik, CV Ilmu, Bandung, 1959, hal. 134–135; Edi S. Ekajati, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Proyek IDKD, Jakarta, 1984, hal 52–53; Heru Sukardi, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur, Proyek IDKD, Jakarta, 1980/1981, hal. 123–124.
2. Djumhur dan Dasaputra, *op cit*, hal. 135–136; Heru Sukardi *op cit*, hal. 126–128; Suratmin dkk, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek IDKD, Jakarta, 1980/1981, hal. 58–59.
3. Heru Sukardi, *op. cit*, hal. 123–126.
3. Edi S. Ekajati, *op cit*, hal. 57
5. Heru Sukardi, *op cit*, hal. 136–138, Edi S. Ekajati *op cit*, hal. 62
6. Haru Sukardi, *Op cit* hal. 147; Suratmin, *Op cit*, hal. 7–73.
7. Djumhur dan Danasuparta, *op cit*, hal. 171 – 173; Suratmin, *op cit*, hal. 73–76.
8. Suratman, *op cit*, hal. 87–99.
9. Djumhur dan Danasuparta, *op cit*, hal. 182–193.

PENUTUP

Pada bab I telah dikemukakan bahwa karena penemuan sumber-sumber yang baru dan karena munculnya tujuan-tujuan yang lain, maka perlu dilakukan penulisan kembali buku-buku sejarah yang sudah ada. Pada 14-16 Mei 1992 yang lalu Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui bimbingan teknis aspek-aspek kesejahteraan telah menawarkan beberapa permasalahan dan tujuan dari penulisan kembali "Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan". Sesuai dengan tawaran di atas, tujuan pertama penulisan ini ialah membahas suatu kesimpulan, yaitu, "tentang pradugaan bahwa (terutama) tujuan dan isi pendidikan pada masa itu berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, walaupun sistemnya sama", sedangkan tujuan kedua akan dikaitkan dengan pembahasan tentang wujud lembaga pendidikan, proses serta pihak yang terlibat di dalamnya. Meskipun sistematika penulisan ini disesuaikan dengan periode-periode temporal, yang dipecah menjadi tiga periode yaitu abad ke 16-18, abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, tetapi benang merahnya adalah rentang pradugaan di atas.

Sistem baru, yaitu pelajaran yang diberikan pada suatu kurun waktu tertentu yang lebih dikenal sebagai "sekolah", di Indonesia untuk pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis dan angsa Belanda sejak abad ke-16 dan kemudian ditingkatkan serta dikembangkan sampai permulaan abad ke-20.

Tujuan utamanya ialah untuk menjadikan sekolah sebagai salah satu sarana ataupun alat bagi pencapaian sasaran-sasaran mereka di bidang politik dan ekonomi. Pernyataan seorang ahli filsafat berkembangaan Inggris, Francis Bacon (1561-1626), bahwa *Knowledge is Power*, yang dalam kaitan dengan pendidikan dapat pula diidentikkan dengan ungkapan bahwa *education is power*, memang dapat ditelusuri kembali kebenarannya dalam sejarah pendidikan di Indonesia selama kurun waktu 1600-1945.

Motif kedatangan orang-orang Portugis ke Indonesia terutama adalah kepentingan ekonomi, yang disertai dengan kepentingan agama dan petualangan. Untuk itu saran-saran mereka adalah untuk menguasai Kepulauan Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kepulauan rempah-rempah yang asli sebenarnya adalah daerah Maluku Utara (Ternate, Tidore, dan Bacan) yang dikuasai oleh raja-raja yang beragama Islam. Untuk mengimbangi kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut, bangsa Portugis memperkuat kedudukannya di daerah-daerah Maluku Selatan sebagai daerah penghasil cengkih yang baru dan kemudian menyusul pendudukan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur, khususnya Timor Timur, yang penduduknya sebagian besar tidak memeluk agama Islam. Melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh Ordo Yesuit sasaran mereka banyak tercapai; bahkan mereka berhasil meletakkan dasar-dasar Katholikisme di Indonesia. Isi maupun materi pendidikan yang mereka kembangkan terutama berkisar di sekitar ajaran agama Katholik, ditambah dengan beberapa materi yang lain, tetapi selalu didasari oleh pengetahuan agama. Bahasa pengantarnya tidak begitu jelas, sehingga diperkirakan menjadi salah satu hambatan dalam usaha pengembangan pendidikan. Hambatan di atas dan ditambah dengan begitu singkatnya masa pendudukan mereka di Indonesia, menyebabkan sejarah pendidikan formal melalui sekolah yang didirikan oleh bangsa Portugis di Indonesia kurang dikenal.

Motif kedatangan orang-orang Belanda ke Indonesia terutama adalah kepentingan perdagangan. Untuk itu mereka me-

ngambil alih posisi orang-orang Portugis di Maluku Selatan (1605) dan menguasai daerah tersebut secara langsung. Sebagai basis kekuasaan yang pertama di Indonesia, orang-orang Belanda semakin memperkuat dan menyempurnakan posisi mereka di sana, di antaranya melalui pendidikan formal/sekolah. Daerah-daerah yang lain di Indonesia, terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sebagian besar dikuasai oleh raja-raja yang beragama Islam. Permusuhan dan perpecahan di antara sesama mereka semakin memperlemah kekuasaan raja-raja tersebut. Orang-orang Belanda justru menggunakan keadaan ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1619 mereka berhasil meletakkan dasar kekuasaan untuk selanjutnya, yaitu dengan mendirikan Kota Batavia. Selanjutnya pada akhir abad ke-17 mereka berhasil mengisolasi Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia dari pengaruh luar, sehingga mampu mengawasi lalu-lintas antarpulau di wilayah perairan Nusantara. Sehubungan dengan itu sejarah pendidikan formal yang dilaksanakan oleh bangsa Belanda dalam abad ke-16-18, sebagian besar berkembang di daerah Maluku Selatan dan di kalangan orang-orang Ambon yang beragama Kristen Protestan. Baru semenjak abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 sejarah pendidikan ini mencakup hampir seluruh wilayah di Nusantara.

Di daerah Maluku Selatan, pendidikan formal melalui sekolah-sekolah dimulai dan tetap terkait dengan agama Kristen, yang berlangsung sampai abad ke-20. VOC menyadari bahwa agama Kristen dapat dijadikan alat untuk meningkatkan loyalitas penduduk pribumi kepada penguasa yang baru yaitu orang-orang Belanda. Di kampung-kampung (negeri-negeri) para guru Injil merupakan tokoh-tokoh yang berwibawa di bidang soal-soal agama, dan sehubungan dengan itu kepada mereka diserahkan tanggung jawab mengenai pendidikan serta kepemimpinan terhadap jemaah-jemaah Kristen. Mereka beserta sekolah-sekolah yang dikelolanya kemudian menjadi fondasi bagi tumbuhnya Protestanisme Ambon. Isi ataupun materi pendidikan yang dikembangkan mirip dengan apa yang diberikan oleh orang-orang Portugis, kecuali dasarnya adalah ajaran

agama Protestan. Salah satu sebab keberhasilan orang-orang Belanda di bidang pendidikan ini ialah penentuan bahasa pengantarnya, yaitu bahasa Melayu klasik yang kemudian berkembang menjadi Bahasa Indonesia, untuk mendampingi bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar lainnya. Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan memperlihatkan betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia, bukan saja di bidang pendidikan akan tetapi juga di bidang-bidang kehidupan yang lain, di antaranya di bidang kebangkitan nasional pertama. Lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang salah satu di antara sumpahnya berbunyi "Berbahasa satu yaitu Bahasa Indonesia", yang sekaligus mengungkapkan kesadaran akan kebudayaan bangsa Indonesia. Bukanlah bahasa merupakan alat komunikasi dari segala sikap, nilai, perasaan dan cita-cita, yang di balik itu semua yang muncul sebagai kekuatan inti, yaitu kesadaran akan satunya masyarakat Indonesia dan satunya kebudayaan Indonesia. Dari sejarah pendidikan ini dapat diambil pelajaran, yaitu betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia di bidang pendidikan, yang seharusnya tetap mendapat perhatian serta pembinaan yang baik di sekolah-sekolah sekarang ini dan selanjutnya.

Pemerintah Hindia Belanda yang pada permulaan abad ke-19 menggantikan kedudukan VOC, setelah melalui berbagai peperangan di berbagai daerah di Nusantara dan berakhir dengan Perang Aceh (1873-1903), berhasil menguasai secara langsung seluruh Indonesia. Ini berarti bahwa demi kepentingan politik dan ekonomi mereka, perluasan dan pengembangan sistem pendidikan melalui sekolah-sekolah juga harus dilaksanakan. Kesemuanya ini dilakukan sesuai dengan perubahan zaman, di antaranya sekularisme di bidang pendidikan. Bagaimana pun pada dasarnya kebijaksanaan politik Pemerintah Hindia Belanda di bidang pendidikan adalah meneruskan tradisi politik mereka yang lama, yaitu mempertahankan hubungan-hubungan yang sesungguhnya serta perbedaan-perbedaan sosial dan politik dalam masyarakat, dalam mana setiap kelompok penduduk menduduki posisi mereka masing-masing. Tradisi politik ini jelas terlihat, misalnya dibukanya *Hollandsch*

Chineesche School (1908) di samping *Hollandsch Indlandsche School* (1914). Sedangkan hanya sekelompok kecil "elit"

dari kedua kelompok masyarakat di atas yang diberikan kesempatan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di *Europeesche Lagere School*. Dalam beberapa hal masyarakat Cina memang mendapat perlakuan yang khusus dari Pemerintah Hindia Belanda.¹ Pemberian subsidi semula hanya untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh golongan Kristen Protestan dan golongan Katholik Roma, baru kemudian juga diberikan subsidi kepada sekolah-sekolah yang diasuh oleh organisasi Muhammadiyah.²

Dalam pada itu Pulau Jawa yang berabad-abad sudah merupakan pusat geo politik Nusantara, posisi tersebut diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan menengah dan tinggi dipusatkan di pulau ini. Misalnya, di Batavia terdapat MULO, HBS 5 tahun, Sekolah Menengah Pamogpraja, Sekolah Menengah Hukum, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Dagang, dan Sekolah Tinggi Kedokteran, demikian pula di Bandung, Semarang dan Yogyakarta terdapat HBS 5 tahun.³ Pada tahun 1894 dibuka jalan kereta api Batavia – Bogor – Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya dan pada tahun 1912 dibuka jalan kereta api Batavia – Semarang – Surabaya.⁴ Murid-murid dari hampir seluruh daerah di Indonesia datang menetap dan belajar di kota-kota tersebut, dan kemudian saling mengadakan kontak sesamanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dunia kecil dari pada pemuda terpilih dari bidang sosial dan politik dengan latar pendidikan lanjutan dan tinggi, mulai muncul dan juga sangat transparan dalam kehidupan di Indonesia.

Sekali lagi, dari sejarah pendidikan di atas, ternyata bahwa pendidikan bahasa yaitu bahasa Indonesia, perlu lebih diutamakan dan ditingkatkan di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi.

CATATAN

1. D.E. Willmott, *The National Status of The Chinese in Indonesia* Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956).
2. Brugmans, *op. cit.* hal 51, 317, 331, 354.
3. "Onderwijs" in *Enchyclopaedia Van Nederlandsch Indie* ('s Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill, 1919), Jilid II, hal. 90-133.
4. "Spoor en Tramwegen", in *Eycyclopaedia Van Nederlandsch Indie* ('s Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill, 1921), Jilid IV, hal. 68-85.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Gede Putra, Sejarah Pendidikan Daerah Bali, Proyek IDKD, (Jakarta: depdikbud, 1984).
- Ahmadi, Drs. A., PENDIDIKAN DARI MASA KE MASA: Untuk para pendidik dan calon pendidika di Indonesia (Bandung: ARNICO, 1987).
- Angelio, A.D.A. De Kat, Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlands Indie, Derde Hoofdstuk (s'gravenhage: Martinus Nijhoff, 1937).
- Baversluis, A.J. & A.H.C. Gieben, Het Gouvernement der Molukken (Weltevreden—Batavia Centrum: Landdrukkerij, 1929).
- Boekholt, P.Th.F.M. & de Booy, Geschiedenis van de School in Nederland (Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1987).
- Boukema, D. & S. Van Der Ree, "Het Onderwijs Nederlands in Indonesie: de laatste 75 jaar", Levends Talen 411 (Mei, 1986).
- Brugmans, Dr. I.J., Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch Indie (Groningen, Batavia: J.B. Wolters, 1938).
- Bruin, D.C. de, Fragmentarische Herinneringen uit het leven van eed oud-gouvernements-onderwijzer (Semarang: Semarang Drukkerij en Boekhandel, 1893).

- Chauvel, Richard, NATIONALISTS, SOLDIERS AND SEPARATISTS: The Ambonese Islands from Colonialism to Recolt, 1880–1950 (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde/KITLV Press, 1990).
- Chijs, J.A. Van Der (red.), Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, Zeventien Delen (Batavia: Lands Drukkerij, s'Gravenhage Martinus Nijhoff, 1885–1900).
- Court, J.F.H.A. de la (red.), De meest voorkomende Woorden en woordcombinaties in het nederlandsch; Verslag Van een onderzoek in opdracht van het depetement van Onderwijs en Eeredienst (Batavia: Volkslectuur, 1937).
- Dam, P. Van. Beschrijvinghe van de Oost-Indische Compagnie, Uitgegeven door Dr. C.W. Th. Baron Van Boetelaer Van Asperen en Dubbledam, Deel IV (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954).
- De Klerck, Es., History of the Netherlands East Indies (Rotterdam: W.L.E.J. Brusse, N.V., 1938), Vol. I.
- Djumhur, I & H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan (Bandung: Penerbit CV. Ilmu, 1974).
- Eakajati, Edi S., et al., Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Proyek IDKD, (Sejarah Depdikbud, 1982).
- Ellen, Roy F., "Sago subsistence end the trade in spices: a provisional model of ecological succession and ambalance in Mullussan histiry", *in*: P.C. Burnham and R.F. Ellen (eds.), Social and Ecological systems (London, New York, San Francisco: Academic press, 1979).
- Fitapatrik, E.A., Ignatius and teh ratio Strudiorum (New York: Mc. Graw Hill, 1933).
- Fraassen, Ch. F. Van, Ambon-rapport (M.A. Thesis, Rikjs Unversiteit Leiden, 1972).

- Ginsel, W.A., *De Gerevormeerde kerk op formosa of de lotgevallen eener handelkskek onde d Oost-Indische Compagnie, 1627-1662* (Leiden: Mulder, 1931).
- Groeneboer, C.r, "Ruim 375 jaar Nederlands als Vreemde en Tweede Taal in de Indonesche Archipel", *in*: Handelingen tiende colloqium van doventenin de neerlandidtiiek aan butenlandse universiteiten (Gent: s'Gravenhage: Internationale Vereniging Voor Neerlandistie, 1989 a)
- Groeneboer, C.R., "Niewude taalonderwijs: De betekenis van G.J. Nieuwenhuis voor het nederlands in Indie," *in*: C.R. Groeneboer (red.), *Study Belanda di Indonesia-nederlandse Studien in Indonesie* (Jakarta: Djambatan, 1989 b.).
- Groeneboer, Kees, *het ABC Voor Indie: Bibliografie van de Oost-Indische Compagnie*", *in*: P.J. Van Ravensteyn en H. Grondijs, *Twee bijdragen tot de kennis van de geschiedenis van het onderwijs aan Europeanen in Nederlandsch-Indie*", I (Batavia: Kolff, 1896).
- Haak, H.E., *Memorie Van Overgave (Mr O) van de onderafdeling Amboina, 1931.*
- Historisch overzicht van het regeringsbeleid ten aansien van het onderwijs voor de Inlandsch bevolking. Teedetuk Batavia: Landsdtrukkerij, 1931); Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commissie.*
- Hughe, T., *Loyola and the educational eystem of the Jesuit* (Nes York, 1892).
- Jong, L.de. *Het Koninkrijk der Nederlanded in de Rweedw Wereldoorlog. Deel Ila: Nederlands-Indie* (Den Haag: Staatsuitgeverijs, 1984).
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poespanegoro; Nugroho Notosusanto, *SEJARAH NASIONAL INDONESIA* (Djakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, Jilid III, IV, V.

- , PENGANTAR SEJARAH INDONESIA BARU: 1500–1900; Dari Emporium Sampai Imperium (Jakarta Penerbit P.T. Gramedia, 1987), Jilid. I.
- Kennedy, Raymod, Field notes on Indonesia: Ambon and Ceram, 1949–1950. Edited by Harold C. Conklin. Ne Haven-delingen 125, 1987).
- Knaap, G.J., Kruidnagelen en Christenen: De Vereenigde Cost-Indische, Compagnie en de bevolking van Ambon 1626–1696 (Dordrecht/Prividense: Foris; Kitlv, Verhandeingen 125, 1987).
- Kraemar, H., Verslag van de reis van Dr. H. Kraemer naar Ambon e de Minahasa, van 2 September – 8 November 1926 (Amstram: Nederlandsch Bijbel Genootschap, 1974), 2 Vols.
- Kroeskamp, H., Early schoolmasters in a developing Country: A history of expereriments in school education in 19 th Century Indonesia (Assen: Van Goecum, 1974).
- Latuhary, J., Azab Sengsara Kepoeloan Maloekoe (Makasar, 1931).
- Leirissa, Richard Z., Maluku Dalam Perjuangan Nasional (Jakarta, Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, lembaga Sejarah, 1975).
- , "Maluku Tengah dalam abad kesembilan belas: Studi pendahuluan: Majalah PRISMA, 9–8 Agustus 1980.
- , Z.J. Manusama, A.B. Lopian dan Paramita Abdurachman (eds.), Maluku Tengah di masa lampau: Gambaran sekilas lewat arsip abad sembilanbelas (Jakarta Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982).
- Ma'moen Abdullah, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan, Proyek IDKD (Jakarta: Depdikbud, 1984).
- Manus, Laurens. dkk., Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, Proyek IDKD (Jakarta: Depdikbud, 1982).

- Manusama, Z.J.**, Hikayat Tanah Hitu: Historie en sociale structuur van de Ambonse einlanden in het algemeen en van ende eeuw (Ph.D. Thesis, Rijksuniversiteit Leiden, 1977).
- Manusama, J.A.**, Om recht en vrijheid: De strij om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukken (Utrecht: Libertas, 1952).
- , Verslag betreggende de gebeurtenissen in de Zuid-Molukken na de souvereiniteits-over-dracht in December 1949 (Ms. dated Hollandia, September 1952).
- Martamin, Mardjani**, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatra Barat, Proyek IDKD (Jakarta: Depdikbud, 1980/1981).
- Mestoko, Sumarsono, dkk.**, PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI JAMAN KEJAMAAN (Jakarta: Depdikbud/Balai Pustaka, 1986).
- Moehadi, Dkk.**, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah, Proyek IDKD (Jakarta: Depdikbud, 1982).
- Mooy, J.**, Geschiedenis der Protestanche kerjk in Nederlandsch-Indie (weltevreden: Landsdrukkerij, 1923).
- Nieuwenhuis, G.J.**, Broennenboek voor het nieuwe taalonderwijs in Indie (Groningen-De Haag-Weltevreden: Wolters, 1952).
- , Het Nederlandsch in Indie: Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting Tweede druk (Groningen-De Haag-Weltevreden: Wolters, 1930).
- Oudemans, A.C.**, "Bijdrage over prinsen's leerwijze, in verband beschouwd met het onderwijs in Nederlandsch-Indie 1839, II.
- Poerbakawatja, Soegarda**, Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka (Jakarta: Gunung Agung, 1970).
- Pahpeolohy, Dolf.** De Ambonees als inheemsch soldaat (weltevreden: Mercurius, 1921).

- Raventayn, P.J. van, "Vijftig jaren: Een bijdrage tot de kennissen geschiedenis van het onderwijs in Indie gedurende de laatste helft dezer eeuw", in: P.J. Van Ravensteyn en H. Grondijs, Twee bijdragen tot de kennis van de geschiedenis van het onderwijs aan Europeanen in Nederlandsh-Indie, II (Batavia: Kollff, 1953, 1896).
- Said, Muh. & Dahlan Mansoer, Mendidik Dri Zaman ke Zaman (Jakarta: Penerbit Kebangsaan, 1953), Cetakan I.
- Said, Prof. Dr. H. muh. & Dra. Junimar Affan, MENDIDIK DARI ZAMAN KE ZAMAN (Jakarta: Jenmars, 1987), cetakan IV.
- Vandick, L.H.W. Van, Memorie van den Gouverneur der Molukeen, Mr. 2336/26 (1926).
- , Bestuursmemorie van den a aftreden Gouverneur der Molukken, 2-11-1928, mr. 3077/28.
- Sayuti, Husin, Sejarah Pendidikan Daerah Lampung, Proyek IDKD (Jakarta: Depdikbud, 1982).
- Sieburgh, G., Memorie Van Overggave van het bestuur over residentie Ambonia van de altrendenden resident G. Sieburgh, mr. 1487/10 (1910).
- Sikkers, R., "De regering maakhaar ambtenaren rebels: De geschiedenis van het Nederlands Indisch Onderwijzers Genootschap", Het schoolblad (20 November 1986).
- Soemanto, Wasty dan F.X. Soeyatno, Landasan Historis Pendidikan di Indonesia (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).
- Stepel, F.W., Geschiedenis van Nederlandsch-Indie (Amsterdam, 1940), Deel V.
- Sukardi, Heru, dll., Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur, Proyek IDKD (Jakarta: Depdikbud 1986).
- Suradi Hp, dkk, Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek IDSN (Jakarta: Depdikbud, 1986).

- Suratman, Darsiti, "Politik Pendidikan Belanda dan Masyarakat Di Jawa pada Akhir abad ke-19", Makalah Seminar Sejarah Nasional II (Yogyakarta. 1970).
- Suratmin, dkk., Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek IDSN (Jakarta: Depdikbud, 1982).
- Swellengrebel,,J.L., In Leijdeckers voetspoor: Anderhalve eeuw bijbelvertaling in de Indonesische talen ("s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1974–1978) Twee delen; KTLV, Verhandelingen 68, 82).
- Tausikal, A. Halim M.A., "De Islam in de Malukken", Cultureel Nieuws Indonesie" 2–20 (1952).
- Troosteburg de Bruyn, C.A.L. Van, De Hervormde kerjk ini Nederlandsch Oost-Indie, 1602–1795 (Arnhem: Tjeenk Willink, 1884).
- Truk, G.J. Van der, Memorie van Ovegave Resident Van Amboina G.J. Van der turk, 1–6–1880, nr. 514/80.
- Veur, P.W. Van der, Education aand social change in colonial Indonesia (I) Athens: Ohio University Prees, 1969 (Southeast Asia Series 12).
- Wal. Dr. S.L. van der "Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch Indie, 1900)1940", Ewn Bronnen publicatie (Groningen J.B. Wolters, 1967).
- Wijk, N.A. Van, Memorie van Overgave Van de onderafdeling Amboina, 1937.
- Zainud in, Sejarah pendidikan daerah jambi, Proyek IDKN (Jakarta: Dekdikbud, 1980/1981).

